



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005-2025



**MENJADI NATUNA MAS
(MAKMUR, ADIL DAN SEJAHTERA)**

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005-2025



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 280, Pasal 281 dan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Natuna maupun Nasional, sehingga perlu disesuaikan dan dilakukan Perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
RUMUSAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RPJP Daerah Kabupaten Natuna merupakan penjabaran dari visi, misi jangka panjang dengan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi, memuat arah pembangunan Daerah Kabupaten Natuna selama 20 (dua puluh) tahun.
 - (2) RPJP Daerah Kabupaten Natuna merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna selama kurun waktu tahun 2005-2025.
 - (3) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, baik substansi dan jangka waktunya sesuai kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah periode sebelumnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sistematika Penyusunan Perubahan RPJP Daerah sebagai berikut:
 - I. BAB I : Pendahuluan.
 - II. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.
 - III. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah.
 - IV. BAB IV : Visi dan Misi Daerah.
 - V. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah.
 - VI. BAB VI : Penutup.

- (2) Sistematika Penyusunan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (4 / 8 /2020)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NATUNA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2005-2025

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025**

**KABUPATEN NATUNA
2020**



- KATA PENGANTAR -

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa oleh karena penyertaan dan bimbingan-Nya dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 ini dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

Dokumen Perubahan RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan yang mengalami perubahan setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah sebuah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang 20 tahun untuk memberi panduan bagi pelaksanaan pembangunan bagi kepala daerah untuk menjalankan masa pemerintahan selama lima tahun pada empat periode berturut-turut. Dokumen ini memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Pemerintah Kabupaten Natuna pada pelaksanaan pembangunan jangka panjang.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna untuk periode Tahun 2005-2025 mempunyai 3 unsur pokok yang menjadi cita-cita dan harapan dalam pembangunan Kabupaten Natuna, yaitu: (a) makmur, (b) adil dan (c) sejahtera yang merupakan ciri-ciri dari masyarakat yang maju dan bermartabat sebagaimana yang didambakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagai berikut: " Menjadi Natuna MAS (Makmur, Adil dan Sejahtera)".

Adapun rumusan misi Kabupaten Natuna dalam rangka pencapaian visi tersebut adalah:

- | | |
|--------|--|
| Misi 1 | Mewujudkan tata kehidupan masyarakat beragama dan berbudaya yang selaras dan harmonis |
| Misi 2 | Mewujudkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata serta mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi |



- Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan Akuntabel
- Misi 4 Mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing
- Misi 5 Menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas ekonomi Daerah
- Misi 6 Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

Demikian dokumen Perubahan RPJPD ini disusun dan disampaikan. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Natuna, masyarakat, beserta *stakeholders* dapat bersinergi bersama-sama dalam mewujudkan visi Kabupaten Natuna “**Menjadi Natuna MAS (Makmur, Adil dan Sejahtera)**” di akhir periode RPJPD tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita.

Natuna, April 2020

Bupati Natuna


Drs. H. Abdul Hamid Rial, M.Si.

**- DAFTAR ISI -**

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-7
1.5. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-13
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-24
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-48
2.5. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	II-53
2.6. Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Natuna	II-62
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	III-1
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	III-2
3.2. Isu Strategis	III-14
BAB IV VISI DAN MISI	IV-1
4.1. Visi	IV-1
4.2. Misi	IV-3
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah	V-2
5.2. Sasaran Pokok	V-8
BAB VI PENUTUP	VI-1
6.1. Kaidah Pelaksanaan	VI-1

**- DAFTAR TABEL -**

Tabel	2.1.	Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Natuna	II-4
Tabel	2.2.	Banyaknya Pulau Menurut Kecamatan	II-5
Tabel	2.3.	Karakteristik Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Natuna Tahun 2018	II-12
Tabel	2.4.	Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018	II-16
Tabel	2.5.	Komponen Penyusun IPM Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018	II-20
Tabel	2.6.	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2011-2015	II-24
Tabel	2.7.	Sekolah, Guru, Murid dan Rasionya Kabupaten Natuna Tahun 2018	II-25
Tabel	2.8.	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah Kabupaten Natuna Tahun 2018	II-25
Tabel	2.9.	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah Kabupaten Natuna Tahun 2018	II-26
Tabel	2.10.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2017-2018	II-28
Tabel	2.11.	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Kabupaten Natuna Tahun 2018	II-28
Tabel	2.12.	Angka Kematian Bayi, Balita, Ibu dan Prevalensi Gizi Buruk Balita Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018	II-31
Tabel	2.13.	Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang Mengelola Dan Jenis Permukaan, Kabupaten Natuna Tahun 2017	II-32
Tabel	2.14.	Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang Mengelola Dan Kondisi Jalan, Kabupaten Natuna Tahun 2017	II-32
Tabel	2.15.	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Natuna Tahun 2013-2017	II-36
Tabel	2.16.	Jumlah Lifting Minyak Bumi dan Nilainya Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018	II-44
Tabel	2.17.	Jumlah Lifting Minyak Bumi dan Nilainya Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018	II-44
Tabel	2.18.	Penduduk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kabupaten Natuna Tahun 2018	II-52
Tabel	2.19.	Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Natuna	II-64
Tabel	3.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2015-2018	III-9
Tabel	3.2.	Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018	III-9
Tabel	3.3.	Angka Kemiskinan Kabupaten Natuna, Tahun 2014-2018	III-10



Tabel 3.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2018	III-12
Tabel 3.5.	Tahapan dan Skala Prioritas Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional 2005-2025	III-21
Tabel 3.6.	Hubungan Antara Permasalahan dan Isu Pembangunan Jangka Panjang Serta Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	III-51
Tabel 5.1.	Rumusan Arah Kebijakan Pada Setiap Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025	V-7
Tabel 5.2.	Keterkaitan Antara Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, Indikator dan Target Pembangunan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025	V-9

**- DAFTAR GAMBAR -**

Gambar	1.1.	Hubungan Antar Dokumen dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	I-7
Gambar	2.1.	Peta Kabupaten Natuna	II-3
Gambar	2.2.	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Natuna	II-10
Gambar	2.3.	Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018	II-11
Gambar	2.4.	Piramida Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2018	II-13
Gambar	2.5.	PDRB adh Berlaku Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)	II-15
Gambar	2.6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018 (%)	II-17
Gambar	2.7.	PDRB per Kapita* Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018 (JutaRupiah)	II-18
Gambar	2.8.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018	II-19
Gambar	2.9.	Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018	II-22
Gambar	2.10.	Angka Keluhan Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018	II-29
Gambar	2.11.	Angka Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018	II-34
Gambar	2.12.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018	II-35
Gambar	2.13.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2018	II-37
Gambar	2.14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Tahun 2018	II-38
Gambar	2.15.	Kunjungan Wisata Menurut Obyek Wisata Kabupaten Natuna Tahun 2018	II-43
Gambar	2.16.	Jumlah Pedagang Menurut Jenisnya, Kabupaten Natuna Tahun 2017	II-45
Gambar	3.1.	Keterkaitan Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna	III-3
Gambar	3.2.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018	III-4
Gambar	3.3.	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018	III-5
Gambar	3.4.	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018	III-6
Gambar	3.5.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Natuna, Tahun 2018	III-7
Gambar	3.6.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 201	III-12



- Gambar 3.7. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 201817 III-13
- Gambar 5.1. Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna 2005-2025 V-3



BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian dari berbagai pembangunan-pembangunan di daerah baik pembangunan provinsi maupun pembangunan kabupaten/kota. Rangkaian yang bersinergi antara pembangunan satu dengan yang lain memberikan suatu hasil nyata dalam mewujudkan tujuan nasional. Tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu kebijakan pembangunan yang dapat merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara, sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana pembangunan.

Kabupaten Natuna merupakan wilayah kepulauan yang memiliki berbagai potensi sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Setiap potensi sumber daya tersebut diupayakan dikelola untuk kepentingan bersama memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Namun dalam pengelolaannya, perlu adanya *grand design* pembangunan yang memiliki entitas secara luas namun dapat ditelaah secara rinci dan mendalam. Oleh karena itulah, dirumuskan suatu perencanaan pembangunan jangka panjang 20 tahun untuk memberi panduan bagi pelaksanaan pembangunan bagi kepala daerah untuk menjalankan masa pemerintahan selama lima tahun.

1.1. Latar Belakang

Perubahan sistem tata kelola pemerintahan dan pola penyelenggaran negara serta amandemen UUD 1945 pasca krisis ekonomi dan moneter tahun 1997 berimplikasi pada



munculnya paradigma dan perubahan dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Hal tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan amanat perundang-undangan tersebut dan dengan ditiadaknya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang sangat diperlukan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga RPJPD yang disusun bersifat makro, dinamis, visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, dengan tujuan memandu (arah) pembangunan dan memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Sejak ditetapkan, RPJPD Natuna telah dilaksanakan dalam tiga periode kepemimpinan, masing-masing dengan RPJMD Tahap I (2006-2011), RPJMD Tahap II (2011-2016), dan RPJMD Tahap III (2016-2021) yang saat ini sedang berjalan. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi ketiga periode RPJMD tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa dipandang perlu untuk melakukan perubahan RPJPD. Alasan utama perlunya dilakukan perubahan RPJPD adalah untuk menyesuaikan rencana pembangunan dengan kondisi, tantangan atau permasalahan dan isu strategis mutakhir.

Alasan lain yang tak kalah penting dan melandasi dilakukannya perubahan adalah terbitnya beberapa peraturan perundangan (terbaru) seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan beberapa peraturan lainnya. Tak kalah penting juga dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam menindaklanjuti poin peraturan terakhir tersebut, guna memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable*



Development Goals (SDGs) tersebut, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sebagai wujud komitmen politik Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna untuk melaksanakan TPB/SDGs berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 serta terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 maka RPJPD Kabupaten Natuna dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terkait dengan penataan ruang dan wilayah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan Natuna yang ramah lingkungan.

Selanjutnya, sesuai Pasal 342 Ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar.

Pasal 342 Ayat (2) Huruf a Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun. Mengingat bahwa perubahan ini dilakukan pada tahun 2019 dimana RPJMD tahap III baru akan berakhir pada tahun 2021, maka perubahan RPJPD masih dapat dilakukan dan arah kebijakan atau prioritas pembangunan untuk RPJMD tahap III dan tahap IV masih dapat dipedomani atau dilaksanakan. Selanjutnya, dengan telah terbitnya RTRW untuk periode 2011-2031 maka RPJPD harus dapat menyinergikan kebijakan tata ruang dalam kebijakan pembangunan jangka panjang untuk periode sampai dengan tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 berdasarkan kepada Pancasila sebagai Landasan Idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional dan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan sebagai landasan operasional, yaitu:



1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



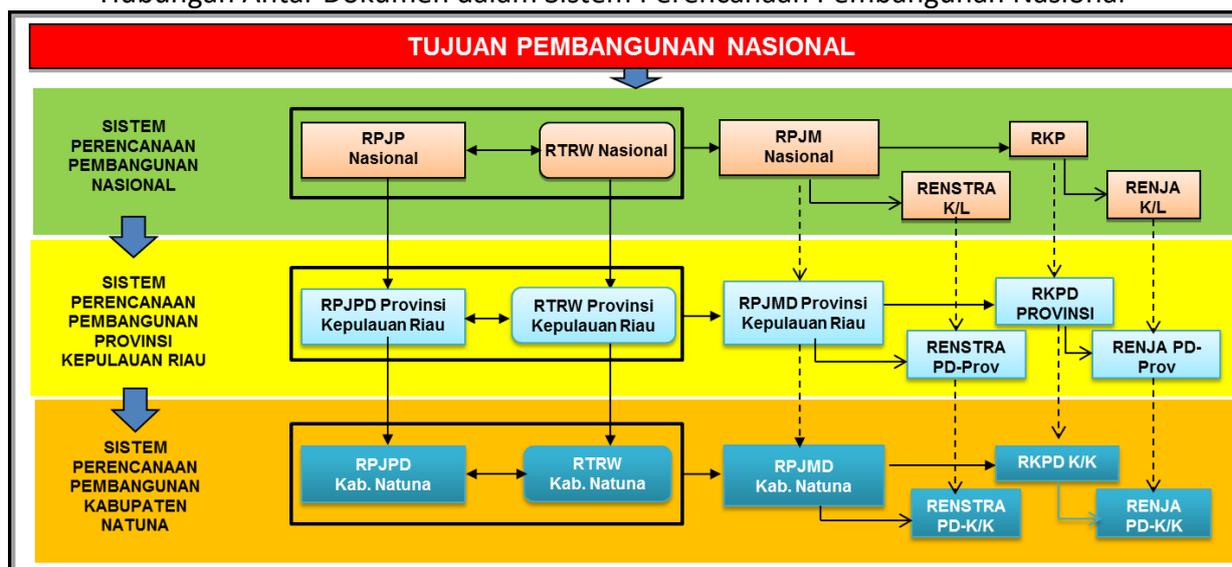
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, sistem perencanaan pembangunan daerah harus sinergi, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota demikian pula sebaliknya. Hal ini karena masing-masing tingkatan perencanaan bukan hanya memiliki sasaran yang spesifik, tetapi juga agregatif dari sistem perencanaan yang ada di bawahnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN, yakni 20 (dua puluh) tahun yang terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan. Oleh karena itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 secara hierarki mengacu pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPN sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Penyusunan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025, selain mengacu pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPN, juga didasarkan pada kajian aspek tata ruang yang ada, yaitu RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031, sehingga rencana tata ruang dan RPJPD menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian, kedua dokumen tersebut menjadi salah satu rujukan utama dalam penyusunan RPJMD di setiap tahapannya. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan daerah akan menciptakan keterpaduan dan keselarasan pencapaian tujuan pembangunan nasional secara bersama-sama, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 disusun dengan maksud untuk menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan Kabupaten Natuna dalam masa 20 (dua puluh) tahun pembangunan, khususnya pada perubahan perencanaan jangka menengah tahap ketiga dan perencanaan pembangunan jangka menengah tahap keempat.

Adapun tujuan dari penyusunan perubahan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 adalah:



1. Memberikan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Natuna sebagai pijakan dasar untuk menentukan, memahami dan menilai arah kebijakan, dengan mendasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksi ke depan selama sisa masa pembangunan jangka panjang 2005-2025;
2. Memberikan gambaran umum permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan jangka panjang daerah hingga tahun 2025;
3. Merumuskan keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari pembangunan daerah pada akhir tahun 2025 dan upaya umum untuk mewujudkannya (visi dan misi); dan
4. Merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara misi pembangunan dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode dengan kondisi periode pembangunan tahap pertama dan tahap kedua merupakan eksisting yang telah dilaksanakan dan tahap ketiga dan keempat merupakan pentahapan pembangunan yang akan direalisasikan.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 maka sistematika penulisan Perubahan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 terdiri dari 6 (enam) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; menggambarkan kondisi umum daerah dan capaian pembangunan yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah Kabupaten Natuna yang diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;** mengemukakan butir-butir penting permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, baik isu internasional, isu nasional, maupun kebijakan regional yang akan dihadapi selama pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna.
- BAB IV VISI DAN MISI DAERAH;** berisi pernyataan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna tahun 2005-2025.
- BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH;** bagian ini berisi arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara misi dengan sasaran pokok dan bagaimana penahapan pembangunan tiap lima tahunan dilakukan selama 4 (empat) periode.
- BAB VI PENUTUP;** berisi kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan inti dari didirikannya sebuah wilayah administrasi yang memiliki tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diupayakan sebagai bentuk dorongan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari keempat tujuan di atas, dapat disimpulkan tujuan Negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Poin utama dalam pembentukan kewilayahan sebagai upaya pemerataan pembangunan adalah kesejahteraan. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan harus dirancang dan dirumuskan secara seksama untuk menjadikannya relevan dan valid dalam mewujudkan tujuan yang dimaksud.

Untuk menjadikan perencanaan memiliki kekuatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan, maka pijakan analisis kebijakan pembangunan perlu dipelajari dan dikaji secara mendalam untuk kemudian menjadi dasar bagi penetapan rumusan kebijakan pembangunan. Pijakan analisis kebijakan dalam pembangunan adalah potret kehidupan masyarakat yang terlihat dari gambaran umum kondisi daerah pada berbagai aspek seperti aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.



Keempat aspek tersebut, selanjutnya diturunkan menjadi fokus-fokus pembangunan daerah sebagai bagian dari capaian kinerja pembangunan daerah. Untuk memahami lebih lanjut berbagai potensi dan kinerja pembangunan selama ini, berikut gambaran umum Kabupaten Natuna yang dikaji dan dianalisis dalam kerangka aspek dan fokus pembangunan daerah.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis utamanya dalam memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Natuna baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga klimatologi wilayah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Natuna.

Analisis aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Natuna akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara *series* maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

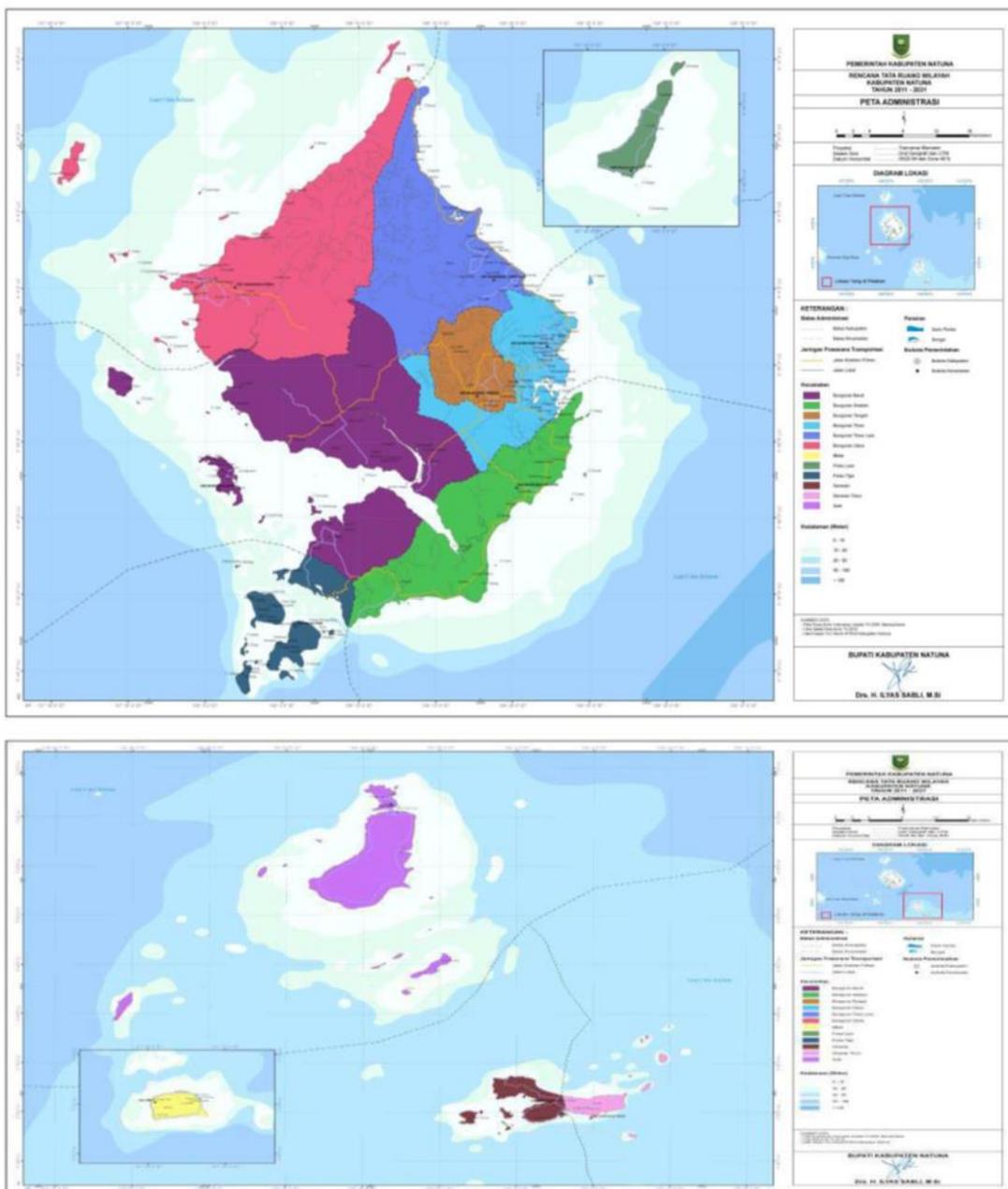
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Natuna berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Vietnam,
- Sebelah Selatan : Kepulauan Bintan,
- Sebelah Timur : Malaysia Timur dan Kalimantan Barat, dan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kepulauan Anambas

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Natuna



Secara administratif, Kabupaten Natuna memiliki 15 Kecamatan serta 7 Kelurahan dan 70 Desa dengan luas wilayah mencapai 264.145,26 km², dimana sebagian besar terdiri dari wilayah perairan yakni seluas 262.167,07 km² dan sisanya daratan yang merupakan kepulauan seluas 1.978,19 km². Secara rinci, wilayah dengan luas daratan terluas yaitu Kecamatan Bunguran Utara seluas 405,88 km², sedangkan luas daratan tersempit yaitu Kecamatan Suak Midai seluas 12,45 km², seperti terlihat pada tabel berikut.



Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan
Kabupaten Natuna

No	Kecamatan	Luas Daratan (km ²)	Luas Lautan (km ²)	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pulau
1	Midai	13,80	262.167,07	3	1
2	Suak Midai	12,45		3	1
3	Bunguran Barat	248,38		5	16
4	Bunguran Batubi	214,81		5	1
5	Bunguran Utara	405,88		8	15
6	Pulau Laut	37,64		3	8
7	Pulau Tiga	41,55		6	15
8	Pulau Tiga Barat	17,41		4	3
9	Bunguran Timur	142,14		7	9
10	Bunguran Timur Laut	299,42		7	10
11	Bunguran Tengah	85,95		3	0
12	Bunguran Selatan	234,56		4	8
13	Serasan	44,99		7	34
14	Subi	146,33		8	23
15	Serasan Timur	26,61		4	10
Kabupaten Natuna		1978,19	262.167,07	77	154

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Natuna

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, letak Kabupaten Natuna berada pada posisi 1⁰16' Lintang Utara sampai dengan 7⁰19' Lintang Utara dan 105⁰00' Bujur Timur 110⁰00' Bujur Timur.

Di wilayah Kabupaten Natuna terdapat 154 pulau, dengan 27 pulau (17,53 persen) yang berpenghuni dan sebagian besar pulau (127 pulau atau 82,47 persen) tidak berpenghuni. Pulau-pulau tersebut tersebar di 14 Kecamatan, dengan Kecamatan Serasan yang memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu 34 pulau (11,76% pulau berpenghuni dan 88,24% tidak berpenghuni), sedangkan Kecamatan Bunguran Tengah sama sekali tidak memiliki pulau. Adapun jumlah masing-masing pulau yang dimiliki setiap kecamatan tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Banyaknya Pulau Menurut Kecamatan
Kabupaten Natuna

No	Kecamatan	Jumlah Pulau				Total Pulau	Persentase
		Berpenghuni	%	Tidak Berpenghuni	%		
1	Midai	1	100,00	0	0,00	1	0,65
2	Suak Midai	0	0,00	1	100,00	1	0,65
3	Bunguran Barat	3	18,75	13	81,25	16	10,39
4	Bunguran Batubi	0	0,00	1	100,00	1	0,65
5	Bunguran Utara	2	13,33	13	86,67	15	9,74
6	Pulau Laut	3	37,50	5	62,50	8	5,19
7	Pulau Tiga	3	20,00	12	80,00	15	9,74
8	Pulau Tiga Barat	1	33,33	2	66,67	3	1,94
9	Bunguran Timur	1	11,11	8	88,89	9	5,84
10	Bunguran Timur Laut	1	10,00	9	90,00	10	6,49
11	Bunguran Tengah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Bunguran Selatan	0	0,00	8	100,00	8	5,19
13	Serasan	4	11,76	30	88,24	34	22,08
14	Subi	7	30,43	16	69,57	23	14,93
15	Serasan Timur	1	10,00	9	90,00	10	6,49
Jumlah Pulau		27	17,53	127	82,47	154	100

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2019

c. Topografi

Berdasarkan kondisi topografinya, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Dataran rendah dan landai banyak ditemukan di pinggir pantai. Ketinggian wilayah antar kecamatan cukup beragam, yaitu berkisar antara 3 sampai dengan 959 meter dari permukaan laut dengan kemiringan antara 2 sampai 5 meter. Selain itu, pada umumnya struktur tanah di wilayah Kabupaten Natuna terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan yang tanah dasarnya mempunyai bahan granit, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus.

d. Geologi

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Kabupaten Natuna merupakan perbukitan yang membujur dari tenggara barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran yang menempati bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai di wilayah



Natuna adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis. Kabupaten Natuna merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi terutama Cekungan Natuna.

Tanah merupakan unsur penting dalam kegiatan perekonomian, karena tanah merupakan wadah dari segala aktivitas baik itu aktivitas ekonomi, sosial maupun kegiatan lainnya. Jenis data tanah yang terdapat di wilayah studi diambil berdasarkan klasifikasi Pusat Penelitian Tanah (PPT) tahun 1983, sedangkan adanya perbedaan penamaan sebelum tahun 1983 karena tanahnya dibedakan dengan klasifikasi Pusat Penelitian Tanah (PPT) tahun 1983. Tanah-tanah yang terdapat di lokasi studi dapat dibedakan menjadi dua kelompok tanah, yaitu tanah mineral dan tanah organik.

Tanah di Kecamatan Bunguran Barat dan Kecamatan Bunguran Timur umumnya terdiri dari jenis tanah latosol, alluvial, podsolik serta organosol. Tanah-tanah tersebut terbentuk dari bahan induk batuan beku organosol. Tanah-tanah tersebut terbentuk dari bahan organik. Jenis tanah alluvial dijumpai di sepanjang tanggul sungai utama, daerah *meander* serta daerah *flood plain* yang terdapat di belakang pantai marin. Jenis tanah latosol adalah jenis tanah mineral yang telah mengalami pelapukan lanjut, sangat tercuci sehingga batas-batas horison menjadi baur, kandungan mineral primer dan unsur hara rendah dengan warna tanah merah, coklat kemerahan, coklat, coklat kekuningan dijumpai dari muka laut hingga ketinggian 900 m diatas permukaan laut.

Jenis tanah podsolik dijumpai pada ketinggian antara 50 m hingga 350 m dpl, sedangkan jenis tanah organosol dijumpai pada daerah cekungan di belakang sungai utama yang merupakan daerah rawa dan pada umumnya tingkat kematangan hemik sampai saprik. Tingkat kesuburan tanah pada daerah studi yang dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian Tanah (PPT) tahun 1983 tergolong rendah hingga sedang pada seluruh jenis tanah yang diteliti.

Tanah yang terdapat di Kecamatan Serasan dan Midai umumnya terdiri dari jenis tanah gleisol, latosol, alluvial, litosol dan organosol. Tanah-tanah tersebut terbentuk dari bahan induk bahan organik (endapan pantai berupa pasir, kerikil dan sisa tumbuhan), batuan beku basa dan batuan vulkanik. Tanah alluvial sebagian besar menempati satuan visiografi daratan pasang surut dan pantai marin terbentuk dari



bahan induk alluvium pantai/endapan marin. Pada satuan fisiografi ini tanah terbentuk dari bahan endapan muda (alluvium-kolluvium) dan proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh fluktuasi air/genangan sehingga sifat-sifat hidromorfik di dalam penampangannya. Jenis tanah gleisol dijumpai di Pulau Subi besar yang berkembang dari bahan alluvium-koluvium yang terdiri dari endapan halus dan kasar (campuran) serta lumpur marin menempati satuan fisiografi pasang-surut dan pelebahan dengan bentuk wilayah datar.

Perkembangan tanah sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu jenuh air (hidromorfik) yang dicirikan oleh adanya gleid yang merupakan hasil dari proses reduksi. Kondisi drainase terhambat sampai sangat terhambat, kedalaman tanah umumnya dalam dengan perkembangan struktur yang sangat lemah pada lapisan atas dan pejal pada lapisan bawah. Tekstur lapisan atas lempung berpasir dan lapisan bawah lempung liat berpasir dengan reaksi tanah masam. Tingkat kesuburan tanah pada daerah studi yang dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PPT tahun 1983 tergolong rendah hingga sedang.

e. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Natuna dapat dilihat dari 2 hal, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Natuna berupa sungai, diantaranya Sungai Ranai yang terdapat di Kecamatan Bunguran Timur dan sungai lainnya. Hulu Sungai Ranai dan sungai-sungai kecil lainnya di Kecamatan Bunguran Timur ini umumnya di Gunung Ranai, sungai-sungai kecil tersebut diantaranya Sungai Ngusang, Sungai Sarang Batunagis, Sungai Batukilang, Sungai Jemengan, Sungai Siman dan Sungai Senipak. Selain sungai, air permukaan terdapat juga di Kecamatan Bunguran Timur yaitu Air Terjun Gunung Ranai dan di Kecamatan Bunguran Tengah yaitu Air Terjun Air Lengit. Sumber air tanah yang terdapat di Kabupaten Natuna berkisar 1-3 m wilayah dataran, sedangkan pada wilayah yang topografinya berbukit-bukit kedalaman muka air tanah berkisar 1-7 m.

f. Klimatologi

Iklim di Kabupaten Natuna sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Dalam rentang musim penghujan yang terjadi di Natuna, ada musim yang populer di masyarakat Natuna terutama untuk kalangan nelayan yaitu musim angin utara.



Musim ini dinamakan angin utara karena angin datang secara kontinyu dari arah utara melewati wilayah Natuna. Jika musim ini sedang berlangsung, nelayan di Kabupaten Natuna tidak berani turun melaut akibat gelombang, angin dan badai laut sangat berbahaya.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Natuna memasuki musim angin utara pada bulan Januari, April, dan Agustus. Pada tahun 2018, musim angin utara berlangsung pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Agustus, September dan Oktober.

Menurut pemantauan yang dilakukan oleh BMKG, suhu udara di Kabupaten Natuna berada pada rentang 21,0°C sampai dengan 33,8°C pada tahun 2018. Suhu udara mencapai titik tertinggi di bulan Juni dan Juli dengan suhu maksimum adalah 33,8°C. Namun jika merujuk pada suhu rata-rata harian, temperatur udara paling tinggi terjadi di bulan Maret Juli dengan rata-rata mencapai 27,6°C. Suhu pada ketiga bulan ini memang cukup tinggi, sesuai dengan musim kemarau yang sedang berlangsung di Kabupaten Natuna.

Data BMKG juga menunjukkan bahwa rata-rata tekanan udara di Kabupaten Natuna berada pada rentang 1.000,10 *milibars per second* (mbps) hingga 1.015,80 mbps. Sedangkan kelembaban udara berada pada rentang 49 persen hingga 100 persen. Selain itu, kecepatan angin yang bergerak melewati Kabupaten Natuna bervariasi pada kecepatan 0 knot sampai 38 knot. Penyinaran matahari juga terjadi cukup intens dengan rata-rata 64,4 persen per hari.

g. Penggunaan Lahan

Pola pemanfaatan ruang wilayah dalam kawasan perkotaan dan perdesaan terdiri dari Kawasan lindung, Kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.



2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Secara umum, berbagai daerah di Indonesia merupakan titik rawan bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi. Wilayah Indonesia dikepung oleh lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

Dari hasil pendataan sementara yang dilakukan bagian kesiagaan dan penanggulangan bencana Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) Natuna, menyatakan bahwa, kawasan pulau Natuna merupakan daerah yang berkawasan ekstrim. Hal ini dikarenakan letak geografis wilayahnya berada di ujung utara dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Salah satu titik rawan bencana di daerah kepulauan Kabupaten Natuna adalah daerah yang berpotensi tinggi terhadap masalah abrasi pantai, meliputi: kecamatan Midai, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Subi.

Selain itu, daerah yang berpotensi mengalami angin puting beliung adalah Kecamatan Bunguran Utara. Sedangkan, kawasan yang berpotensi terjadi longsor berada di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut.

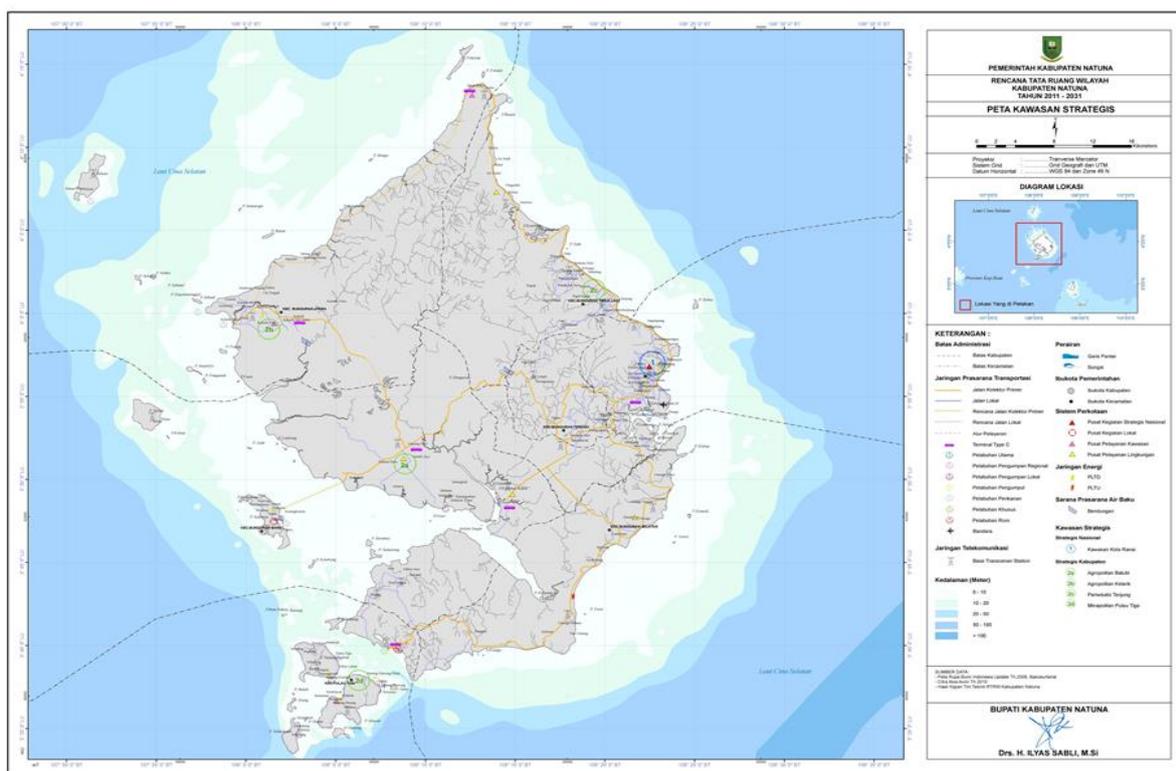
2.1.3. Potensi Sumber Daya

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna sangat beragam, Kabupaten Natuna yang secara geografis terdiri dari kepulauan memiliki keunggulan di bidang pariwisata alam. Gugusan Kepulauan Natuna memiliki pemandangan yang indah, dengan panorama pantai yang masih terjaga keasriannya. Natuna demikian elok dan memiliki banyak potensi, seperti Pantai Tanjung, Pantai Sebagul, Pantai Teluk Selahang, Pantai Setengar, Pantai Sisi Serasan dan Pantai Piwang dan sebagainya. Sejumlah lokasi bahkan menjadi tempat favorit bagi penggemar wisata maritim seperti *snorkeling*, *diving*, pengamatan habitat penyu, dan pecinta wisata bawah air dan wisata maritim lainnya. Kabupaten Natuna dengan luas wilayah lautan sebesar 99,25 persen juga mempunyai potensi yang sangat besar di bidang perikanan.

Selain potensi pariwisata alam dan perikanan Kabupaten Natuna saat ini memang menjadi salah satu daerah andalan penghasil minyak dan gas Indonesia. Berdasarkan laporan studi Kementerian dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2002, cadangan minyak yang dimiliki Natuna mencapai 308,30 juta Barel. Sementara cadangan gas buminya terbesar se-Indonesia, yaitu sebesar 54,78 triliun kaki kubik. Tidak mengherankan jika Dana Bagi Hasil Migas menjadi sumber utama pendapatan Kabupaten Natuna.

Kawasan prioritas adalah kawasan yang strategis dikembangkan lebih dahulu karena potensi yang dimilikinya baik karena fungsinya maupun karena kegiatan tersebut mampu mendorong perkembangan sektor kegiatan lainnya. Pengembangan kawasan prioritas berdasarkan fungsinya lebih diarahkan kepada pemantapan dan peningkatan fungsi tersebut, sedangkan kawasan prioritas yang mempunyai *multiplier effect* (efek ganda) terhadap timbul dan berkembangnya kegiatan baru adalah dengan mendorong peningkatan kegiatan tersebut dengan cara memberikan kemudahan/akses, pengembangan fasilitas dan penciptaan iklim investasi yang kondusif terhadap perkembangan kegiatan tersebut. Rencana pola ruang dan kawasan strategi Kabupaten Natuna dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Natuna



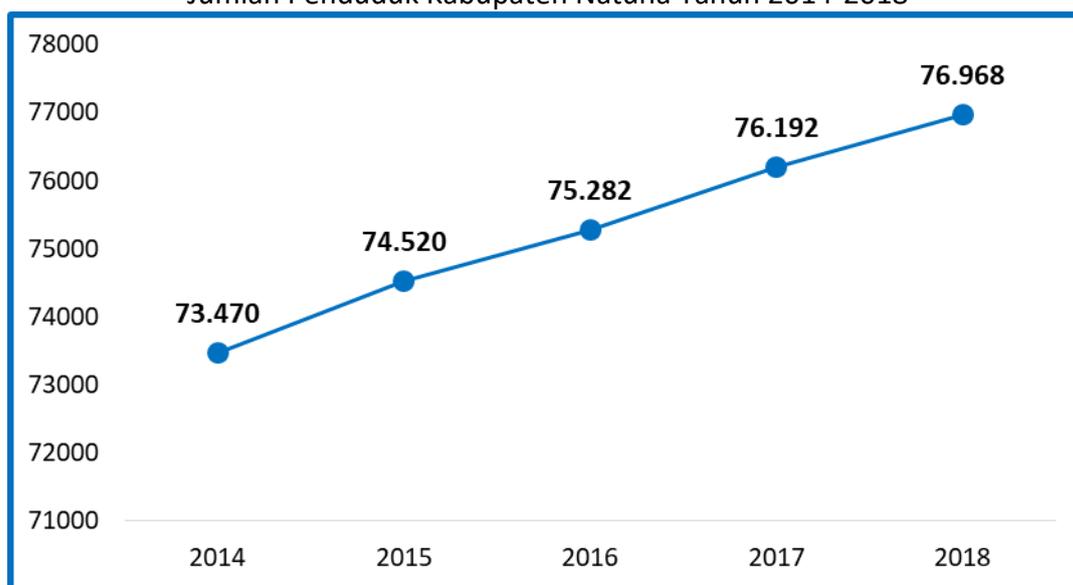
Sumber: RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031

2.1.4. Demografi

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2014 memiliki jumlah penduduk sebanyak 73.470 jiwa meningkat menjadi sebanyak 76.968 jiwa pada tahun 2018. Kenaikan yang cukup tinggi ini disebabkan oleh berbagai fenomena demografi baik karena kelahiran maupun migrasi penduduk masuk, adapun pengurang penduduk Natuna disebabkan karena adanya kematian dan migrasi penduduk keluar.

Gambar 2.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

Dari 76.968 jiwa yang tinggal di Kabupaten Natuna, penduduk tersebar hampir merata di seluruh kecamatan Natuna kecuali wilayah kecamatan Bunguran Timur yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi mencapai 36,64 persen atau sebanyak 28.200 jiwa yang tinggal di kecamatan tersebut. Penghunian penduduk tertinggi ini dikarenakan Kecamatan

Bunguran Timur merupakan kecamatan dimana pusat pemerintahan berada yakni ibukota Natuna (Ranai). Sehingga berbagai pusat kegiatan perekonomian juga berada pada kawasan yang sama.

Jika dilihat dari kepadatan penduduk, maka kepadatan penduduk Kabupaten Natuna secara umum sebesar 41,16 jiwa/km² yang berarti dalam cakupan luas wilayah 1 km² terdapat 41-42 penduduk yang berdomisili di Natuna. Jika dilihat menurut kecamatannya, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Midai yang mencapai 254,49 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Bunguran Utara yang mencapai 9,93 jiwa/km². Selain itu, pertumbuhan penduduk tertinggi dalam kurun waktu tahun 2017-2018 di Kabupaten Natuna sebesar 1,02 persen dengan pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Bunguran Timur yang mencapai 2,03 persen.

Tabel 2.3
Karakteristik Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Natuna Tahun 2018

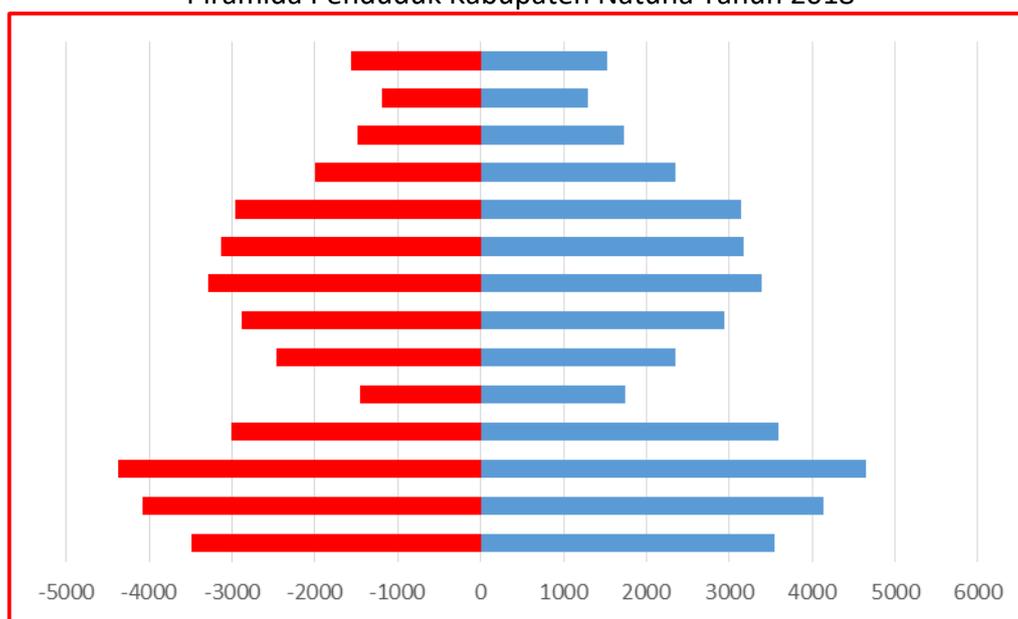
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Pertumbuhan Penduduk 2017-2018
1	Midai	3.504	4,55	254,49	0,06
2	Suak Midai	1.590	2,07	128,05	0,13
3	Bunguran Barat	7.694	10,00	31,06	0,16
4	Bunguran Utara	4.017	5,22	9,93	0,40
5	Pulau Laut	2.584	3,36	69,1	1,65
6	Pulau Tiga	3.276	4,26	79,79	0,12
7	Bunguran Batubi	3.485	4,53	16,25	0,14
8	Pulau Tiga Barat	1.649	2,14	96,52	0,12
9	Bunguran Timur	28.200	36,64	190,78	2,03
10	Bunguran Timur Laut	4.450	5,78	23,59	0,23
11	Bunguran Tengah	3.039	3,95	35,41	0,56
12	Bunguran Selatan	2.588	3,36	11,06	0,08
13	Serasan	5.182	6,73	126,36	1,27
14	Subi	2.917	3,79	18,67	1,14
15	Serasan Timur	2.793	3,63	100,47	0,11
Jumlah		76.968	100,00	41,16	1,02

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

Analisis kependudukan salah satu nya adalah piramida penduduk yang dilihat dari jumlah penduduk menurut karakteristik umur. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur kependudukan yang dilihat dari segi umur penduduk dan jenis kelamin untuk dianalisis mengenai produktivitas umur di suatu wilayah. Jika dilihat dari

piramida penduduk Natuna, maka terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Natuna adalah penduduk muda namun pada umur produktivitas tertentu (20-24 tahun) mengalami penurunan secara drastis dan meningkat kembali pada kelompok umur di atasnya. Kemungkinan besar hal ini dikarenakan cukup tingginya atensi masyarakat umur 20-24 dalam mengenyam pendidikan kuliah di luar Natuna untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Gambar 2.4
Piramida Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2018



Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat akan menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Natuna yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ini akan terlihat sebuah “potret kehidupan” masyarakat Kabupaten Natuna serta analisis dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Natuna utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda



perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Natuna. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

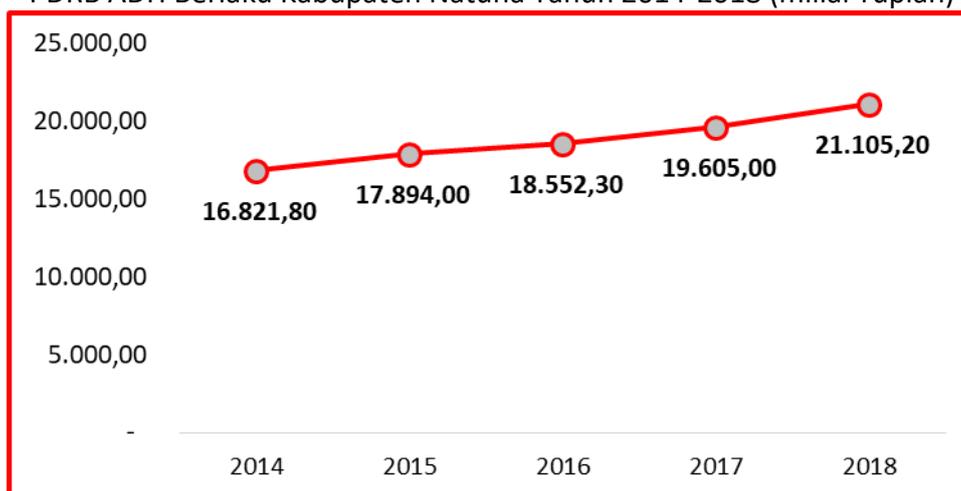
Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Natuna antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Gambar 2.5

PDRB ADH Berlaku Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)

*Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019*

PDRB Natuna mengalami peningkatan di setiap tahunnya dengan capaian 21,11 trilyun rupiah pada tahun 2018. Angka ini merupakan capaian tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir dengan capaian terendah berada pada tahun 2014 dengan PDRB sebesar 16,82 trilyun rupiah. Angka PDRB ini didominasi oleh sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian dimana pada tahun 2018 memiliki dominasi yang sangat tinggi hingga mencapai 72,63 persen dari seluruh struktur perekonomian Natuna. Secara series, dominasi sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Sektor lapangan usaha kedua yang memiliki dominasi cukup tinggi dalam pelaksanaan perekonomian Natuna adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dimana pada tahun 2018 memberi kontribusi sebanyak 10,98 persen terhadap perekonomian daerah. Angka ini terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sehingga memberikan “angin segar” dalam mewujudkan pembangunan perekonomian berkelanjutan.

**Tabel 2.4**Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha
Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018 (%)

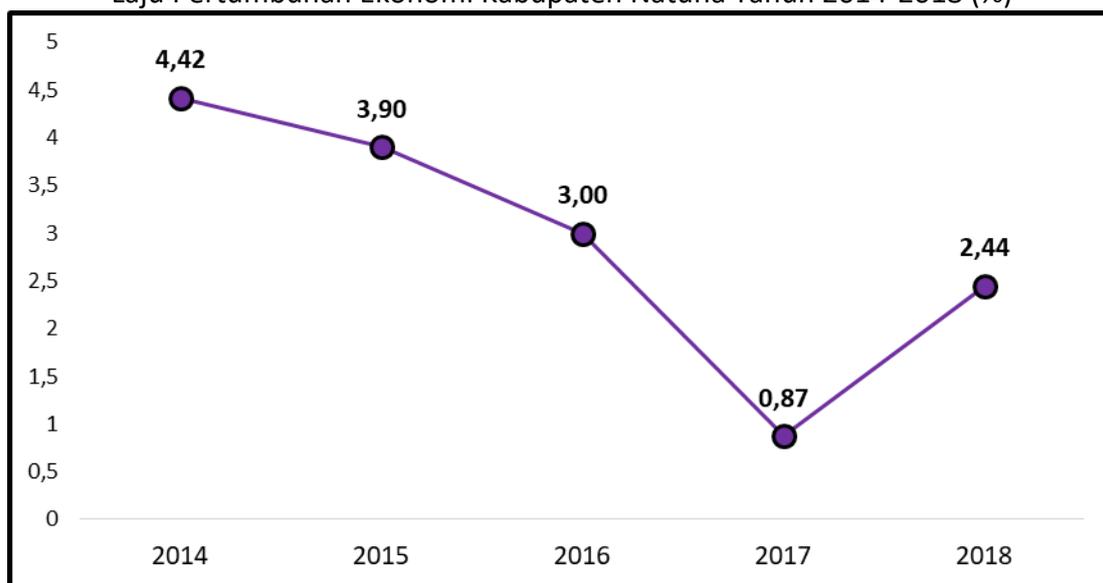
Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,67	9,84	10,40	10,79	10,98
B	Pertambangan dan Penggalian	76,16	75,36	73,70	72,57	72,63
C	Industri Pengolahan	0,70	0,72	0,76	0,77	0,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,66	6,88	7,27	7,55	7,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,32	2,69	3,09	3,33	3,36
H	Transportasi dan Pergudangan	0,56	0,62	0,70	0,72	0,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,39	0,43	0,46	0,47	0,48
J	Informasi dan Komunikasi	0,49	0,50	0,53	0,59	0,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14
L	Real Estate	0,52	0,55	0,59	0,62	0,61
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,86	1,71	1,76	1,80	1,69
P	Jasa Pendidikan	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,26	0,28	0,30	0,30	0,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

Perekonomian Natuna dikarenakan memiliki ketergantungan pada sektor pertambangan dan penggalian yang notabene adalah sumber daya alam tak terbarukan dan memiliki gejolak harga cukup rentan di pasar dunia, maka berdampak pada fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga tahun 2017, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan hingga mencapai 0,87 persen di tahun 2017. Angka pertumbuhan ekonomi ini membaik pada tahun 2018 dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 2,44 persen.

Gambar 2.6

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

b. Inflasi

Kinerja ekonomi Kabupaten Natuna menunjukkan hasil yang baik, hal ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Natuna untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap tumbuh. Jika perkiraan pertumbuhan ekonomi relatif lebih rendah dibanding perkiraan inflasi yang terjadi, tentunya perkembangan kesejahteraan masyarakat diduga juga mengalami penurunan. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan kesejahteraan itu terjadi melalui selisih pertumbuhan ekonomi dengan inflasi yang terjadi.

Pada tahun 2016 terjadi inflasi sebesar 2,56 persen di Ranai. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya inflasi sebesar 4,31 persen mengalami penurunan. Penurunan nilai inflasi tersebut tentu tidak lepas dari usaha pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan pengendalian inflasi daerah. Terjadinya inflasi tidak lepas dari perkembangan indeks harga barang dan jasa pada tingkat konsumen. Pada bulan Januari 2016, Indeks Harga Konsumen (IHK) Ranai adalah sebesar 124,15. Sementara itu, IHK Ranai pada Desember 2016 adalah sebesar 126,37.

Selama tahun 2016, nilai IHK terkecil adalah pada Bulan April 2016, yakni sebesar 122,98 sedangkan nilai IHK tertinggi dicapai pada Bulan November 2016 yakni sebesar 126,43.

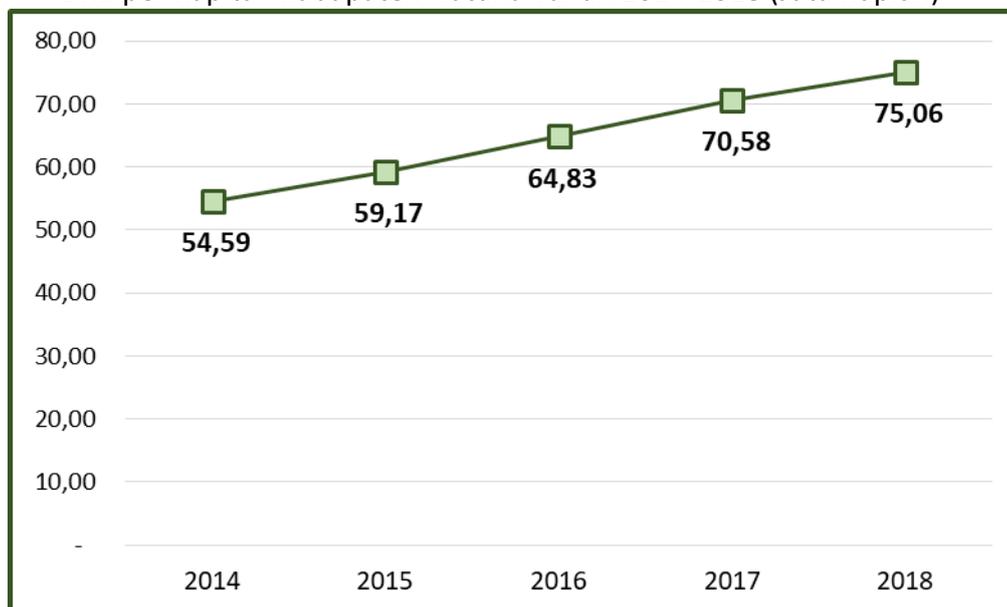
c. Pendapatan Regional

Tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara makro berdasarkan PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun setidaknya dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

PDRB per Kapita Natuna mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai 75,06 juta rupiah pada tahun 2018. Angka ini mengindikasikan secara umum bahwa terjadi kenaikan jumlah pendapatan regional di masyarakat yang berimplikasi kepada peningkatan kesejahtraannya. Dalam penghitungannya, sektor pertambangan dan penggalian dikeluarkan dari PDRB per Kapita Natuna karena memiliki dominasi yang tinggi dan sebagian besar nilai tambah tidak dinikmati oleh masyarakat Natuna.

Gambar 2.7

PDRB per Kapita* Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)



*non sektor pertambangan dan penggalian
Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan Natuna dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan

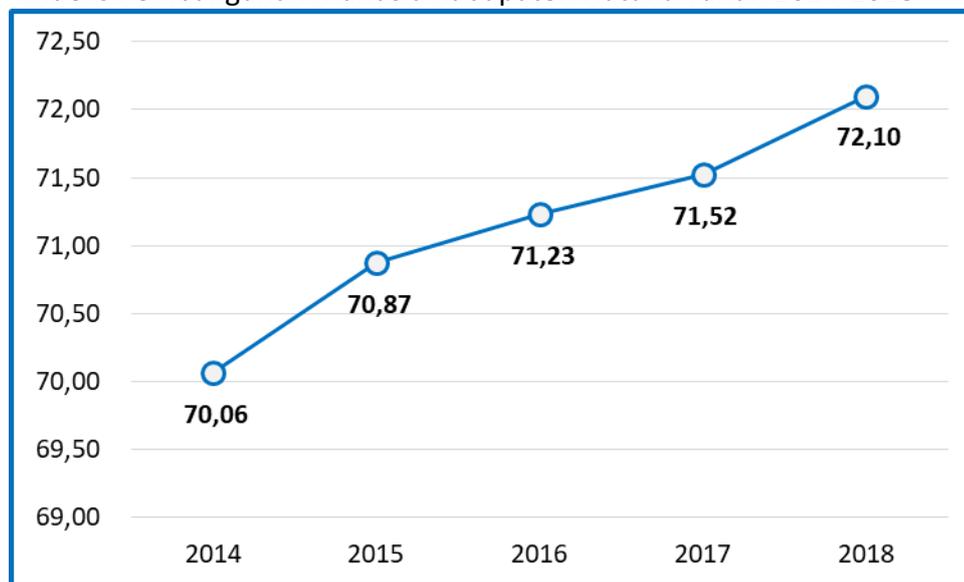
Manusia (IPM). Berikut analisis lebih lanjut dalam melihat fokus kesejahteraan sosial Natuna.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Keberhasilan pembangunan daerah dapat terwujud apabila selaras dengan pembangunan manusia. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan) serta Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Gambar 2.8

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Natuna mengalami kenaikan di setiap tahunnya yang disebabkan karena meningkatnya komponen penyusun IPM Natuna. Pada tahun 2018, IPM Natuna mencapai 72,10 yang meningkat 2,04 poin dari angka IPM tahun 2014 (70,06). Kenaikan ini merupakan catatan positif bagi pembangunan sumber daya manusia dan diupayakan pemerataan pembangunannya dalam peningkatan mutu sarana dan prasarana penunjang kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2.5Komponen Penyusun IPM
Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018

Komponen IPM	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Harapan Hidup	63,24	63,64	63,99	64,33	64,57
Harapan Lama Sekolah	13,84	13,85	13,86	13,87	13,88
Rata-rata Lama Sekolah	8,07	8,45	8,46	8,47	8,71
Paritas Daya Beli	13 414	13 612	13 834	13 970	14 217
IPM	70,06	70,87	71,23	71,52	72,10

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

- Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir.

Rata-rata lama sekolah di Natuna mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai 8,71 tahun di tahun 2018. Capaian angka ini dirasa belum optimal mengingat rata-rata lama sekolah masyarakat Natuna belum mencapai target wajib belajar 9 tahun. Angka 8,71 tahun ini menunjukkan bahwa penduduk Natuna yang berumur di atas 25 tahun rata-rata telah mengenyam pendidikan selama 8,71 tahun atau bersekolah hingga jenjang SMP kelas 3 semester kedua.

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah Harapan Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).



HLS Natuna mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Selama kurun waktu terakhir hanya meningkat 0,04 poin dimana pada tahun 2014 memiliki HLS sebesar 13,84 tahun dan pada tahun terakhir meningkat menjadi 13,88 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa pada kondisi normal, seseorang berumur 7 tahun diharapkan dapat bersekolah sampai dengan jenjang perguruan tinggi pada semester keempat.

- Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup Natuna semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Capaian Harapan Hidup penduduk Natuna selama 64,57 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir di Natuna akan memiliki harapan hidup hingga usia 64-65 tahun.

b. Rasio Penduduk yang Bekerja (Tingkat Kesempatan Kerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga mampu menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Tingkat Kesempatan Kerja di Natuna menunjukkan terjadi peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Natuna baik formal, informal maupun kesempatan dalam berusaha. Kenaikan ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 namun meningkat kembali hingga tahun 2018 mencapai 96,48 persen.

Gambar 2.9

Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Bidang sosial budaya dan kehidupan beragama merupakan aspek yang fundamental dan berperan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan manusia yang diejawantahkan dalam wujud peningkatan kesejahteraan dan kualitas taraf hidup masyarakat. Pada titik ini, nilai-nilai budaya bangsa yang mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945 perlu direvitalisasi ke dalam suatu pranata-pranata yang aplikatif sehingga secara substansial mampu menaungi sekaligus menjadi pijakan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam prakteknya selama ini, ternyata nilai-nilai ideologis bangsa ini masih belum terimplementasikan secara utuh dan nyata. Lebih dari itu, sejalan dengan penyelenggaraan pembangunan yang mengacu kepada karakteristik dan spesifikasi daerah, serta dalam kerangka memperkuat kohesi dan ketahanan sosial yang menyangkut interaksi antar individu atau kelompok masyarakat dapat dirasakan adanya kecenderungan terbaikannya budaya daerah yang memuat nilai-nilai, sikap, perilaku, kebiasaan (custom), tradisi, adat istiadat, dan bentuk-bentuk kearifan lokal lainnya.

Mayoritas penduduk Kabupaten Natuna adalah suku melayu dan memiliki potensi peninggalan sejarah, maupun adat istiadat yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan. Kawasan-kawasan bersejarah yang tersebar di seluruh kecamatan mempunyai nilai tawar yang layak dijual. Disamping itu peninggalan seni dan budaya melayu menjadi nilai tambah dari objek



wisata yang ditawarkan di masing-masing daerah, seperti musik tradisional, pakaian daerah, hingga arsitektur bangunannya.

Terkait kesenian tradisional, seperti jumlah sanggar kesenian, gelar seni, kajian seni, fasilitasi seni, sumber daya manusia kesenian, organisasi seni, tempat umum yang menyajikan kesenian, karya bahasa dan sastra yang dilestarikan, film dokumenter kebudayaan yang dihasilkan dan misi kesenian, saat ini belum tersedia data. Oleh karena itu, kedepan perlu ada peningkatan fasilitas bidang seni budaya, agar kebudayaan melayu tetap lestari, mewarnai kehidupan masyarakat, dan mendorong keberhasilan pembangunan.

Terkait dengan Sejarah, perlu ada peningkatan pengkajian buku/naskah yang dikaji, buku/naskah sejarah lokal yang ditulis, dan inventarisasi dan dokumentasi data sejarah budaya. Sementara itu terkait dengan pengelolaan Cagar Budaya, capaian Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Natuna belum diperoleh data yang terbaru. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu revitalisasi Bangunan arsitektur melayu, dan revitalisasi Desa/Kampung Budaya.

Di bidang kepemudaan dan olah raga, data yang diperoleh adalah jumlah klub olah raga, organisasi pemuda, organisasi olah raga, kegiatan kepemudaan, kegiatan olah raga, dan lapangan olah raga. Sementara untuk jumlah organisasi kepemudaan di kabupaten yang diberdayakan dan dibina, prestasi pemuda yang diraih tingkat nasional dan internasional, jumlah sarjana penggerak pembangunan pendesaan, jumlah pemuda pelopor kabupaten, jumlah pemuda yang mengikuti PPAN (pertukaran pemuda antar negara) per tahun belum tersedia data. Minimnya data kepemudaan dan olah raga menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan komitmen untuk pembinaan organisasi pemuda dan peningkatan kualitas pemuda agar mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional sekaligus menjadi obyek pembangunan. Perkembangan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah grup kesenian	93	93	93	93	93
2	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	4	7
3	Jumlah klub olahraga	100	188	188	141	141
4	Jumlah gedung olahraga	0	0	1	1	2

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pada bagian aspek pelayanan umum akan dijelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, baik pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non dasar, urusan pilihan serta penunjang urusan. Berikut penjabaran aspek pelayanan umum sebagai bagian dari hasil pembangunan daerah selama ini.

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintah yang harus di selenggarakan oleh pemerintah daerah Karena berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap kebutuhan masyarakat. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Natuna memang mengalami perbaikan di setiap tahunnya, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang kebutuhan dasar kehidupan masyarakat seperti Pendidikan, kesehatan, aksesibilitas wilayah, penyediaan perumahan yang layak, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat hingga sosial. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib pemerintah hingga saat ini.

a. Pendidikan

Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam lingkup *Sustainable Development Goals*, aspek pendidikan menjadi salah satu aspek terpenting untuk diperhatikan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030.

- Fasilitas Pendidikan

Pada hakikatnya, jumlah guru dan sekolah di Natuna sudah mencukupi dalam melakukan pembelajaran terhadap siswa-siswa di Natuna. Namun yang menjadi persoalannya adalah pemerataan dan kualitasnya perlu adanya pembenahan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Natuna.

Tabel 2.7
Sekolah, Guru, Murid dan Rasionya
Kabupaten Natuna Tahun 2018

Jenjang Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Sekolah Murid	Rasio Guru Murid
TK sederajat	6	13	163	27,17	12,54
SD Sederajat	82	917	9.884	120,54	10,78
SMP Sederajat	35	448	4.497	128,49	10,04
SMA Sederajat	25	479	3.759	150,36	7,85

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

- Status Pendidikan

Dari seluruh penduduk berusia 7-24 tahun di Kabupaten Natuna pada tahun 2018, 80,71 persen di antaranya masih bersekolah, 17,89 persen tidak bersekolah lagi dan 1,39 persen sisanya tidak/belum pernah bersekolah. Jika dibandingkan antara jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang masih bersekolah dan tidak bersekolah lagi masih lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan, sedangkan sebaliknya persentase penduduk laki-laki yang tidak/belum pernah sekolah lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Natuna yang sedang atau pernah mengenyam bangku pendidikan didominasi oleh penduduk laki-laki.

Tabel 2.8
Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah Kabupaten Natuna Tahun 2018

Jenis Kelamin/Kelompok Umur	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-laki			
7-12	0,26	20,43	0,00
13-15	0,00	12,91	0,00
16-18	0,15	5,84	1,81
19-24	0,24	3,12	7,40
7-24	0,65	42,30	9,22



Jenis Kelamin/Kelompok Umut	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Perempuan			
7-12	0,16	19,59	0,00
13-15	0,32	11,05	0,00
16-18	0,26	7,44	2,16
19-24	0,00	0,33	6,51
7-24	0,74	38,41	8,68
Total			
7-12	0,42	40,02	0,00
13-15	0,32	23,96	0,00
16-18	0,41	13,28	3,98
19-24	0,24	3,45	13,91
7-24	1,39	80,71	17,89

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

- Angka Partisipasi

Jika melihat dari indikator angka partisipasi pendidikan, yaitu APM (Angka Partisipasi Murni) dan APK (Angka Partisipasi Kasar), Kabupaten Natuna meraih angka yang cukup tinggi di tahun 2018.

APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM yang menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah memiliki nilai sebesar 98,96 persen untuk jenjang pendidikan SD/MI. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing memiliki nilai sebesar 92,38 persen dan 70,17 persen.

Tabel 2.9

Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah Kabupaten Natuna Tahun 2018

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2017	2018	2017	2018
SD/MI	98,62	98,96	106,62	102,66
SMP/MTs	89,80	92,38	95,48	95,98
SMA/SMK/MA	69,56	70,17	84,50	96,91

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019



APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan memiliki nilai sebesar 102,66 persen dan untuk jenjang Pendidikan SD/MI. Selanjutnya untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing memiliki nilai sebesar 95,98 persen dan 96,91 persen. Secara keseluruhan pada tahun 2018, APM jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA mengalami peningkatan. Sedangkan untuk APK, terjadi penurunan pada jenjang pendidikan SD, namun meningkat pada jenjang Pendidikan SMP dan SMA.

- Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya. Angka melek huruf Kabupaten Natuna pada tahun 2018 yaitu sebesar 99,83 persen, yang artinya 99,83 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Natuna yang berusia 15 tahun ke atas sudah dapat membaca dan menulis.

b. Kesehatan

Perkembangan bidang kesehatan suatu daerah menjadi salah satu tujuan pokok pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Terkait dengan hal tersebut, bidang kesehatan sendiri juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, hingga tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah.

- Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Natuna pada tahun 2018 terdiri atas rumah sakit, rumah bersalin, klinik/balai kesehatan, *maternal and child health center* dan polindes. Kabupaten Natuna memiliki satu buah rumah sakit umum yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur. Selanjutnya, masing-masing kecamatan di Kabupaten Natuna pada tahun 2018 memiliki 1 *public health center*, kecuali di



Kecamatan Suak Midai yang tidak memiliki *public health center* sama sekali. Selain itu, Kecamatan Suak Midai juga tidak memiliki *maternal and child health center*, dimana kecamatan lainnya sudah memiliki *maternal and child health center* lebih dari satu.

Tenaga kesehatan yang terdapat di Kabupaten Natuna terdiri dari dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi dan ahli gizi, dengan jumlah terbesar adalah dari perawat yaitu berjumlah 371 orang. Sedangkan tenaga kesehatan yang berjumlah paling sedikit adalah ahli gizi, yaitu berjumlah 20 orang.

Pada tahun 2018 terdapat dua kecamatan di Kabupaten Natuna yang tidak memiliki tenaga kesehatan, yaitu Kecamatan Suak Midai dan Kecamatan Pulau Tiga. Namun dua kecamatan ini masih memiliki akses yang cukup mudah untuk menuju kecamatan terdekatnya, yaitu Kecamatan Midai dan Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Tabel 2.10
Jumlah Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Natuna Tahun 2017-2018

No	Fasilitas Kesehatan	2017	2018
1	Rumah Sakit Umum	1	1
2	Rumah Sakit Khusus	0	1
3	Rumah Sakit Bersalin	0	3
4	Klinik/Balai Kesehatan	4	4
5	Puskesmas	14	14
6	Posyandu	118	118
7	Polindes	13	20

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

Tabel 2.11
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Kabupaten Natuna Tahun 2018

No	Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
1	Midai	3	26	15	2	2
2	Suak Midai	-	-	-	-	-
3	Bunguran Barat	2	24	10	2	1
4	Bunguran Utara	3	12	11	1	-
5	Pulau Laut	3	12	8	1	2
6	Pulau Tiga	-	-	-	-	-
7	Bunguran Batubi	2	12	9	2	1
8	Pulau Tiga Barat	1	18	16	1	1
9	Bunguran Timur	28	156	68	20	6
10	Bunguran Timur Laut	3	20	20	2	1
11	Bunguran Tengah	2	15	11	1	-



No	Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
12	Bunguran Selatan	1	8	12	1	1
13	Serasan	2	23	9	3	2
14	Subi	1	23	7	1	1
15	Serasan Timur	1	22	9	2	2
Jumlah		52	371	205	39	20

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

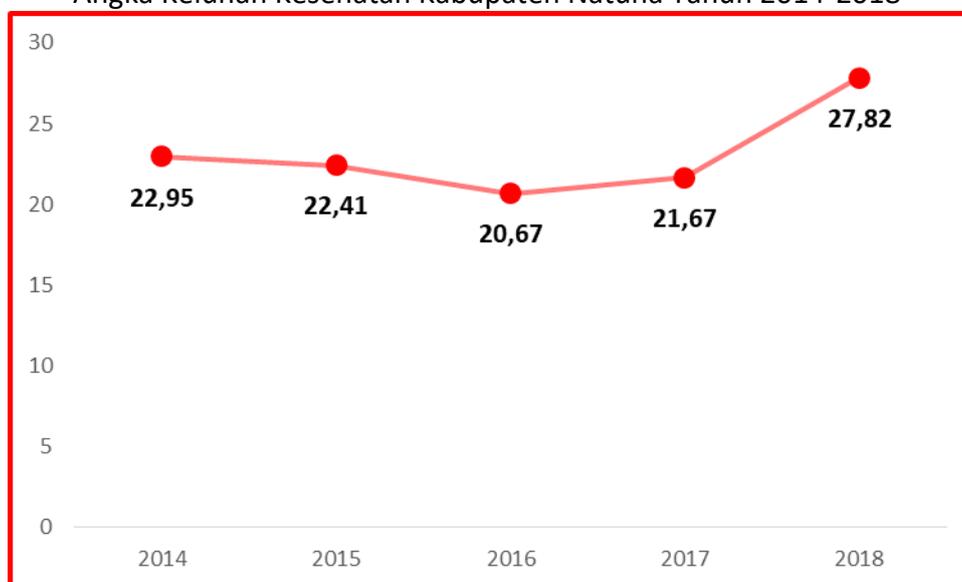
- Angka Kesakitan (Morbiditas)

Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan sendiri adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.

Salah satu indikator kesehatan, yaitu persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2018 indikator kesehatan tersebut bernilai sebesar 27,82 persen. Artinya adalah 27,82 persen penduduk di Kabupaten Natuna pada tahun 2018 mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal atau hal lain.

Gambar 2.10

Angka Keluhan Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019



- Angka Kematian dan Prevalensi Gizi Buruk

Angka kematian bayi adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Capaian kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 adalah 12,97. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan angka kematian bayi semenjak 2015 yang mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan bayi saat melahirkan.

Angka kematian ibu adalah jumlah kematian ibu yang terjadi selama masa kehamilan atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tanpa melihat usia dan lokasi kehamilan oleh setiap penyebab yang berhubungan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetap ibu oleh kecelakaan atau faktor kebetulan yang dinyatakan sebagai angka per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu di Natuna mengalami kenaikan khususnya pada tahun 2017, meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali hingga 152,56. Angka ini mengindikasikan bahwa terdapat 152-153 ibu yang meninggal per 100.000 kelahiran hidup. Peningkatan angka kematian ibu perlu diwaspadai karena indikator ini mengimplementasikan rendahnya pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan melahirkan.

AKABA adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA bersama dengan AKB dan AKI merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat yang dapat menggambarkan upaya kesehatan yang telah dilaksanakan serta dapat mencerminkan tingkat dan besarnya masalah kemiskinan sebagai indikator sensitive bagi perkembangan sosial ekonomi nasional.

Angka kematian balita mengalami penurunan signifikan pada tahun 2018 jika dibandingkan 2017. Angka kematian balita tahun 2018 sebesar 0,76 yang mengindikasikan diantara 1.000 balita terdapat kurang dari 1 balita yang meninggal.

Pada tahun 2018, prevalensi gizi buruk pada balita mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2014-2015. Kenaikan ini harus menjadi catatan pada *stakeholder* terkait untuk lebih memperhatikan status kesehatan balita karena masih rentannya balita terhadap berbagai macam penyakit.

**Tabel 2.12**Angka Kematian Bayi, Balita, Ibu dan Prevalensi Gizi Buruk Balita
Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,76	16,21	13,31	14,00	12,97
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	126,58	67,52	73,96	311,04	152,56
3	Angka Kematian Anak balita (AKABA)	per 1000 Balita	12,03	0,63	0,74	3,89	0,76
4	Prevalensi Gizi Buruk pada Balita	%	0,47	0,20	-	-	0,99

*Sumber : Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Natuna, 2018***c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Salah satu fokus pembangunan infrastruktur dasar pembangunan adalah pembangunans arana jalan yang merupakan salah satu bagian dari pembangunan suatu wilayah. Kondisi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi seperti sekarang ini, menuntut tersedianya prasarana jalan yang memadai. Ketersediaan prasarana jalan yang memadai dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada akhir tahun 2017 tercatat bahwa panjang jalan di Kabupaten Natuna adalah 817,95 km yang terbagi menjadi 117,88 km jalan negara, 143,33 km jalan provinsi, 434,93 km jalan kabupaten, dan 121,81 km jalan non status. Jumlah ini tidak menurun dibanding tahun 2016, namun panjang jalan desa/kelurahan tidak tercatat sehingga jumlahnya lebih kecil.

Jika dilihat berdasarkan jenis permukaannya, panjang jalan di Kabupaten Natuna terbagi menjadi 277,41 km jalan beraspal, 124,61 km jalan beton, 256,40 km jalan kerikil, dan 159,53 km jalan tanah. Seluruh jalan negara yang ada di Kabupaten Natuna

sudah dilapisi aspal. Namun, untuk jalan provinsi dan jalan kabupaten hanya sebagian jalan yang sudah dilapisi aspal. Sementara itu, jalan non status hanya sedikit yang dilapisi aspal dan masih didominasi dengan jalan yang dilapisi tanah yaitu sebanyak 71,90 km.

Tabel 2.13

Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang Mengelola dan Jenis Permukaan, Kabupaten Natuna Tahun 2017

No	Jenis Permukaan Jalan	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Non Status	Jumlah
1	Aspal	117,88	74,54	81,54	3,45	277,41
2	Beton	0,00	17,84	105,07	1,70	124,61
3	Kerikil	0,00	9,72	201,92	44,76	256,40
4	Tanah	0,00	41,23	46,40	71,90	159,53
Jumlah		117,88	143,33	434,93	121,81	817,95

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, 2018

Panjang jalan di Kabupaten Natuna jika dirinci berdasarkan kondisi jalan dapat diketahui bahwa terdapat 304,64 km jalan memiliki kondisi baik, 128,92 km jalan memiliki kondisi sedang, 120,21 km jalan berstatus rusak ringan, dan 264,18 km jalan berstatus rusak berat. Secara umum, hampir seluruh kondisi jalan negara yang ada di Kabupaten Natuna sudah berstatus baik. Sementara untuk jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa/kelurahan masih terdapat bagian jalan yang berstatus rusak/rusak berat yang jumlahnya tidak dapat dikatakan sedikit.

Tabel 2.14

Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang Mengelola Dan Kondisi Jalan, Kabupaten Natuna Tahun 2017

No	Jenis Permukaan Jalan	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Non Status	Jumlah
1	Baik	110,15	64,69	126,05	3,75	304,64
2	Sedang	0,20	12,55	109,42	6,75	128,92
3	Rusak	3,23	22,26	86,07	8,65	120,21
4	Rusak Berat	4,30	43,83	113,39	102,66	264,18
Jumlah		117,88	143,33	434,93	121,81	817,95

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, 2018

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap keluarga. Rumah dan perumahan harus memenuhi kriteria kenyamanan, keamanan dan kesehatan guna mendukung segala aktifitas penghuninya.

Beberapa capaian positif telah diperoleh pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dimana rumah tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan hingga mencapai 70,95 persen pada tahun 2018. Selain itu, rumah tangga pengguna listrik sudah lebih baik hingga mencapai 80,92 persen pada tahun 2017.



Adapun pada aspek perumahan masyarakat juga mengalami peningkatan dimana persentase rumah layak huni mengalami peningkatan hingga mencapai 87,56 persen pada tahun 2018, sedangkan persentase kawasan kumuh menurun menjadi 3,20 persen pada tahun yang sama. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa semakin baiknya kondisi perumahan dan pemukiman masyarakat Natuna.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki rasio polisi pamong praja sebanyak 243 petugas per 10.000 penduduk. Selain itu dalam mendukung ketertiban masyarakat, maka jumlah linmas juga ditingkatkan menjadi 325 linmas per 10.000 penduduk.

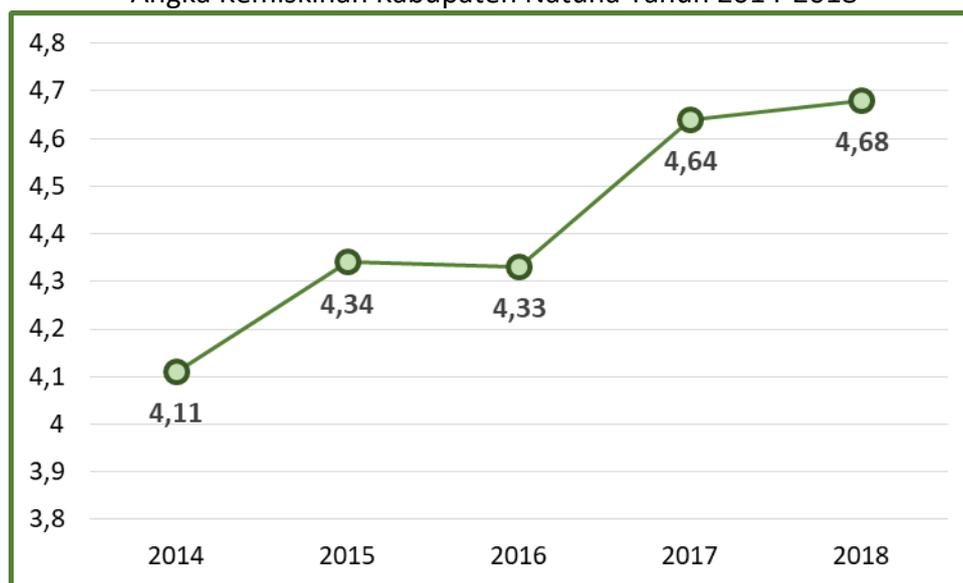
f. Sosial

Angka kemiskinan suatu wilayah akan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Angka kemiskinan di Natuna mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 memiliki angka kemiskinan sebesar 4,11 persen meningkat hingga menjadi 4,68 persen pada tahun 2018. Kenaikan ini harus menjadi perhatian khusus bagi para pengambil kebijakan mengingat urgensinya pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.11

Angka Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

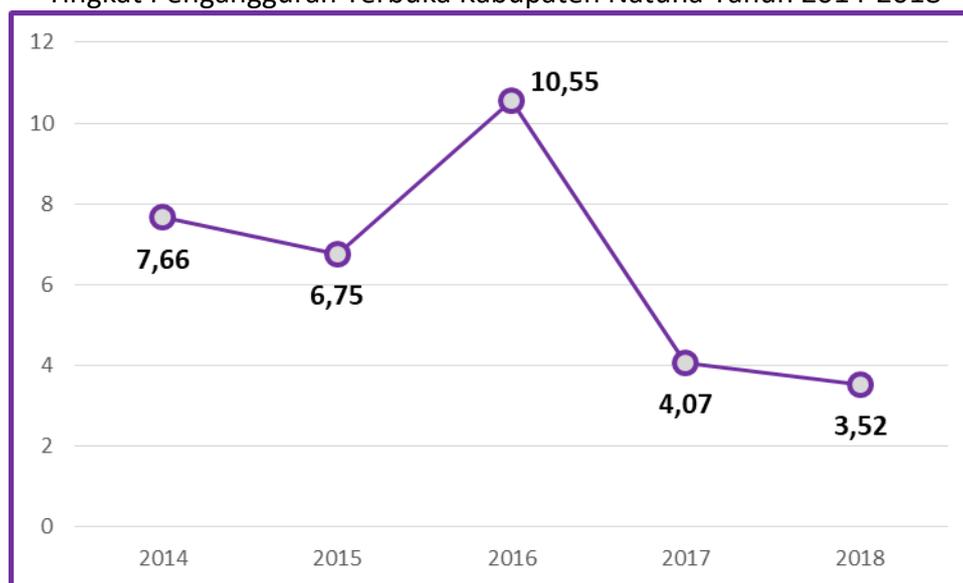
Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan yang harus di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Pelayanan pemerintahan non dasar ini secara umum sudah mengalami peningkatan tetapi masih perlu adanya peningkatan terutama yang terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

a. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia sekaligus *income* rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indikator ketenagakerjaan yang paling diperhatikan oleh para pengambil kebijakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Secara umum, tingkat pengangguran di Natuna mengalami penurunan yang cukup signifikan meskipun sempat meningkat drastic pada tahun 2016. Pada tahun 2018, angka pengangguran Natuna mencapai titik terendah dalam beberapa periode pembangunan dengan capaian angka pengangguran sebesar 3,52 persen.

Gambar 2.12

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018

*Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019***b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, pemerintah berupaya untuk terus melakukan pembangunan kualitas hidup manusia melalui kegiatan pembangunan. Upaya tersebut pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu, akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok-kelompok yang mengalami ketertinggalan dalam proses pembangunan tersebut; baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Salah satu hal yang menyebabkan ketertinggalan dari beberapa kelompok tersebut adalah masih belum terciptanya kondisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pembangunan dewasa ini seringkali mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kondisi ini diperburuk oleh persoalan lain seperti budaya, atau agama yang terkadang dapat menjadi faktor penghambat untuk mencapai kesetaraan gender.

Peran gender dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik dapat dipantau melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Sedangkan bagaimana kualitas perempuan sebagai sumber daya pembangunan dapat terlihat dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Tabel 2.15Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Natuna Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,83	90,84	90,85	na	91,31
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,46	53,86	52,85	na	48,55

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

IDG Natuna mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2014 sempat mencapai 53,86 namun menurun kembali hingga mencapai 48,55 pada tahun 2017. Lain halnya dengan IPG, IPD Natuna mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2013 sebesar 90,83 meningkat menjadi 91,31 pada tahun 2017.

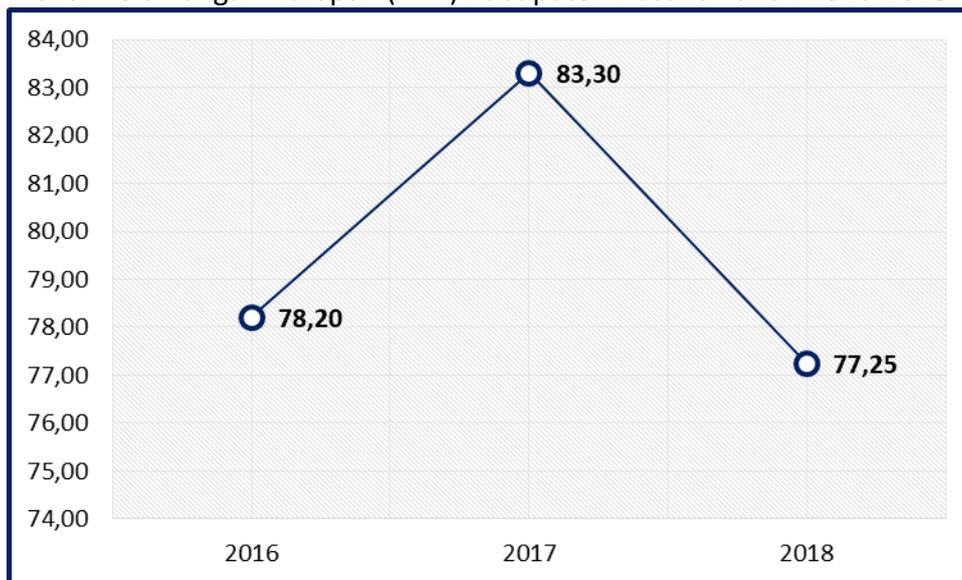
c. Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi di mana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Salah satu indikator yang penting menjadi rujukan dalam mengkaji urusan pangan adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

PPH merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Di Natuna, Skor PPH mengalami pasang surut dimana pada tahun 2017 sudah cukup baik dengan skor 83,30, namun pada tahun 2018 menurun kembali menjadi 77,25.

Gambar 2.13

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2018



Sumber : Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Natuna, 2018

d. Pertanian

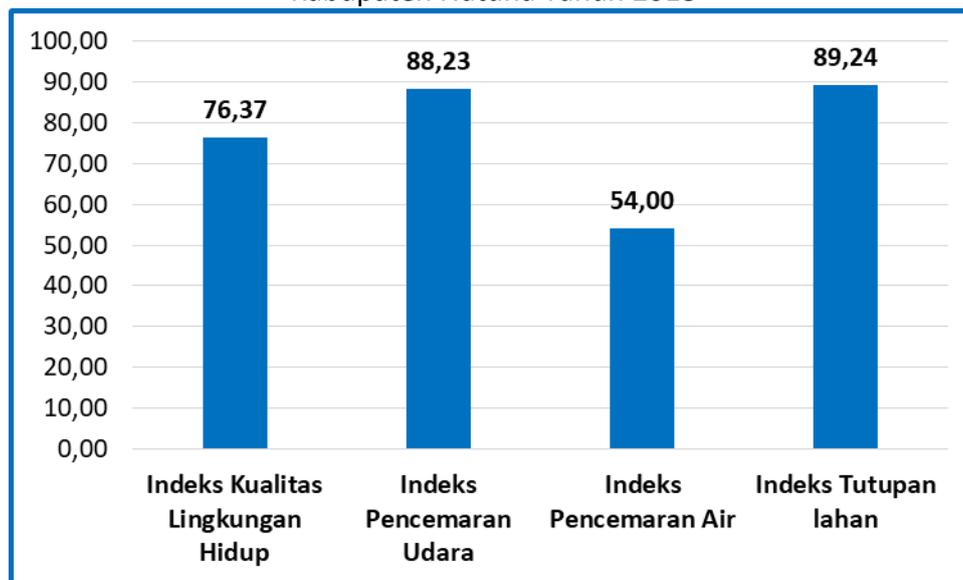
Salah satu *concern* dalam peningkatan kualitas urusan pertanian adalah meningkatkan capaian luas lahan yang bersertifikat. Pada tahun 2017 seluas 2,4 hektar lahan dikeluarkan sertifikatnya dan meningkat menjadi 3,80 hektar lahan dikeluarkan sertifikatnya pada tahun 2018. Sehingga sampai pada tahun 2018 terdapat 52.327,58 hektar luas lahan yang telah memiliki sertifikat.

e. Lingkungan Hidup

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai wilayah kepulauan, Natuna memiliki ekosistem yang sangat beranekaragam dan membentuk lingkungan hidup yang mampu memberikan manfaat terhadap kehidupan.

Dalam melihat kualitas lingkungan hidup, pemerintah daerah menyusun penghitungan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian yang didapatkan sebesar 76,37. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini disusun oleh tiga indikator yakni Indeks Pencemaran Udara (88,23), Indeks Pencemaran Air (54,00) dan Indeks Tutupan Lahan (89,24).

Gambar 2.14
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Natuna Tahun 2018



Sumber : Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Natuna, 2018

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perbaikan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat semakin meningkatnya kepemilikan KTP elektronik yang mencapai 98,00 persen dengan penerapan KTP nasional berbasis NIK. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah kepemilikan akta kelahiran dimana pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 75 persen, padahal tahun sebelumnya mencapai 90,32 persen.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu urusan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat perdesaan. Pemberdayaan masyarakat dan desa di Natuna terus digalakkan mengingat Natuna merupakan wilayah kepulauan yang memiliki daerah terluar. Dalam capaian pemberdayaan masyarakat dan desa di Natuna, terdapat beberapa catatan positif seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi yang mencapai 4 persen, 100 persen PKK aktif, hingga Pemberdayaan masyarakat Desa memiliki nilai-nilai tinggi 80 persen namun capaiannya 0.



h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dari segi fasilitas dalam pelaksanaan keluarga berencana, seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna pada tahun 2017 sudah memiliki klinik keluarga berencana sebanyak 17 unit. Sedangkan untuk pos pelayanan keluarga berencana desa terdapat 76 unit.

Jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Natuna pada tahun 2017 berjumlah 13.967 pasangan. Kemudian peserta KB aktif di Kabupaten Natuna Tiga alat KB paling banyak digunakan yaitu suntikan, pil, dan implan. Alat kontrasepsi yang paing sedikit digunakan oleh peserta KB aktif di Kabupaten Natuna adalah Metode Operasi Pria (MOP).

i. Perhubungan

Laut merupakan salah satu akses transportasi terbaik mengingat Natuna merupakan wilayah kepulauan. Terlihat peningkatan jumlah arus penumpang angkutan kapal laut dimana pada tahun 2017 terdapat 158.575 penumpang yang naik dan turun kapal, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 166.401 penumpang yang naik dan turun kapal.

Dikarenakan wilayah kepulauan, maka Natuna memiliki cukup banyak pelabuhan laut yang mencapai 92 pelabuhan pada tahun 2018. Sarana angkutan udara di Kabupaten Natuna tidak kalah pentingnya dengan angkutan lainnya. Sampai saat akhir tahun 2018 di Natuna terdapat bandara yang disinggahi oleh penerbangan komersial, yaitu Bandara Ranai di Ranai Kecamatan Bunguran Timur.

j. Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka pemenuhan akses telekomunikasi, maka di Natuna telah terpasang 79 jaringan komunikasi. Selain itu, pemerintah sendiri telah memiliki 29 *website* milik pemerintah daerah dengan 65 sistem informasi manajemen pemda sebagai sarana penunjang dalam melaksanakan pelayanan publik.

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan lembaga ekonomi yang berbasiskan kerakyatan. Oleh karena itu koperasi dan UKM diharapkan dapat



memberdayakan ekonomi rakyat. Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan ekonomi daerah.

Ekonomi daerah akan tangguh jika pelaku-pelaku ekonomi secara keseluruhan tangguh termasuk didalamnya Koperasi dan UKM. Jika kinerja Koperasi dan UKM tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kekuatan ekonomi daerah juga akan rapuh. Untuk itu, kekuatan ekonomi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila kekuatan Koperasi dan UKM melakukan mitra usaha dan menggiatkan jaringan usaha Koperasi dan UKM. Pada tahun 2018, terdapat 5,56 persen koperasi aktif dengan 2.020 unit usaha mikro dan kecil di Natuna.

I. Penanaman Modal

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) mengalami peningkatan menjadi 53 investor pada tahun 2018. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pergerakan ekonomi Natuna sehingga mampu memberikan nilai tambah pada pembangunan daerah. Dari 53 investor tersebut, terdapat 200,32 milyar rupiah nilai investasi yang digelontorkan.

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga di Natuna mengalami peningkatan pada tahun 2018 jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 ini, terdapat 188 organisasi kepemudaan dengan 11 kegiatan, 76 organisasi olahraga dengan 20 kegiatan, dan gelanggang (2 unit) serta 207 unit lapangan olahraga. Dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah selama ini, maka Natuna memiliki 16 prestasi olahraga dengan 562 atlet yang berprestasi.

n. Statistik

Di Kabupaten Natuna terdapat instansi vertikal yang khusus menangani penyediaan data dan informasi pembangunan, yakni Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. Setiap tahun, Badan Pusat Statistik Natuna mempublikasikan buku Natuna Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Natuna sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya perwujudan pembangunan daerah.



o. Persandian

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Hingga saat ini baru satu perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah.

p. Kebudayaan

Di Natuna terdapat satu penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2018. Dalam menunjang hal tersebut, terdapat dua sarana penyelenggaraan seni dan budaya. Jika dilihat dari unit kebudayaan peninggalan masa silam, maka terdapat Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 11.655 unit . Selain itu, terdapat pula 88 jenis budaya yang dikembangkan.

q. Perpustakaan

Jumlah pengunjung di perpustakaan mengalami kenaikan kunjungan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, terdapat 40.151 jumlah pengunjung perpustakaan dengan fasilitas 709 judul buku dan 1.681 eksemplar.

r. Kearsipan

Sampai dengan tahun 2018, pengelolaan arsip secara baku belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna. Hanya sebesar 0,84 persen perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Natuna. Berikut adalah urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

a. Pertanian

Pada tahun 2018 struktur perekonomian di Natuna dari sisi produksi masih di dominasi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kategori ini menyumbang sepertiga (39,94%) dari total PDRB tanpa migas Kabupaten Natuna dan jika dilihat menyeluruh PDRB dengan Migas maka kontribusinya hanya 10,98 persen. Karena



peranannya yang cukup besar, maka apabila pertumbuhannya naik atau melambat akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Natuna secara total.

Potensi kelautan dan perikanan di kabupaten Natuna cukup besar dengan luas wilayah laut 99,25 persen sehingga sektor unggulan yang dikembangkan dan diandalkan adalah subsektor kelautan dan perikanan. Potensi tersebut diberdayakan secara optimal oleh masyarakat Natuna dimana sebagian besar kontribusi ekonomi sektor pertanian berasal dari subkategori perikanan dengan peranan struktur ekonomi sebesar 76,53 persen dari sektor pertanian secara luas.

Dari subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian memberikan kontribusi sebesar 23,15 persen. Pada subsektor ini di dominasi oleh perkebunan tahunan dan disusul peternakan. Pada subsektor lainnya yakni kehutanan dan penebangan, hanya memiliki kontribusi terhadap perekonomian Natuna sebesar 0,32 persen.

b. Pariwisata

Kabupaten Natuna merupakan kota yang kaya akan khazanah kesenian tradisional melayu, seperti mendu, joget dangkung, zapin, makyong, dan lain-lain. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata budaya. Jumlah obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Natuna sebanyak 172 buah, yang terdiri dari 76 wisata bahari, 4 air terjun, 23 wisata gunung/bukit, 52 situs bersejarah dan 17 buah obyek wisata lainnya. Pada aspek sarana rekreasi dan olah raga kota, kondisi saat ini yang mendesak untuk segera ditangani adalah persebaran sarana rekreasi publik, yaitu taman-taman kota yang bersifat taman rekreasi publik yang masih minim. Saat ini taman rekreasi publik yang terdapat di Kabupaten Natuna adalah Pantai Piwang, Masjid Agung Islamic Center Ranai, Pantai Tanjung Ranai, Taman Rekreasi Ceruk, Air Terjun Batu Hiu Ceruk, Air Terjun Munong di Ceruk, Air Terjun Gunung Ranai, Pantai Batu Kasah Cemaga, Pulau Senoa, Pantai Sisi Serasan, Pantai Pasir Marus Sedanau dan lain-lain.

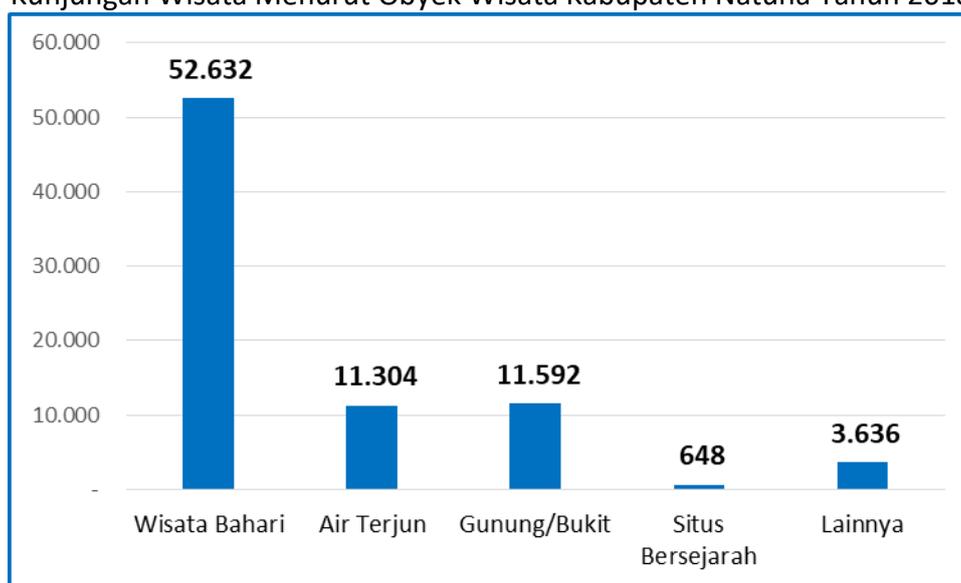
Kepariwisataan merupakan salah satu andalan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat tidak tergantung dengan kegiatan dari pemerintahan atau dana APBD. Untuk itu diharapkan kepedulian dari Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung

di obyek-obyek wisata sangat urgent untuk dilaksanakan. Selain itu infrastruktur menuju akses tempat wisata dapat dibangun sehingga para wisatawan dapat mengakses dengan mudah.

Peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Natuna sejalan dengan peningkatan jumlah objek wisata dan jumlah kunjungan pada tahun 2018. Objek wisata yang paling banyak dikunjungi adalah wisata bahari yaitu sebanyak 52.632 kunjungan sepanjang tahun 2018 dengan total kunjungan wisata sebanyak 79.812. Lebih lengkapnya rincian kunjungan di setiap obyek wisata dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.15

Kunjungan Wisata Menurut Obyek Wisata Kabupaten Natuna Tahun 2018



Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka Tahun 2019

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Hasil dari kegiatan pertambangan di Kabupaten Natuna meliputi minyak mentah dan gas bumi. Produksi minyak mentah tidak mengalami penurunan maupun peningkatan dengan nilai produksi yang sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar 4.773.443 barel. Walaupun tidak mengalami peningkatan nilai produksi tetapi terdapat kenaikan harga pertama dibandingkan tahun sebelumnya dengan kenaikan harga dari 49,49 US\$ menjadi 66,23 US\$. Akan tetapi, secara nilai pendapatan kotor terdapat peningkatan dari tahun 2017 sebesar 236.215.854 dolar menjadi 325.897.894 dolar, nilai ini merupakan nilai terbesar setelah tahun 2016 dan 2017.

Sama halnya dengan minyak mentah, gas bumi mengalami penurunan jumlah produksi sebesar 10 persen, namun harga rata-rata gas bumi meningkat menjadi



10.44 US\$. Nilai pendapatan kotor gas bumi juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 486.217.691 US\$.

Tabel 2.16

Jumlah Lifting Minyak Bumi dan Nilainya
Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018

Tahun	Lifting Minyak Bumi (Barel)	Harga rata-rata (US\$)	Nilai Pendapatan Kotor (US\$)
2014	8.127.455	97,93	795.934.037
2015	6.677.568	49,03	327.433.665
2016	5.652.721	39,04	220.704.454
2017	4.773.443	49,49	236.215.854
2018	4.773.443	66,23	325.897.894

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

Tabel 2.17

Jumlah Lifting Gas Bumi dan Nilainya
Kabupaten Natuna Tahun 2014-2018

Tahun	Lifting Gas Bumi (MMBTU)	Harga rata-rata (US\$)	Nilai Pendapatan Kotor (US\$)
2014	112.718.431	11,48	1.294.109.797
2015	88.839.649	7,49	665.397.203
2016	60.954.892	6,22	378.907.666
2017	52.291.612	8,27	432.690.008
2018	46.553.622	10,44	486.217.691

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

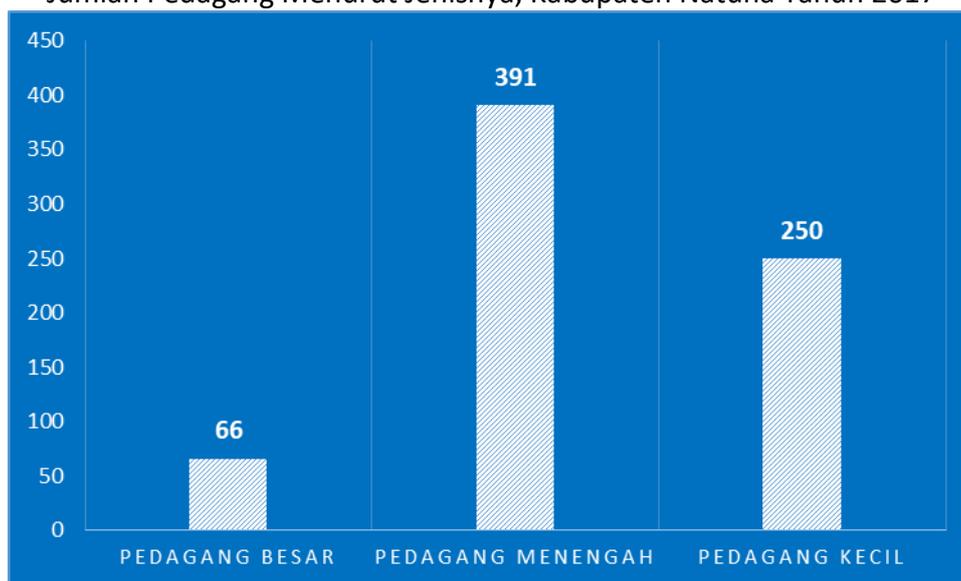
Rumah tangga merupakan salah satu pelanggan listrik yang konsumsinya paling besar. Dengan jumlah pelanggan listrik rumah tangga sebesar 18.235 dari 20.517 pelanggan listrik. Produksi listrik tertinggi berasal dari kecamatan Bunguran Timur dengan nilai produksi selama setahun yaitu sebesar 27.882.824 yang berasal dari PLTD Ranai, sedangkan untuk produksi terendah berasal dari PLTD Tanjung Kumbik dan PLTD Kelarik.

d. Perdagangan

Pada 2017, jumlah pedagang di Kabupaten Natuna didominasi oleh pedagang menengah yaitu sebanyak 391 pedagang. Sementara itu, menurut status tempat usaha, pedagang di Kabupaten Natuna didominasi oleh pedagang yang memiliki status tempat usaha yaitu milik sendiri.

Gambar 2.16

Jumlah Pedagang Menurut Jenisnya, Kabupaten Natuna Tahun 2017

*Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019*

e. Perindustrian

Geliat perekonomian sektor industri di Natuna tertutupi oleh tingginya peranan sektor pertambangan dan penggalian. Hanya sebesar 0,74 persen peranan sektor industri pengolahan dalam menggerakkan perekonomian di Natuna. Jika dikeluarkan sektor migas, maka kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB mencapai 2,70 persen.

Dari total nilai tambah sektor industri pengolahan, kontribusi terbesar pada sektor ini adalah Industri Makanan dan Minuman mencapai 32,91 persen di tahun 2018. Industri

Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya juga merupakan kategori yang kontribusinya cukup besar yaitu 19,55 persen dan industri Barang Galian bukan Logam sebesar 14,96 persen serta Industri Alat Angkutan sebesar 10,93 persen. Selebihnya memberikan kontribusi di bawah 10 persen.

2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Penunjang urusan pemerintah terdiri dari Perencanaan Pembangunan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan. Penunjang urusan pemerintah ini memberikan peluang kepada daerah untuk mempercepat



terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pemerintah kabupaten dan kota mempunyai kewenangan besar untuk mendorong proses kebijakan menjadi lebih partisipatif, responsif, dan akuntabel karena kendali dari proses kebijakan dan alokasi anggaran sepenuhnya ada di tangan pemerintah daerah. Untuk itu salah satu isu kebijakan umum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersifat *good governance*.

a. Perencanaan Pembangunan

Dalam fungsi perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan salah satu kinerja yang harus dilaksanakan. Dalam perjalanan pembangunan selama ini, dokumen perencanaan secara lengkap dan terintegrasi telah dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Natuna, seperti:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
2. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2006-2011; RPJMD periode 2011-2016; RPJMD periode 2016-2021; serta
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah di setiap tahunnya.

b. Penelitian dan Pengembangan

Tujuan yang akan dicapai Pemerintah dalam fungsinya sebagai fungsi Penelitian dan Pengembangan yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring/*network* dengan *stakeholder* lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum



optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah.

Dalam implementasinya, Penelitian yang telah dilaksanakan oleh bidang penelitian dan pengembangan Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2017 sebanyak 2 kajian/penelitian, yaitu Kajian Kawasan Cepat Tumbuh (KSCT) dan Kajian Pengembangan Wilayah

c. Keuangan

Dua kali berturut-turut laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2017 dan tahun 2018 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

d. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kurang optimalnya kinerja aparatur sipil Negara Kabupaten Natuna terhadap pelayanan masyarakat antara lain disebabkan karena belum optimalnya penerapan SOP pelayanan, belum meratanya persebaran pegawai di setiap Perangkat Daerah dari segi jumlah maupun kualitas, belum maksimalnya integrasi antara sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai, belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional, disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan, kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu ditingkatkan, masih belum mencukupinya jumlah pegawai dan kompetensi pegawai, tingkat pemahaman hukum masyarakat dan aparatur masih perlu ditingkatkan, masih adanya SOTK yang tumpang tindih dengan Perangkat Daerah lain.

Pada tahun 2018, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Natuna tercatat sebanyak 2.682 orang yang terdiri dari 1.537 pegawai laki-laki dan 1.145 orang pegawai perempuan. Sebagian besar PNS di Natuna memiliki tingkat pendidikan terakhir sarjana baik S1, S2, maupun S3.

Berdasarkan klasifikasi pegawai, jumlah PNS golongan I sebanyak 39 orang, golongan II berjumlah 791 orang, golongan III berjumlah 1.566 orang dan sisanya 286 orang pegawai golongan IV.



e. Sekretariat Dewan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna memiliki anggota sebanyak 20 orang, dengan 19 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Sebagian besar wakil rakyat pada lembaga ini memiliki pendidikan terakhir S1. Selama tahun 2018 DPRD Natuna melakukan 134 sidang.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tinjauan terhadap kemampuan ekonomi daerah bertujuan untuk mengetahui kualitas ekonomi suatu daerah yang dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Semakin tinggi pengeluaran perkapita maka semakin tinggi pula daya saing daerah tersebut.

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Dalam penghitungannya, pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Kemudian angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.



Secara umum, pengeluaran penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2018 dapat dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Porsi terbesar pengeluaran untuk makanan adalah dari kelompok makanan dan minuman jadi. Kemudian porsi terbesar selanjutnya adalah dari kelompok ikan, tembakau dan sirih dan padi-padian. Sedangkan porsi terkecil pengeluaran untuk makanan adalah dari kelompok umbi-umbian. Kemudian, jika dilihat dari pengeluaran untuk non makanan, porsi terbesar adalah dari kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan dan air, sedangkan porsi terkecil adalah dari kelompok keperluan pesta dan upacara.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Natuna meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air minum, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor daya tarik suatu daerah meningkatkan daya saing daerah.

a. Aksesibilitas Wilayah

Geografis Kabupaten Natuna terdiri dari 99,25 persen berupa lautan. Keadaan tersebut menempatkan angkutan laut menjadi sarana utama untuk menghubungkan suatu pulau dengan pulau lain, dari desa ke ibukota kecamatan dan dari kecamatan ke ibukota kabupaten. Sarana perhubungan di sektor angkutan laut terlihat semakin baik dengan bertambahnya frekuensi pelayaran untuk menghubungkan Pulau-pulau Natuna yang dilayani oleh Kapal penumpang milik PELNI yang secara teratur melayani rute tersebut dan juga Kapal Tol Laut untuk kapal barang.

b. Ketersediaan air minum

Distribusi air bersih di Kabupaten Natuna berjumlah sebesar 3.825.792 m³. lebih dari 67 persen air didistribusikan ke pelanggan di kecamatan Bunguran Timur, hal ini didukung dengan jumlah pelanggan yang ada di Bunguran Timur yang terdiri dari 6.024 pelanggan, dimana jumlah ini merupakan 83,50 persen dari total pelanggan yang ada di Kabupaten Natuna.

c. Fasilitas Listrik dan Telekomunikasi



Rumah tangga merupakan salah satu pelanggan listrik yang konsumsinya paling besar. Dengan jumlah pelanggan listrik rumah tangga sebesar 18.235 dari 20.517 pelanggan listrik. Produksi listrik tertinggi berasal dari kecamatan Bunguran Timur dengan nilai produksi selama setahun yaitu sebesar 27.882.824 yang berasal dari PLTD Ranai, sedangkan untuk produksi terendah berasal dari PLTD Tanjung Kumbik dan PLTD Kelarik.

Telekomunikasi sangat penting bagi masyarakat karena dapat mendukung kelancaran aktifitas mereka. Keberadaan jumlah tower (BTS) bisa menjadi salahsatu indikator ketersediaan layanan telekomunikasi yang semakin baik. Selama tahun 2017 tercatat terdapat 57 tower yang tersebar disemua kecamatan di Kabupaten Natuna. Meskipun seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Natuna sudah mendapatkan layanan telepon selular, namun hanya terdapat 16 desa/kelurahan yang sudah memperoleh layanan internet.

d. Perbankan dan Pegadaian

Di Kabupaten Natuna terdapat 11 bank yang terdiri dari 6 (enam) Bank Umum Pemerintah, 2 (dua) Bank Umum Swasta dan 1 (satu) Bank Pembangunan Daerah serta terdapat 2 (dua) unit pegadaian. Pada tahun 2018, realisasi produk Kredit Cepat Aktif (KCA) PT. Pegadaian Kabupaten Natuna memiliki kredit aktif sebesar 298 miliar rupiah dan omset sebesar 672 miliar rupiah dengan jumlah rekening sebanyak 70.052 rekening dan jumlah nasabah sebanyak 44.771 nasabah.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, situasi politik, keamanan hingga kemudahan perijinan dalam mendirikan maupun pengembangan usaha.

Suatu investor akan tertarik berinvestasi pada suatu daerah jika didukung dengan regulasi yang baik, regulasi tersebut diantaranya adalah adanya kemudahan perijinan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan tingkat biaya yang kompetitif. Kemudahan



perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi. Selain itu situasi yang kondusif bagi investasi juga perlu diperhatikan agar stabil.

a. Keamanan dan Ketertiban

Sepanjang tahun 2017 terdapat 34 kejadian kecelakaan di Kabupaten Natuna. Kejadian kecelakaan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Kejadian kecelakaan terjadi paling banyak pada bulan Agustus dan September. Jenis tindak kejahatan yang paling sering terjadi di Kabupaten Natuna selama tahun 2017 adalah pencurian biasa yaitu sebanyak 15 kali. Tindak kejahatan di Kabupaten Natuna paling sering terjadi pada rentang bulan Januari sampai dengan April, yaitu sebanyak 40 kali.

Selain itu, di Kabupaten Natuna selama dua tahun terakhir tidak pernah terjadi aksi demonstrasi. Namun bukan berarti aspirasi masyarakat tidak dapat tertampung.

b. Proses Perijinan

Proses perijinan di Kabupaten Natuna semakin hari semakin ditingkatkan kualitasnya dalam artian mempermudah perijinan dan menurunkan lama proses perijinan, khususnya dalam investor membuka usahanya. Lama proses perijinan di Natuna mencapai tiga hari. Sedangkan dari sisi peraturan perundangannya, terdapat 3 peraturan daerah yang mendukung iklim usaha di Natuna, sehingga investor memiliki kejelasan dalam menanamkan modalnya untuk kemajuan perekonomian Natuna.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Oleh karenanya, pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.



a. Rasio Ketergantungan

Menurut komposisi kependudukan, pada tahun 2018 penduduk Kabupaten Natuna didominasi oleh penduduk dari ketiga kelompok usia muda yaitu, 0-4 tahun sebesar 7.035 jiwa, 5-9 tahun sebesar 8.216 jiwa, dan 10-14 tahun sebesar 9.030 jiwa. *Dependency Ratio* atau biasa disebut Angka Ketergantungan Kabupaten Natuna pada tahun 2018 adalah 51,22 yaitu dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 51 sampai 52 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun).

b. Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

Sebagian besar tenaga kerja di Natuna hanya memiliki ijazah SD atau bahkan belum lulus/tidak bersekolah. Rendahnya capaian kualitas tenaga kerja ini masih sangat jauh dari harapan dimana sebanyak 14.368 tenaga kerja hanya lulusan SD atau belum tamat SD. Sedangkan tenaga kerja perguruan tinggi yang diasumsikan memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih baik hanya sebanyak 5.533 orang saja.

Tabel 2.18

Penduduk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kabupaten Natuna Tahun 2018

No	Jenjang Pendidikan	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja
1	<= SD Sederajat	14.368	501	14.869
2	SMP Sederajat	4.789	60	4.849
3	SMA Sederajat	9.688	611	10.299
4	Perguruan Tinggi	5.533	82	5.615
Jumlah		34.378	1.254	35.632

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019

2.5. ANALISIS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) didefinisikan sebagai berbagai "pendekatan analitis dan partisipatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana dan program dan mengevaluasi keterkaitan pertimbangan lingkungan dengan pertimbangan ekonomi dan sosial" (OECD, 2006). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Terlihat bagaimana KLHS memiliki peran strategis dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Kabupaten Natuna menyusun KLHS untuk meningkatkan kualitas perumusan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Adapun rincian indikator Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) pada setiap indikator KLHS Kabupaten Natuna sebagai berikut:

6.1 Indikator TPB dan Analisis yang Terkait Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

6.1.1 Indikator Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
Target: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
Nomor Indikator: 6.1.1.(c)
Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa ekosistem penyediaan air bersih. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH jasa ekosistem penyediaan air bersih memiliki tingkat penyediaan air bersih dengan kategori Rendah seluas 64.405,39 Ha (32,63%), Sedang 102.912,11 Ha (52,14%), Tinggi 30.044,74 Ha (15,22%). Secara umum DDLH penyediaan air bersih kurang mencukupi.

6.1.2 Indikator Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
Target: Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat



terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

Nomor Indikator: 6.2.1.(d)

Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH jasa ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah memiliki kategori Rendah seluas 112.432,95 Ha (56,97%), Sedang 36.622,40 Ha (18,56%), Tinggi 48.306,89 Ha (24,48%). Secara umum DDLH Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah tidak mencukupi.

6.1.3 Indikator Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

Nomor Indikator: 6.2.1.(f)

Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH jasa ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah memiliki kategori Rendah seluas 112.432,95 Ha (56,97%), Sedang 36.622,40 Ha (18,56%), Tinggi 48.306,89 Ha (24,48%). Secara umum DDLH Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah tidak mencukupi.

6.1.4 Indikator Jumlah yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

Nomor Indikator: 6.3.1.(a)

Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH jasa ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah memiliki kategori Rendah seluas 112.432,95 Ha (56,97%), Sedang 36.622,40 Ha (18,56%), Tinggi 48.306,89 Ha (24,48%). Secara umum DDLH Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah tidak mencukupi.

6.1.5 Indikator proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi,



menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

Nomor Indikator: 6.3.1.(b)

Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH jasa ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah memiliki kategori Rendah seluas 112.432,95 Ha (56,97%), Sedang 36.622,40 Ha (18,56%), Tinggi 48.306,89 Ha (24,48%). Secara umum DDLH Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah tidak mencukupi.

6.1.6 Indikator Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani

Tujuan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

Nomor Indikator: 11.6.1.(a)

Analisis DDDTLH: Indikator ini terkait dengan jasa ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH jasa ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah memiliki kategori Rendah seluas 112.432,95 Ha (56,97%), Sedang 36.622,40 Ha (18,56%), Tinggi 48.306,89 Ha (24,48%). Secara umum DDLH Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah tidak mencukupi.

6.2 Indikator TPB yang Tidak Terkait DDDTLH

Uraian umum indikator TPB yang tidak terkait DDDTLH dijelaskan dalam matriks di bawah:

6.2.1 Indikator Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Nomor Indikator: 1.3.1.(b)

6.2.2 Indikator Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Nomor Indikator: 1.3.1.(c)



6.2.3 Indikator Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Nomor Indikator: 1.3.1.(d)

6.2.4 Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

Nomor Indikator: 1.4.1.(h)

6.2.5 Indikator Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Nomor Indikator: 1.5.1.(d)

6.2.6 Indikator Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Nomor Indikator: 1.5.2.(a)

6.2.7 Indikator Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.

Tujuan: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Nomor Indikator: 2.2.1.*



6.2.8 Indikator Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe

Tujuan: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Nomor Indikator: 2.2.2*

6.2.9 Indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan

Tujuan: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Nomor Indikator: 2.2.2.(c)

6.2.10 Indikator Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target: Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kehamilan Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

Nomor Indikator: 3.2.2.(b)

6.2.11 Indikator Prevalensi penyalahgunaan narkoba

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target: Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

Nomor Indikator: 3.5.1.(e)

6.2.12 Indikator Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target: Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi



kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Nomor Indikator: 3.7.1.(b)

6.2.13 Indikator Unmet need pelayanan kesehatan

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target: Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

Nomor Indikator: 3.8.1.(a)

6.2.14 Indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator: 4.1.1.(a)

6.2.15 Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator: 4.1.1.(b)

6.2.16 Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator: 4.1.1.(e)

6.2.17 Indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator: 4.1.1.(g)



6.2.18 Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

Nomor Indikator: 4.2.2.(a)

6.2.19 Indikator Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan

Tujuan: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target: Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun

Nomor Indikator: 5.5.1.*

6.2.20 Indikator Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)

Tujuan: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target: Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.

Nomor Indikator: 5.6.1.(a)

6.2.21 Indikator Laju pertumbuhan PDRB per kapita

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

Nomor Indikator: 8.1.1*

6.2.22 Indikator Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Nomor Indikator: 8.3.1*



6.2.23 Indikator Persentase tenaga kerja formal

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Nomor Indikator: 8.3.1.(a)

6.2.24 Indikator Tingkat setengah pengangguran

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Nomor Indikator: 8.5.2.(a)

6.2.25 Indikator Jumlah wisatawan mancanegara

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

Nomor Indikator: 8.9.1.(a)

6.2.26 Indikator Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Pada tahun 2030 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Nomor Indikator: 8.9.1.(b)

6.2.27 Indikator Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

Tujuan: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi



Target: Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

Nomor Indikator: 9.2.1.(a)

6.2.28 Indikator Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan

Tujuan: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar Negara

Target: Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Nomor Indikator: 10.1.1.(b)

6.2.29 Indikator Jumlah desa tertinggal

Tujuan: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar Negara

Target: Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Nomor Indikator: 10.1.1.(c)

6.2.30 Indikator Jumlah Desa Mandiri

Tujuan: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar Negara

Target: Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Nomor Indikator: 10.1.1.(d)

6.2.31 Indikator Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan

Tujuan: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target: Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.

Nomor Indikator: 10.2.1.(b)

6.2.32 Indikator Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana

Tujuan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Nomor Indikator: 11.5.2.(a)



6.2.33 Indikator Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Tujuan: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Target: Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

Nomor Indikator: 16.7.1.(a)

6.2.34 Indikator Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya

Tujuan: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Target: Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Nomor Indikator: 17.1.1*

6.2.35 Indikator Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Tujuan: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Target: Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Nomor Indikator: 17.8.1.(b)

2.6. EVALUASI KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN NATUNA

Dalam merumuskan perencanaan sasaran, arah kebijakan, hingga program prioritas setiap tahapan pembangunan, khususnya rencana pembangunan jangka menengah, pemerintah daerah perlu melihat kembali capaian pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui evaluasi dan analisis terhadap pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah sebagai mana yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Selain itu, evaluasi setiap tahapan pembangunan akan menyelaraskan setiap program kegiatan ke arah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna serta menunjang pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah nasional.



Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui indikator-indikator mana saja yang telah tercapai, mana yang belum tercapai, apa saja kendala dan hambatannya, dan apa yang harus disempurnakan, dihapus/diganti agar pencapaian target pembangunan lebih optimal. Selain itu, evaluasi ini juga akan menghasilkan identifikasi permasalahan baru yang timbul dalam pembangunan, faktor-faktor efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat diantisipasi sejak dini dan dirumuskan respon yang sesuai dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan. Berikut capaian indikator pembangunan Kabupaten Natuna.



Tabel 2.19
Capaian Indikator Pembangunan
Kabupaten Natuna

No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1,1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (tanpa migas)	%	6,60	5,88	6,09	5,68	4,17
1,2	PDRB ADH berlaku per kapita	Juta Rp	54,86	59,46	65,15	70,92	75,41
1,3	PDRB ADH konstan per kapita	Juta Rp	44,57	46,49	48,81	50,97	52,55
1,4	Angka Kemiskinan	%	4,11	4,34	4,33	4,64	4,68
1,5	Indeks Gini	%	0,34	0,34	0,34	0,32	0,33
1,6	IPM	%	70,06	70,87	71,23	71,52	72,10
1,7	Pengeluaran Rata-rata perkapita	Ribu Rp.	13.414	13.612	13.834	13970	14,22
1,8	Pendapatan per Kapita	Juta Rp	54,86	59,50	65,21	70,92	75,41
1,9	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,01	1,42	1,02	1,20	0,94
II.	Kesejahteraan Sosial						
1	Pendidikan						
1.1.	Angka melek huruf	%	98,78	98,97	99,10	99,30	99,83
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,07	8,45	8,46	8,47	8,71
1,3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,84	13,85	13,86	13,87	13,88
2	Kesehatan						
2.1.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Bayi hidup	989	984	984	986	983
2.2.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	63,24	63,64	63,99	63,99	0
2.3.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,47	0,45	0,45	0,56	0,99
3	Ketenagakerjaan						
3,1	Persentase Penduduk yang Bekerja	%	92,34	89,46	89,46	68,63	96,48
III.	Seni Budaya dan Olahraga						
1	Kebudayaan						
1,1	Jumlah grup kesenian	Grup	93	93	93	93	93



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
1,2	Jumlah gedung kesenian	Gedung	1	1	1	4	7
2	Pemuda dan Olahraga						
2,1	Jumlah klub olahraga	Klub	100	188	188	141	141
2,2	Jumlah gedung olahraga	Gedung	0	0	1	1	2
Aspek Pelayanan Umum							
I.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1.1.	Pendidikan						
1.1.1.	Pendidikan dasar:						
	SD/MI						
1.1.1.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	99,00	99,22	99,22	98,62	97,08
1.1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	rasio	1 : 108	1 : 129	1 : 129	1:120	1:114
1.1.1.3.	Rasio guru terhadap murid	rasio	1 : 7	1 : 10	1 : 9	1 : 9	1 : 9
1.1.1.4	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	12,93	16,92	16,92	21,92	29,96
1.1.1.5	Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4	%	43,52	46,20	46,20	70,77	72,54
1.1.1.6	Persentase guru SD/SDLB bersertifikasi (%)	%	22,78	22,42	22,42	35,09	34,14
1.1.1.7	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	98,40	79,29	85	98,30	98,30
1.1.1.8	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	134,50	101,75	84	106,62	106,19
1.1.1.9	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,00	0,00	0	0,15	0,37
1.1.1.10	Angka Kelulusan SD/MI	%	100,00	100,00	100	100,00	100,00
	SMP/MTs						
1.1.1.11	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	99,36	70,94	70,94	97,41	97,41
1.1.1.12	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah		1 : 121	1 : 83	1 : 83	1:129	1:136
1.1.1.13	Rasio guru terhadap murid		1 : 10	1 : 11	1 : 11	1 : 20	1 : 20
1.1.1.14	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	17,69	15,75	15,75		58,8



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.1.1.15	Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4	%	68,91	71,74	71,74	81,95	59,21
1.1.1.16	Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat	%	16,74	18,70	18,70	21,78	22,59
1.1.1.17	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	101,14	104,22	81	95,48	96,20
1.1.1.18	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	70,02	70,94	84	89,80	89,80
1.1.1.19	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,00	0,00	0,00	0,46	0,15
1.1.1.20	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	99,89	100,00	100,00	100,00	99,00
1.2.	Kesehatan						
1.2.1	Cakupan Posyandu aktif	%	n.a	n.a	n.a	20,23	11,02
1.2.2	Cakupan puskesmas per kecamatan	%	n.a	n.a	n.a	86,67	93,33
1.2.4	Cakupan penduduk yang memanfaatkan RSUD	%	n.a	n.a	n.a	0	34,51
1.2.5	Cakupan puskesmas rawat inap yang memiliki minimal 2 dokter umum	%	n.a	n.a	n.a	66,67	80
1.2.6	Cakupan puskesmas non rawat inap yang memiliki minimal 1 dokter umum	%	n.a	n.a	n.a	80	100
1.2.7	Cakupan puskesmas non rawat inap yang memiliki minimal 5 perawat dan 4 bidan	%	n.a	n.a	n.a	100	100
1.2.8	Cakupan puskesmas rawat inap yang memiliki minimal 8 perawat dan 7 bidan	%	n.a	n.a	n.a	100	90
1.2.9	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	Puskesmas	n.a	n.a	n.a	6	6
1.2.10	Pemenuhan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang di RSUD	Dokter	n.a	n.a	n.a	11	11
1.2.11	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	n.a	n.a	n.a	32,7	42,54
1.2.12	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,76	16,21	16,21	14	12,97
1.2.13	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	126,58	67,52	67,52	311,04	152,56
1.2.14	Prevalensi Gizi Buruk pada Balita	%	0,47	0,20	0,20	0	0,99



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.2.15	Angka Kematian Anak balita (AKABA)	per 1000 Balita	12,03	0,63		3,89	0,76
1.2.16	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada balita	%	n.a	n.a	n.a	4,72	7,49
1.2.17	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)	%	n.a	n.a	n.a	12,1	7,2
1.2.18	Prevalensi Tuberkolosis (TB)	per 100.000 penduduk	n.a	n.a	n.a	0,13	0,94
1.2.19	Prevalensi HIV	%	n.a	n.a	n.a	0,01	0,01
1.2.20	Persentase kecamatan yang mencapai eliminasi malaria	%	n.a	n.a	n.a	0	100
1.2.21	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Kecamatan	n.a	n.a	n.a	6	10
1.2.22	Persentase kecamatan yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	%	n.a	n.a	n.a	77,63	60
1.2.23	Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan	%	n.a	n.a	n.a	0	100
1.2.24	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	n.a	n.a	n.a	100	100
1.2.25	Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	n.a	n.a	n.a	88,91	86,17
1.2.26	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	n.a	n.a	n.a	85,14	86,82
1.2.27	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	n.a	n.a	n.a	77,81	60,23
1.2.28	Pelayanan kesehatan balita	%	n.a	n.a	n.a	77,26	31,17
1.2.29	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	n.a	n.a	n.a	94,23	94,09
1.2.30	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	n.a	n.a	n.a	0	59,65
1.2.31	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	n.a	n.a	n.a	24,78	36,63
1.2.32	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	n.a	n.a	n.a	22,43	20
1.2.33	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes mellitus</i>	%	n.a	n.a	n.a	6,67	0,08
1.2.34	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	n.a	n.a	n.a	0	1000
1.2.35	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	%	n.a	n.a	n.a	0	94
1.2.36	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	n.a	n.a	n.a	100	100
1.2.37	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	%	n.a	n.a	n.a	18,27	22,04
1.2.38	Persentase Bayi Baru Lahir rendah (BBLR)	%	n.a	n.a	n.a	5,21	5,8
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.3.1	Panjang jalan dalam kondisi baik	km	323,6	576,86	480,58	441,86	441,86
1.3.2	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	n.a	n.a	46,25	56,72	56,72
1.3.3	Rasio Jaringan Irigasi		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
1.3.4	Panjang jalan dilalui Roda 4	km	890	1.017,11	1.039,19	1.039,19	1.039,19
1.3.5	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	km	851,00	809,72	n.a	n.a	n.a
1.3.6	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	km	589,70	275,023	172,23	126,05	274,87
1.3.7	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	km	0	0	0	0	0
1.3.8	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	0	0	0	0	0
1.3.9	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.10	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	2,99	2,99	1,4	1,7	2,65
1.3.11	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten	%	n.a	n.a	n.a	1,5	2,5
1.3.12	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	13,28	29,76	32,54	34,46	36,35
1.3.13	Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	%	n.a	15	15	15	20,47
1.3.14	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan		1 : 266	1 : 229	1 : 229		
1.3.15	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	n.a	n.a	n.a		
1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1.4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	rumah tangga	11.015	11.015	11.015	30.444	318.000
1.4.2	Rumah tangga pengguna listrik	rumah tangga	55,22	64,92	64,92	80,92	0
1.4.3	Rumah tangga ber-Sanitasi	rumah tangga	10.564	11.562	11.562	1.620	401.000



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.4.4	Lingkungan pemukiman kumuh	%	39,71	54,25	54,25	0.81	0
1.4.5	Rumah layak huni	%	96,24	96,31	96,31	85	88
1.4.6	Persentase kawasan kumuh	%	0,72	0,64	0,64	5.7	3
1.4.7	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		1:269	1 : 240	1 : 240	1:246	1:233
1.4.8	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	34.67	28,05	28,05	5	76
1.4.9	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		1 : 1228	1 : 1211	1 : 1211	1 : 237	0
1.4.10	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk		1 : 1,16	1 : 1,60	1 : 1,60	1 : 1,60	1 : 1,60
1.4.11	Rasio rumah layak huni		1 : 4	1 : 4	1 : 4	1 : 7,1	1:6,9
1.4.12	Rasio permukiman layak huni		1 : 1,04	1 : 1,04	1 : 1,04	1 : 406	0
1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						
1.5.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	kegiatan	2	2	2	2	2
1.5.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	2	2	2	4	2
1.5.3	Angka Kriminalitas	kasus	15,24	8,43	8,43	1:13,68	1:8,36
1.5.4	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	per 10.000 penduduk	255	220	220	240	243
1.5.5	Jumlah Linmas	per 10.000 Penduduk	n.a	316	316	325	325
1.5.6	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		35	35	35	4	3
1.5.7	Penegakan PERDA	Perda	20	25	25	6	35
1.5.8	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	75	65	65	70	70
1.5.9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten	%	80	75	75	80	85
1.5.10	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	%	n.a	0,50	0,5	58	58
1.5.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	55,00	54,17	54,17	0,004	0



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.5.12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	jam/kejadian	0,85	0,85	0,85	1	1
1.6.	Sosial						
1.6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Panti/rumah singgah	0	0	0	0	0
1.6.2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial :						
	- KUBE	KK	369	369	0	0	0
	- Gangguang Jiwa	orang	0	4	4	7	10
	- RTLH	KK	2.948	2.948	21	20	0
	- Lansia	orang	1.626	1.626	325	50	0
	- Cacat	orang	244	297	99	37	0
1.6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	53,01	53,59	20,22	20,10	18,94
1.6.4	Persentase lembaga sosial yang aktif	%			6,30		
II.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
2.1.	Ketenagakerjaan						
2.1.1	Angka partisipasi angkatan kerja		32.718	32.212	32.212	36.901	35,632
2.1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	41,15	65,00	65,00	71,55	67,48
2.1.3	Pencari kerja yang ditempatkan	orang	226	250	250	341	523
2.1.4	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,66	6,75	6,75	4,07	3,52
2.1.5	Keselamatan dan perlindungan	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2.1.6	Pesentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	%	n.a	n.a	n.a	83,87	71..43
2.1.7	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	n.a	n.a	n.a	0,19	n.a
2.1.8	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2.1.9	Persentase Pekerja /buruh yang menjadi peserta program	%				56,45	99,11



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
	Jamsostek						
2.1.10	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%				0,34	
2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	43,72	42,98	43,72	43,54	43,00
2.2.2	Persentase KDRT	%	0,12	0,019	0,020	0,043	
2.2.3	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100,00	100,00	100	100	100,00
2.2.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	n.a	43,01	44,00	55,65	55,65
2.2.5	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	n.a	83,85		75,87	
2.2.6	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah umur	%	n.a	0,08			
2.2.7	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD						
2.2.8	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP						
2.2.9	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA						
2.2.10	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi						
2.3.	Pangan						
2.3.1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Kalori/kapita/hari	60,86	77,95	78,2	83,30	84,97
2.3.2	Regulasi ketahanan pangan	regulasi	0	0	0	2	1
2.3.3	Ketersediaan pangan utama (kg/penduduk/thn)	kg/penduduk/ thn	83,75	109,46	104,78	100,86	77,25
2.4.	Pertanahan						
2.4.1	Luas lahan bersertifikat	ha	52.275,54	52.316,74		2.4	3,8
2.4.2	Rasio luas lahan bersertifikat					1 : 3	1 : 3
2.4.3	Penyelesaian kasus tanah negara	kasus	n.a	n.a		0	1
2.4.4	Penyelesaian izin lokasi	%	100,00	100,00		0	0



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
2.5.	Lingkungan Hidup						
2.5.1	Persentase penanganan sampah	%	34,97	34,97	n.a	30,29	41,63
2.5.2	Persentase Penduduk berakses air minum	%	10,72	38,39	n.a	40,85	67,00
2.5.3	Persentase Luas pemukiman yang tertata	%	n.a	55,00	n.a	60,92	60,00
2.5.4	Pencemaran status mutu air		30	35	60	60	100
2.5.5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	%	50	55	0	16,67	42,68
2.5.6	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	n.a	100	100	100	100
2.5.7	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
2.5.8	Penegakan hukum lingkungan	%	n.a	n.a	100	100	100
2.5.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	n.a	n.a	n.a	n.a	76,37
2.5.10	Indeks Pencemaran Udara	%	n.a	n.a	n.a	n.a	88,23
2.5.11	Indeks Pencemaran Air	%	n.a	n.a	n.a	n.a	54,00
2.5.12	Indeks Tutupan lahan	%	n.a	n.a	n.a	n.a	89,24
2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk		0,70	0,97	0,97	0,97	0,97
2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran		0,52	0,50	0,50	0,70	0,96
2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah		0,99	0,99	0,96	0,98	0,85
2.6.4	Kepemilikan KTP	%	39.583	88	97	88,12	98,00
2.6.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	667,57	80,62	90,01	90,32	75,00
2.6.6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	ada	Ada	ada	ada
2.6.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		sudah	sudah	Sudah	sudah	sudah
2,7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
2.7.1	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	lembaga	76	76		76	76
2.7.2	Jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	89	91		91	1026
2.7.3	Jumlah LSM	lembaga	24	9		15	69
2.7.4	LPM Berprestasi	%	0	0		4,29	4
2.7.5	PKK aktif	%	100	100		91	100
2.7.6	Posyandu aktif	%	100	100		100	100
2.7.7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	22,00	27,00		30	80
2.7.8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	68,00	81,67		95,79	96
2.7.9	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%				88,00	98,57
2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
2.8.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	1,10	1,10		1,2	2
2.8.2	Rasio akseptor KB		1:1,18	1:1,18		1 : 1,18	1:1,18
2.8.3	Cakupan peserta KB aktif	%	9.930	10.481 (86,10)		86,15	71,6
2.8.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera :	keluarga				1374	1105
	- Pra Sejahtera	keluarga	707	686		447	365
	- Sejahtera	keluarga	19.694	20.284		931	745
2.9.	Perhubungan						
2.9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (kapal laut) :					158575	166401
	- Naik	orang/tahun	87.673	89.372		84098	82939
	- Turun	orang/tahun	86.204	97.871		74477	83462
2.9.2	Rasio izin tryaek		1 : 24490	0		0	0
2.9.3	Jumlah uji KIR angkutan umum	unit/tahun	0	0		0	0



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
2.9.4	Jumlah pelabuhan laut/udara/ terminal bus :						
	- Terminal bus	terminal	1	0		0	0
	- Pelabuhan Laut	pelabuhan	75	84		90	92
	Jumlah Bandara	bandara	1	1		1	1
2.9.5	Jumlah Angkutan:						
	- Laut	unit	121	231		186	0
	- Udara	maskapai	2	2		3	3
	- Darat	unit	5			71	77
2.9.6	Angkutan Darat	%	0,12				
2.9.7	Kepemilikan KIR angkutan umum	%					
2.9.8	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR	hari					
2.9.9	Biaya Pengujian kelayakan angkutan umum	Rp.					
2.9.10	Pemasangan Rambu-rambu:						
	- Laut	unit	107	95			
	- Darat	unit	188	138			
2.10.	Komunikasi dan Informatika						
2.10.1	Jumlah jaringan komunikasi	jaringan	56	57		68	79
2.10.2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk		8	6		3	1
2.10.3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	jenis	58	54		59	59
2.10.4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	jenis	7	9		9	2
2.10.5	Web site milik pemerintah daerah	web	15	16		18	29
2.10.6	Sistim Informasi Manajemen Pemda	sistem				75	65
2.10.7	Pameran/Expo	kali	7	7			
2.10.8	Sistem informasi Pelayanan Perijinan					Ada	Ada
2.11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
2.11.1	Persentase koperasi aktif	%	26,88	27,33		37,41	55,56
2.11.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	unit	1.019	1.063		1066	1066
2.11.3	Jumlah BPR/LKM	unit	1/5	1/5		1/5	0
2.11.4	Usaha Mikro dan Kecil	unit	4.474	4.477		1994	2020
2.12.	Penanaman Modal						
2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	93	66	25	41	53
2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta Rp.	113.036,102	370.243,053	71.624,680	132.956,092	200.315,414
2.12.3	Rasio daya serap tenaga kerja		n.a	n.a	1 : 5	1 : 0,9	1 : 11
2.12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	-41,22	227,54	-80,65	76,81	6,35
2.13.	Kepemudaan dan Olahraga						
2.13.1	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	60	183	183	185	188
2.13.2	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	60	71	71	73	76
2.13.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	7	8	8	9	11
2.13.4	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	n.a	10	10	14	20
2.13.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Unit	0	0	0	1	2
2.13.6	Lapangan olahraga	Unit	n.a	201	201	204	207
2.13.7	Jumlah prestasi olahraga	prestasi				16	16
2.13.8	Jumlah atlet berprestasi	Atlet				512	562
2.14.	Statistik						
2.14.1	Jumlah Sistim data dan statistik yang terintegrasi	Sistim	0	0	0	0	1
2.14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Ada
2.14.3	Buku "PDRB kabupaten"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Ada



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
2.15.	Persandian						
2.15.1	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD	PD	1	1	1	1	1
2.16.	Kebudayaan						
2.16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	event	2	2	0	1	1
2.16.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	1	1	0	2	2
2.16.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	n.a	10.855	10.855	11.150	11.655
2.16.4	Jumlah jenis budaya yang dikembangkan	Jenis	73	75	78	83	88
2.17.	Perpustakaan						
2.17.1	Jumlah perpustakaan	Unit	0	7	7	7	
2.17.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	13.734	13.750	25.848	40.151	
2.17.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah :						
	- Judul	judul	8.437	8.481	668	709	
	- Eksemplar	Exp	81.077	85.152	1.124	1681	
2.17.4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang			3	3	
2.17.5	Jumlah sekolah/tempat yang disinggahi perpustakaan keliling	sekolah			236	0	
2,18	Kearsipan						
2.18.1	Jumlah tenaga kearsipan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	0	0	0	4	0
2.18.2	Jumlah pengelola arsip kecamatan/ desa yang mendapat pembinaan	orang	0	73	0	0	0
2.18.3	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	%	0	2,17	2,17	0,84	0



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
III.	Urusan Pilihan						
3.1.	Kelautan dan Perikanan						
3.1.1	Produksi perikanan budidaya	ton	733,69	754,82	16.202,17	2.746,53	469,66
3.1.2	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	47.341,58	48.698,05	65.180,34	86.141,74	87.248,26
3.1.3	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	kg	4.723.390	6.900.000	5.439.125	6.974.779	7.114.149
3.1.4	Volume produk olahan hasil perikanan	ton	71,15	90,07	92,69	113,55	119,86
3.1.5	Produksi benih ikan	ekor	37.500	52.500	51.500	60.000	72.000
3.1.6	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	80	101	23	96	150
3.1.7	Nilai Tukar Nelayan	%	101	103	100	110	113,5
3.2.	Pariwisata						
3.2.1	Kunjungan wisatawan mancanegara	orang	325	340	426	538	254
3.2.2	Kunjungan wisatawan nusantara	orang	9.044	9.973	9.412	18.615	22.676
3.2.3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	17,45	0,81	0,81	0,47	0,48
3.2.4	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan mancanegara	hari	3	3	3	3	3
3.2.5	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan nusantara	hari	3	3	3	2	3
3.2.6	Jumlah Obyek Wisata Unggulan	obyek	1	1	1	1	1
3.2.7	Pengeluaran Wisatawan mancanegara	Rp (ribuan)	1.025.700	1.073.040	1.344.456	1.375.128	762.000
3.2.8	Pengeluaran Wisatawan nusantara	Rp (ribuan)	18.992.400	20.943.300	19.765.200	26.061.000	55.782.960



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
3.3.	Pertanian						
3.3.1	Produksi tanaman pangan						
	Padi sawah	ton/ha	421,35	300,00		232	301,4
3.3.2	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB (dengan migas)	%	2,56	10,30		2,5	2.50
3.3.3	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	0,03	0,03		0,008	0,008
3.3.4	Kontribusi sektor perkebunan tahunan terhadap PDRB	%	2,14	2,25		0,5	0,5
3.3.5	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	2,86	0,50		0,1	0,1
3.3.6	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	2,86	1,60		0,42	0,42
3.3.7	Cakupan bina kelompok petani	%	10	7		7,8	7,8
3.3.8	Peningkatan produktifitas perkebunan dari potensi produksi lapangan	%	95	100		1	1
3.3.9	Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas	%	95	100		1	1
3.3.10	Peningkatan pendapatan petani kebun (capaian rata-rata)	Juta/KK/ Tahun	700-1000	700-1000		900-1200	900-1200
3.3.11	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (Jumlah tenaga kerja baru/tahun)	orang	68	70		0	0
3.3.12	Peningkatan pertumbuhan sub sektor perkebunan	%	3,30	1,84		0,4	0,4
3.4.	Kehutanan						
3.4.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	ha	720	750	n.a	n.a	n.a
3.4.2	Kerusakan Kawasan Hutan	ha	196.076	196.076	n.a	n.a	n.a
3.6.	Perdagangan						



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
3.6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	11,22	16,54	n.a	11,68	55,56
3.6.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	kelompok	1	5	n.a	3	1066
3.6.3	Ekspor bersih perdagangan	Rp (ribuan)	n.a	15.229.000	n.a	21.260.163	
3.7.	Perindustrian						
3.7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	0,71	0,86	n.a	0,86	0,86
3.7.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	0,69	0,76	n.a	0,76	3
3.7.3	Pertumbuhan Industri	%	4,97	4,53	n.a	4,8	21394713
3.7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	61,00	77,50	n.a	85	0
3,8	Transmigrasi						
3.8.1	Jumlah Kawasan	KP	0	0	1	1	1
3.8.2	Jumlah Transmigrasi	KK	0	0	0	0	0
IV.	Penunjang Urusan Pemerintahan						
4.1.	Perencanaan Pembangunan						
4.1.1	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	ada	ada	Ada	Ada	Ada
4.1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak	ada	ada	Ada	Ada	Ada
4.1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	ada	ada	Ada	Ada	Ada
4.1.4	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	%	90,00	89,29	89,00	100,00	89,14



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
4.2.	Keuangan						
4.2.1	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)	Predikat	C	C	CC	BB	BB
4.2.2	Opini audit BPK		WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
4.2.3	Persentase LHP yang ditindaklanjuti	%	93,75	84,71	100	86	
4.2.4	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah	%	100	100	100	100	100
4.2.5	Jumlah Objek Pajak	OP	149	548	548	329	n.a
4.2.6	Persentase PAD terhadap penerimaan daerah	%					5,4
4.2.7	Persentase Peningkatan PAD	%					
4.3.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
4.3.1	Jumlah Tenaga Pemeriksa dan aparat pengawasan yang memiliki sertifikasi	orang	5	15	n.a	19	21
4.3.2	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	79,10	79,17	n.a	37	65
4.3.3	Rata-rata kehadiran aparatur per tahun	%				65	72
4.4.	Penelitian dan Pengembangan						
4.4.1	Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	penelitian	0	0	2	2	0
Aspek Daya Saing Daerah							
I.	Kemampuan Ekonomi Daerah						
1	Pangan						
1,1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp.	1.117.833	1.127.241	1.194.479	1.239.243	1.178.931
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rp.	558.218	528.791	593.479	575.598	606.152
1.3.	Produktivitas total daerah		6.20	5.98	1	1	1



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
2	Pertanian						
2.1	Nilai Tukar Petani		95,91	85,00	100	97,54	n.a
II.	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
1	Perhubungan						
1,1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		30.945	36.000	n.a	1:36	1:37
1.2.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang/	273.183	228.469	n.a	0:00	0:00
		Ton	201.931,60	96.350,65	n.a	0:00	0:00
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang/	237.638	228.469	n.a	n.a	237.649,00
		Ton	201.931,60	96.350,65	n.a	n.a	875.622,00
2	Penataan Ruang						
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW	%	n.a	65,00	n.a	69,21	79,84
2.2.	Luas wilayah produktif	%	18,71	18.15	n.a	n.a	n.a
2.3.	Luas wilayah industry	%	0,00	0,00	n.a	n.a	n.a
2.4.	Luas wilayah banjir	%	n.a	0,50	n.a	n.a	n.a
2.5.	Luas wilayah kekeringan	%	n.a	0,024	n.a	n.a	n.a
2.6.	Luas wilayah perkotaan	%	n.a	n.a	n.a	4,33	4,73
3	Keuangan						
3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang		8	7	9	9	9
3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang		2	4	4	4	4
3.3.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran		76	57	57	59	60
3.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel		42	44	44	41	46
4	Lingkungan Hidup						
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih		52,05	57,08	60,21	60,43	74,42



No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
4	Komunikasi dan Informatika						
5.1.	Rasio elektrifikasi						
5.2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik						
5.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon					81,75	84,82
III.	Iklm Berinvestasi						
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						
1.1.	Angka kriminalitas		15,24	8,43	n.a	1 : 13,68	1:8,36
1.2.	Jumlah demo		1	0	n.a	0	0
2	Penanaman Modal						
2.1.	Lama proses perijinan	(hari)	4	3	4	2,47	2,60
2.2.	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Perda	8	8	8	10	10
3	Keuangan						
3.1.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	(jenis)	16	16	n.a	16	100
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
4.1.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	(%)	n.a	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Sumber Daya Manusia						
1	Ketenagakerjaan						
1,1	Rasio lulusan S1/S2/S3		1 : 385	1 : 462	n.a	1:393	n.a
1.2.	Rasio ketergantungan		67,63	57,00	n.a	59,23	n.a



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Sejak berdirinya Kabupaten Natuna menjadi daerah otonomi tingkat II berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 1999, maka secara mandiri Kabupaten Natuna memulai perjalanan dalam membangun wilayahnya. Dalam pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 20 tahun ini tentu saja ada berbagai permasalahan yang mengiringi pembangunan dalam berbagai aspek dan kondisi. Pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan berupaya secara optimal mengimplementasikan setiap rumusan perencanaan pembangunan yang telah disusun. Namun tidak dapat dipungkiri jika dalam pelaksanaannya, hadir berbagai permasalahan pembangunan yang harus segera dicarikan solusi inovatifnya. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya hadir dikarenakan adanya kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal ataupun kelemahan yang tidak diantisipasi dan diatasi sedini mungkin sehingga menjadi permasalahan yang harus diselesaikan melalui berbagai *treatment* dari pengambil kebijakan.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan periode selanjutnya, maka perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu poin penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan. Ketepatan dalam menetapkan poin-poin permasalahan akan menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang, termasuk di dalamnya arah kebijakan hingga sasaran pokok pembangunan.

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, selain memerhatikan berbagai permasalahan yang ada, juga harus pula memerhatikan berbagai isu strategis pembangunan. Identifikasi isu-isu strategis jika dipetakan dengan tepat dan relevan maka akan memberikan panduan tentang bagaimana kondisi daerah selama periode pembangunan. Selain itu, dengan melakukan proses identifikasi isu-isu strategis, otomatis



juga akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan daerah yang tidak memerhatikan isu-isu strategis, baik skala internasional, nasional, maupun regional, akan kehilangan fokus dan prioritas dalam menentukan arah pembangunan.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Natuna hingga saat ini, terdapat “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dengan kondisi riil saat perencanaan dirumuskan. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya permasalahan pembangunan yang memberikan dampak signifikan pada hasil realisasi program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, untuk memperkecil kesenjangan atau bahkan menghilangkannya, berbagai permasalahan pembangunan harus segera diselesaikan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan rumusan masalah yang memiliki dampak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, baik itu berupa hambatan maupun tantangan yang harus diselesaikan dengan tetap memerhatikan sumber daya dan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna. Perumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Natuna dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan Natuna di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya bersama dengan pengembangan seluruh potensi yang dimiliki. Berdasarkan hasil analisis data dan informasi pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan serta kesepakatan dari pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna adalah “Belum optimalnya kualitas dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Natuna”.

Dari permasalahan utama tersebut, maka diidentifikasi 5 (lima) permasalahan pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna, sebagai berikut:

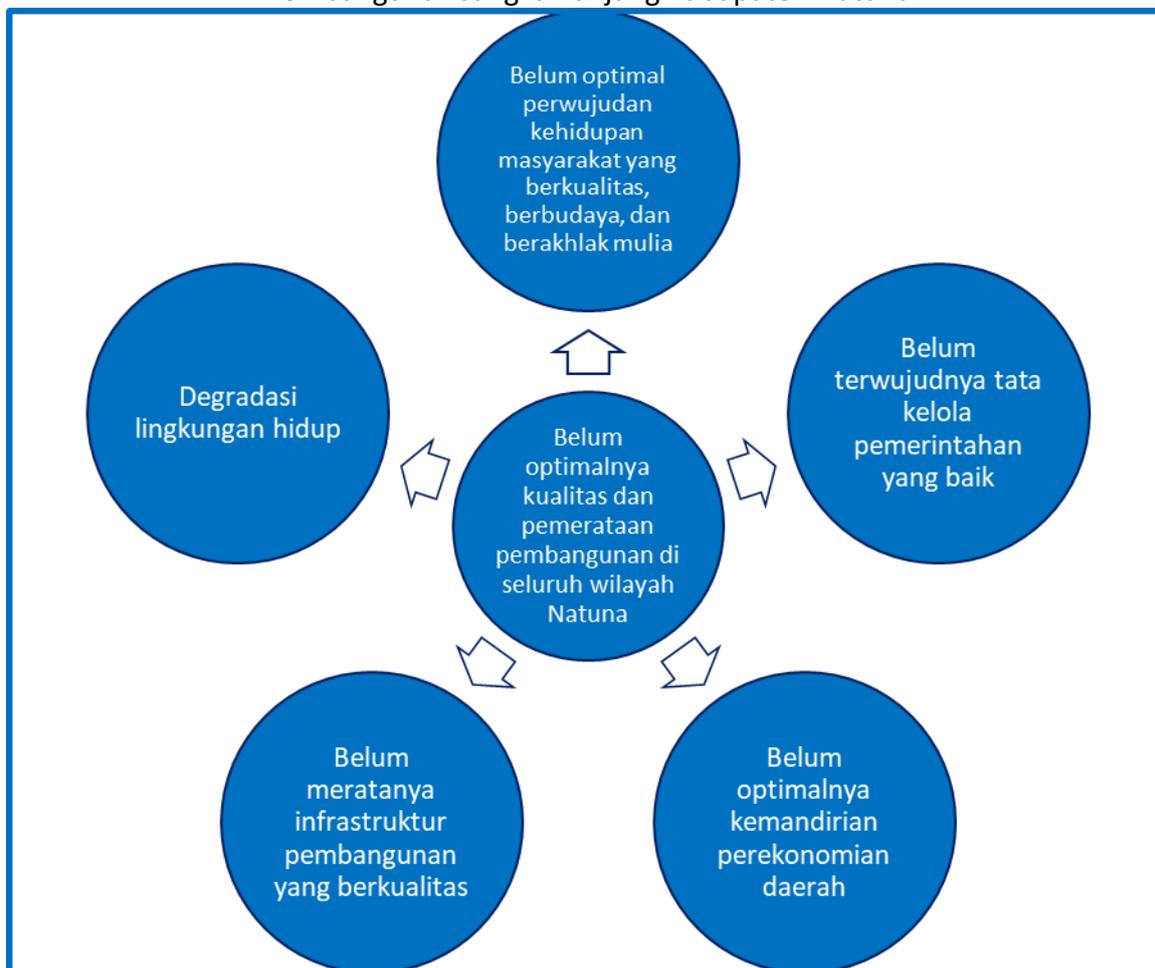
1. Belum optimal perwujudan kehidupan masyarakat yang berkualitas, berbudaya, dan berakhlak mulia;
2. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Belum optimalnya kemandirian perekonomian daerah;

4. Belum meratanya infrastruktur pembangunan yang berkualitas; dan
5. Degradasi lingkungan hidup.

Berikut keterkaitan permasalahan utama dan permasalahan pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna:

Gambar 3.1

Keterkaitan Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna



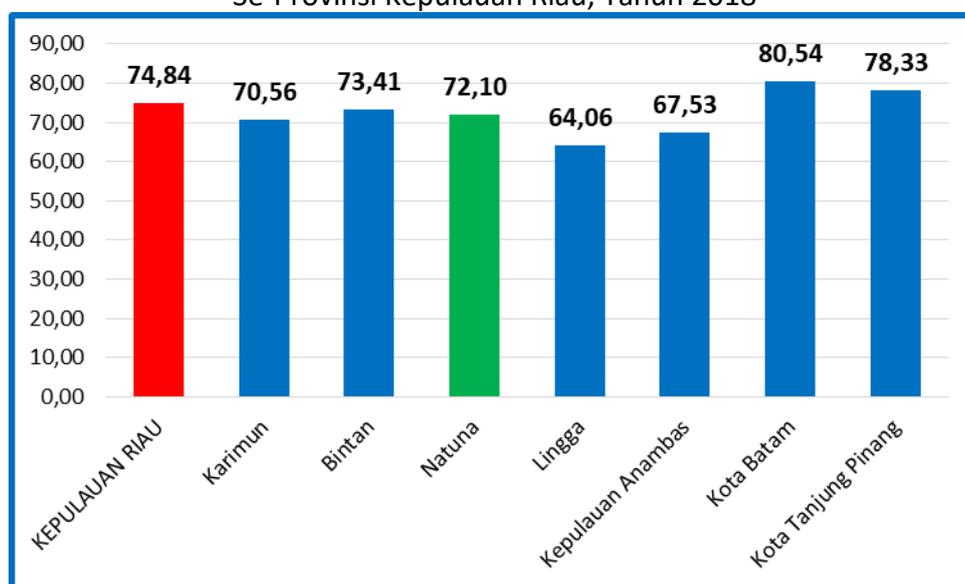
Untuk mengetahui secara detail bagaimana dampak permasalahan danantisipasi serta penyelesaiannya, perlu adanya penjabaran dari masalah pokok menjadi masalah dan akar masalah pembangunan daerah. Berikut penjabaran masalah dan akar masalah di setiap permasalahan pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna.

1. Belum optimal perwujudan kehidupan masyarakat yang berkualitas, berbudaya, dan berakhlak mulia

Sumber daya manusia merupakan inti dari pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dari permasalahan pokok tersebut diturunkan suatu permasalahan pembangunan jangka panjang yakni “Rendahnya kualitas dan daya saing SDM”. Permasalahan kualitas dan daya saing SDM ini lebih diarahkan kepada permasalahan pendidikan, kesehatan maupun kapasitas tenaga kerja. Hal ini menjadi perhatian mengingat kesejahteraan masyarakat sangat tergantung dari tiga poin tersebut.

Dalam mewujudkan pembangunan secara menyeluruh, kualitas SDM menjadi prioritas utama untuk membantu percepatan realisasi visi pembangunan daerah. Tak terkecuali Natuna, jumlah penduduk yang mencapai 76.968 jiwa pada tahun 2018 merupakan potensi yang harus dioptimalkan demi perwujudan Natuna yang lebih baik. Namun pada kenyataannya, masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan masyarakat madani.

Gambar 3.2
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018



Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2019

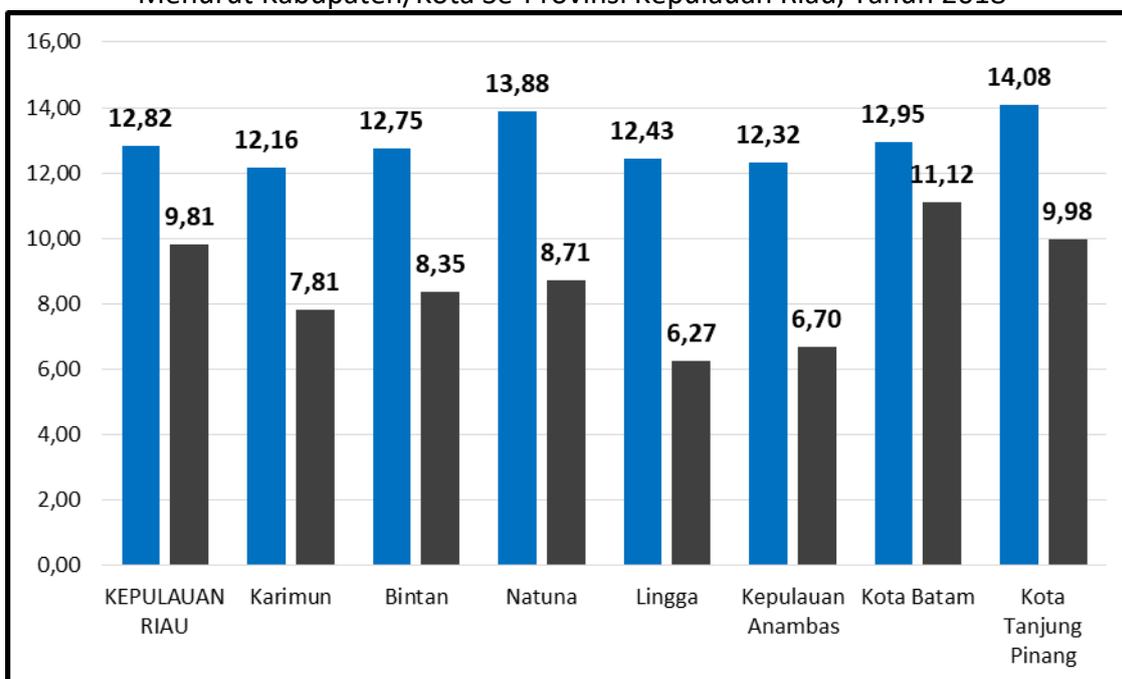
Pembangunan kualitas sumber daya manusia di Natuna masih belum maksimal yang terlihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah rata-rata

provinsi Kepulauan Riau. IPM Natuna yang mencapai 72,10, berada pada urutan keempat dari tujuh kabupaten/kota dan berada di bawah angka provinsi yang mencapai 74,84. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah agar segera merumuskan berbagai program prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kebijakan strategis yang mendukung tercapainya daya saing masyarakat Natuna.

Pemerataan pembangunan di segala bidang memang menjadi harapan utama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kehidupan masyarakat, khususnya pada pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pada pemenuhan pemerataan fasilitas pendidikan, Kabupaten Natuna masih berupaya merumuskan berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam hal peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Berbagai kendala, khususnya kendala geografis, menjadi hambatan dalam pemerataan berbagai program pembangunan daerah. Kendala ini tentu saja hanya salah satu dari sekian permasalahan lain dimana terlihat dampaknya pada masih rendahnya rata-rata lama sekolah Natuna yang hanya mencapai 8,71 tahun. Angka yang masih berada cukup jauh dari rata-rata lama sekolah di Kepulauan Riau (9,81 tahun) ini menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas program pemerataan pendidikan Natuna.

Gambar 3.3

Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018

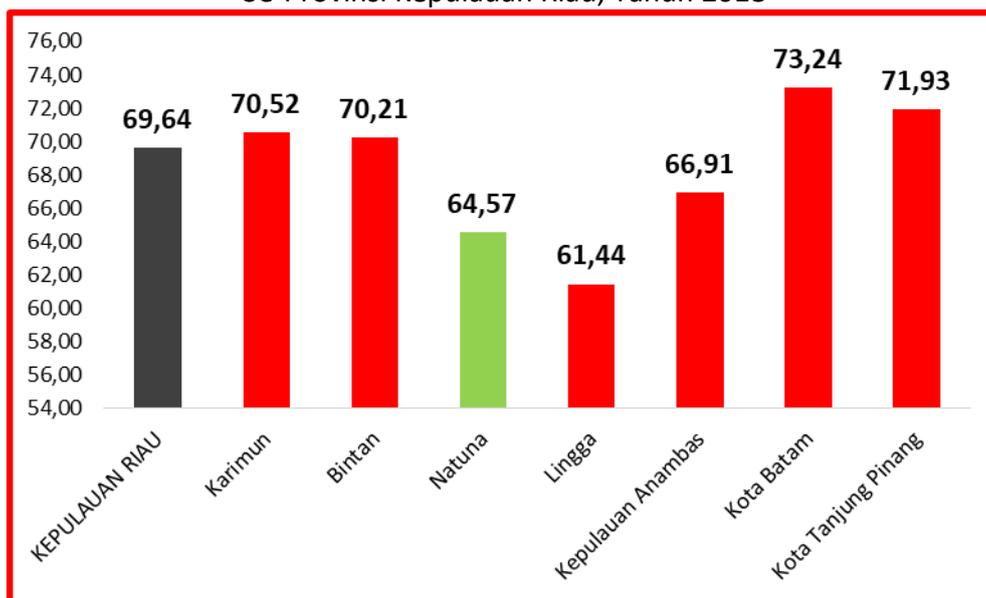


Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2019

Meskipun begitu, harapan lama sekolah di Natuna cukup bagus. Hal ini mengindikasikan ada titik cerah dalam peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Secara umum, beberapa permasalahan yang mengiringi perjalanan pembangunan pendidikan di Natuna seperti kualifikasi guru dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan terutama di kawasan terpencil/terluar, hingga sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Adapun dalam bidang kesehatan, sangat terlihat betapa minimnya pelayanan kesehatan berkualitas di Natuna yang terlihat dari rendahnya angka harapan hidup Natuna yang mencapai 64,57 tahun. Angka ini mengindikasikan bayi yang baru lahir akan memiliki harapan hidup hingga berumur 64-65 tahun. Angka ini berada pada peringkat 6 dari 7 kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Beberapa poin penting dalam peningkatan layanan kesehatan seperti pemerataan sarana prasarana dan tenaga medis hingga ke wilayah pedalaman/terluar, dan peningkatan kualifikasi tenaga medis menjadi fokus utama dalam pengentasan masalah derajat kesehatan di Natuna.

Gambar 3.4
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018

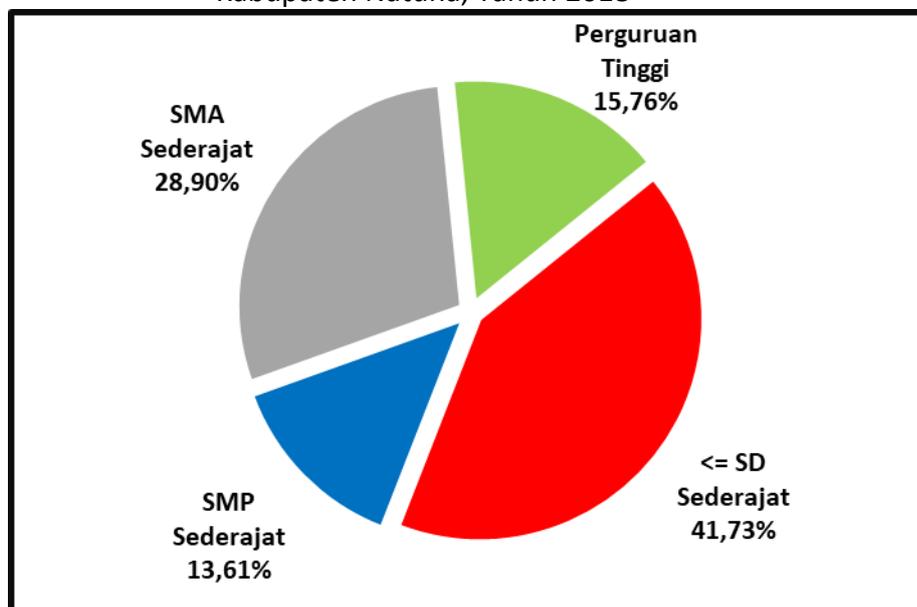


Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2019

Rendahnya kompetensi angkatan kerja merupakan permasalahan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia siap kerja. Hal ini tentu saja berdampak pada kapasitas dan kualifikasi tenaga kerja. Sebagian besar angkatan kerja di Natuna merupakan penduduk dengan lulusan SD ke bawah atau bahkan tidak pernah mengenyam bangku

sekolah. Hal ini tentu saja cukup miris karena diindikasikan pekerja yang tidak memiliki keterampilan/kompetensi tidak mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak.

Gambar 3.5
Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
Kabupaten Natuna, Tahun 2018



Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2019

2. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Pemerintahan merupakan organisasi penggerak pelaksanaan pembangunan daerah yang merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan publik untuk mewujudkan visi daerah. Tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai subyek pelaksana pembangunan daerah di Kabupaten Natuna sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencapaian target-target pembangunan. Masih belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi untuk perwujudan *good governance*, maka dirumuskan permasalahan pembangunan jangka panjang “Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi”.

Seyogyanya, dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Natuna harus memiliki tata kelola pemerintah yang baik, efektif, dan efisien sebagai *core business* dalam mengimplementasikan pembangunan daerah. Sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus diperhatikan untuk mencapai *good governance*, yakni *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Namun pada kenyataannya, terdapat *gap* antara perencanaan dengan realisasi kinerja selama ini.



Kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pembangunannya masih belum optimal. Keterbatasan ASN yang berkualitas serta manajemen pemerintahan yang belum maksimal menjadikan pemerintah daerah harus membenahi diri untuk menjadi lebih baik. Permasalahan belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi tersebut dapat terlihat dari Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) yang memiliki status “cukup”. Meskipun begitu, opini BPK pada tahun 2018 mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) setelah beberapa tahun terakhir berstatus WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Dari sisi keuangan daerah, maka persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dapat ditingkatkan. Pada tahun terakhir (2018), persentase PAD terhadap penerimaan daerah mencapai 25,64 persen.

3. Belum optimalnya kemandirian perekonomian daerah

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sangat disadari oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Natuna dimana *concern* yang cukup tinggi ditujukan pada peningkatan pergerakan perekonomian daerah, khususnya perekonomian kerakyatan. Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir perekonomian Kabupaten Natuna mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai pertumbuhan ekonomi 0,87 persen pada tahun 2017. Oleh karena itu, permasalahan pokok tersebut diturunkan menjadi suatu permasalahan pembangunan jangka panjang “Belum maksimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan” dengan perhatian kepada pengentasan kemiskinan, rendahnya pengembangan sektor unggulan dan taraf hidup masyarakat.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Natuna ini sebagian besar disebabkan adanya gejolak perekonomian internasional yang merambah pada perubahan harga barang pertambangan dan penggalian seperti minyak bumi, gas, maupun batubara. Sebagai wilayah yang struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, Natuna terkena dampak dari menurunnya performa perekonomian global. Tentu saja pemerintah berupaya untuk menahan laju perlambatan tersebut, dan sebelum mencapai pertumbuhan negatif, perekonomian Natuna sudah mulai pulih seperti sedia kala.



Jika diperbandingkan dengan wilayah lain di Kepulauan Riau, pertumbuhan ekonomi Natuna tergolong rendah dimana pada tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi berada di peringkat ke 6 dari 7 wilayah Kepulauan Riau. Dan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Natuna berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2015-2018

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
Kabupaten				
1. Karimun	6,54	6,17	5,33	5,02
2. Bintan	5,16	5,05	4,94	4,85
3. Natuna	3,90	3,00	0,87	2,44
4. Lingga	2,38	4,09	6,08	4,00
5. Kepulauan Anambas	3,03	2,90	(0,10)	(8,21)
Kota				
1. Batam	6,87	5,43	2,19	4,72
2. Tanjungpinang	5,70	5,01	2,66	3,21
KEPULAUAN RIAU	6,02	4,98	2,00	4,56

Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2019

Kondisi Natuna masih belum dioptimalkan dalam upaya menarik investor untuk menanamkan modalnya guna menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah investor yang masuk ke Natuna baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2018, hanya 6 proyek penanaman modal asing yang terealisasi dan 30 proyek penanaman modal dalam negeri yang terealisasi. Nilai investasi yang ditanamkan dari keseluruhan proyek tersebut juga masih berada jauh di bawah kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau, dimana pada penanaman modal asing memiliki nilai investasi US\$ 3.406.100 dan penanaman modal dalam negeri memiliki total nilai investasi sebesar 18.758 juta rupiah.

Tabel 3.2
Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri Menurut Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Penanaman Modal Asing		Penanaman Modal Dalam Negeri	
	Nilai Investasi (000 US\$)	Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)	Proyek
Kabupaten				
1. Karimun	10.798,30	15	109.269,30	81
2. Bintan	243.938,40	170	1.030.980,70	25
3. Natuna	3.406,10	6	18.758,00	30



Kabupaten/Kota	Penanaman Modal Asing		Penanaman Modal Dalam Negeri	
	Nilai Investasi (000 US\$)	Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)	Proyek
4. Lingga	272,60	1	-	3
5. Kepulauan Anambas	707,60	5	-	0
Kota				
1. Batam	572.118,70	601	3.181.499,00	145
2. Tanjungpinang	6,60	6	45.473,80	35
KEPULAUAN RIAU	831.248,30	804	4.385.980,80	319

Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2019

Angka kemiskinan Natuna jika dibandingkan dengan wilayah lain di Kepulauan Riau termasuk yang paling rendah capaiannya. Namun jika dilihat secara *series*, maka terlihat bahwa angka kemiskinan baik dari segi jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskinnya mengalami kenaikan secara bertahap dan kontinyu. Angka kemiskinan terakhir (2018) mencapai 4,68 persen, padahal pada tahun 2014 sebesar 4,11 persen. Begitu pula dengan jumlah penduduk miskin yang meningkat dari 3,05 ribu jiwa menjadi 3,60 ribu jiwa dalam waktu 5 tahun. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah agar segera melakukan upaya-upaya strategis dalam menurunkan angka kemiskinan. Sinkronisasi antara program pengentasan kemiskinan nasional dan daerah harus padu dan sejalan sehingga dalam mengentaskan kemiskinan dapat relevan dan tepat sasaran.

Tabel 3.3
Angka Kemiskinan Kabupaten Natuna, Tahun 2014-2018

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2014	267.150	3,05	4,11
2015	276.828	3,23	4,34
2016	302.043	3,25	4,33
2017	332.248	3,53	4,64
2018	362.519	3,60	4,68

Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2019

4. Belum meratanya infrastruktur pembangunan yang berkualitas

Pembangunan daerah yang memiliki tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata mengindikasikan adanya pelayanan kepada setiap penduduk dalam menjalani kesehariannya. Hal tersebut menjadi suatu “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Kabupaten Natuna mengingat masih belum optimalnya pelayanan baik langsung



maupun tidak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan pokok tersebut diturunkan menjadi permasalahan pembangunan jangka panjang “Minimnya pemerataan dan integrasi jaringan infrastruktur dasar” untuk menjadi perhatian bagi pemerintah daerah maupun pusat terkait berbagai kendala yang dialami masyarakat dalam kesehariannya.

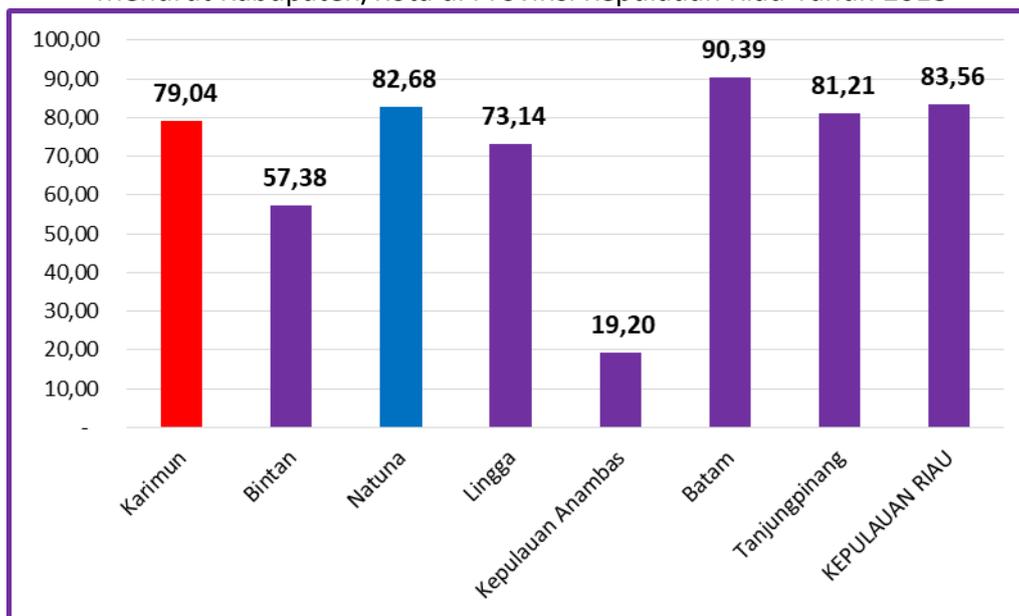
Kendala pembangunan Natuna yang menjadi sorotan pada setiap periode pembangunan adalah terkait aksesibilitas wilayah baik di dalam Natuna maupun aksesibilitas keluar daerah. Masih minimnya konektivitas dalam wilayah Natuna menjadikan distribusi barang maupun orang masih belum optimal. Hal ini tentu saja berdampak pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya. Selain itu, aksesibilitas keluar daerah baik transportasi udara maupun laut masih belum optimal baik dikarenakan pengelolaan internalnya atau permasalahan kondisi geografis.

Salah satu tugas pokok aparatur pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti: pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan hingga pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, ada pula kinerja pelayanan aparatur pemerintah yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat namun berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, antara lain: kinerja dalam perencanaan pembangunan, administrasi keuangan, hingga pelestarian lingkungan hidup. Segala bentuk kinerja aparatur tersebut akan dapat optimal terlaksana manakala ada dukungan infrastruktur yang berkualitas dan merata ke seluruh wilayah Natuna sebagai suatu daerah kepulauan.

Salah satu fasilitas penting yang memengaruhi hajat hidup masyarakat Natuna adalah adanya fasilitas pengelolaan air minum dan listrik yang memadai untuk mendukung pelaksanaan aktivitas keseharian masyarakat. Fasilitas pengelolaan air minum yang bersih dan layak untuk dikonsumsi masyarakat menjadi urgensi dalam penyediaan infrastruktur karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat Natuna. Akses masyarakat Natuna terhadap sumber air minum layak masih belum optimal dengan capaian 82,68 persen penduduk yang memiliki akses. Meskipun berada di atas rata-rata, namun masih adanya masyarakat yang belum memiliki akses sumber air minum layak merupakan *warning* bagi pemerintah dalam pengelolaan air bersih khususnya urusan kesehatan bahwa derajat kesehatan masyarakat Natuna belum sepenuhnya terjaga.

Gambar 3.6

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018



Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2019

Di sisi lain, persentase rumah tangga di Natuna yang memiliki akses penerangan ke PLN sebanyak 89,46 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata persentase rumahtangga yang memiliki akses PLN di Kepulauan Riau yang mencapai 95,67 persen. Kendala geografis berupa wilayah kepulauan menjadi salah satu hambatan utama dalam distribusi listrik ke seluruh rumah tangga Natuna. Meskipun begitu, pemerintah berupaya memberikan alternatif dan solusi dengan penerangan listrik non PLN meskipun belum maksimal.

Tabel 3.4

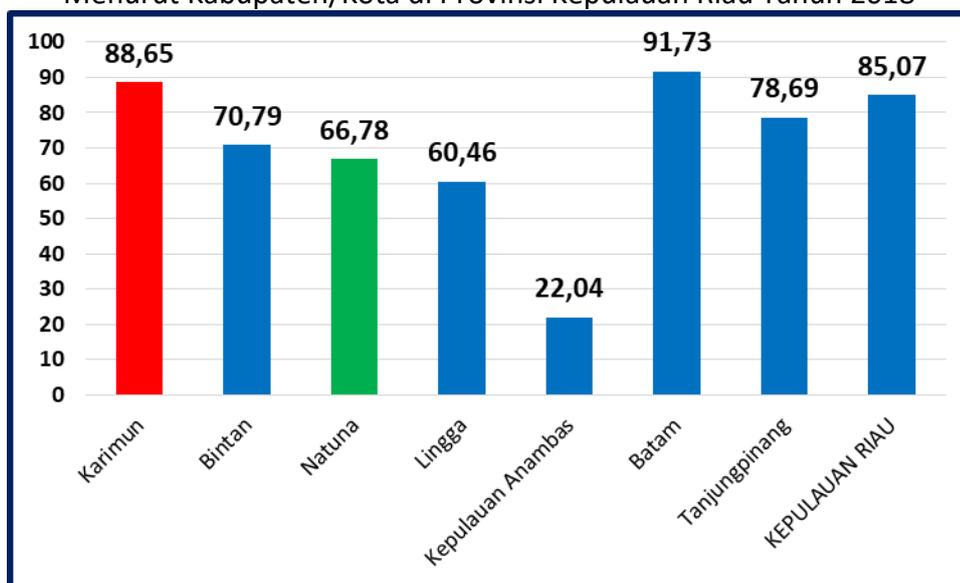
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2018

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
Kabupaten			
1. Karimun	90,87	7,99	1,15
2. Bintan	90,22	7,06	2,72
3. Natuna	89,46	9,11	1,42
4. Lingga	86,88	11,33	1,79
5. Kepulauan Anambas	77,59	19,39	3,02
Kota			
1. Batam	97,97	1,66	0,38
2. Tanjungpinang	100	0	0
KEPULAUAN RIAU	95,67	3,59	0,74

Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2019

Permasalahan lain yang mengiringi pemerataan pembangunan di Natuna adalah permasalahan minimnya akses terhadap sanitasi layak. Sanitasi layak merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jika sanitasi layak tidak terpenuhi, maka cukup banyak penyakit yang “mengintai” masyarakat seperti diare, cacangan, hepatitis, *scabies*, hingga malnutrisi. Oleh karena itu, masih rendahnya rumahtangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Natuna (66,78%) harus menjadi perhatian khususnya para pengambil kebijakan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan infrastruktur sanitasi layak pada permukiman masyarakat Natuna.

Gambar 3.7
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018



Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2019

5. Degradasi lingkungan hidup

Perlu digarisbawahi dalam peningkatan perekonomian daerah perlu adanya rencana yang matang demi menjaga keseimbangan ekosistem alam. Hal ini terkait dengan terjadinya penurunan degradasi lingkungan hidup di Kabupaten Natuna akibat dari berbagai aktivitas perekonomian, khususnya pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu, permasalahan pokok tersebut diturunkan menjadi permasalahan pembangunan jangka panjang “Tingginya potensi ancaman kerusakan lingkungan”, mengingat aktivitas perekonomian di Natuna memiliki potensi tinggi dalam merusak lingkungan.



Sejatinya, berbagai potensi sumber daya alam di Natuna dapat dimanfaatkan sebagai penunjang maupun dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber daya alam yang kurang memerhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, aktivitas pengelolaan sumber daya alam tak terbaharukan harus dikendalikan dan diawasi dalam “pengerukan”nya agar tidak terjadi degradasi lingkungan hidup pada masa yang akan datang.

Dalam melihat kualitas lingkungan hidup, pemerintah daerah menyusun penghitungan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian yang didapatkan sebesar 76,37. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini disusun oleh tiga indikator yakni Indeks Pencemaran Udara (88,23), Indeks Pencemaran Air (54,00) dan Indeks Tutupan Lahan (89,24). Terlihat masih rendahnya kualitas air di Kabupaten Natuna dimana Indeks Pencemaran Air sebesar 54,00 yang masuk dalam kategori sangat kurang. Hal ini salah satunya disebabkan karena massifnya aktivitas pertambangan dan penggalian di Natuna sehingga meningkatkan potensi pencemaran lingkungan, khususnya air.

3.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka panjang agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka panjang. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.



3.2.1. Isu Strategis Internasional

Isu-isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna antara lain: penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), ancaman krisis ekonomi global, penerapan *green economic global* (ekonomi ramah lingkungan), penerapan sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber energi tak terbarukan, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, serta era industri 4.0.

a. Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain: a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) Program Pembangunan MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan *Roadmap* dan Inpres Daya saing, g) *Policy Paper* mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC, h) pembentukan Komite Nasional AEC 2015, dan i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen bersama, yaitu Masyarakat ASEAN 2025 yang telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia



melalui penandatanganan *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community* dan *The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN *Economic Community* (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN *Political-Security Community* (APSC), dan ASEAN *Socio-Culture Community* (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA 2025, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus Kabupaten Natuna baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat produksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun juga sekaligus sebagai produsen sehingga terbuka peluang bagi pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. *Sustainable Development Goals/SDGs*

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat



pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;



- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

c. Ancaman krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

d. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (*industrialis*) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju



pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

e. Penerapan sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber energi tak terbarukan

Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, selain khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, masyarakat dunia juga khawatir akan isu *global warming* yang diakibatkan oleh hasil pembakaran energi fosil sehingga membuat lapisan ozon semakin tipis. Indonesia sendiri masih sangat tergantung dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil sebagai bahan bakar minyak (BBM). Tingginya konsumsi BBM di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya pembaharuan dalam menyikapi krisis energi dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dengan tingkat kesuburan tanah tinggi. Sumber energi alternatif dapat berasal dari sampah yang dihasilkan, baik organik maupun anorganik serta berasal dari sumber energi terbarukan seperti biomassa, matahari, angin dan sebagainya. Diharapkan ke depannya, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang dapat mencukupi kebutuhan energi dalam negeri tanpa khawatir dengan peningkatan pemanasan global.

f. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

g. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin



menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional.

h. Era Industri 4.0

Pada tahun 2020 nanti dunia industri mulai memasuki tahapan yang disebut era Industri 4.0. Industri 4.0 adalah tren otomatisasi industri dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur yang mana didalamnya termasuk teknologi *cloud computing*, *cyber-physical system* dan *Internet of Things* (IoT). Istilah “*smart factory*” akan menjadi hal yang lumrah kita dengar di era Industri 4.0 sebagaimana saat ini kita mendengar istilah *smartphone*, *smartcard* dan istilah-istilah lain yang ditambahkan prefiks smart. Istilah “Industrie 4.0” dicetuskan oleh pemerintah Jerman pada tahun 2011 yang lalu.

Sebagian orang membandingkan Industri 4.0 dengan Revolusi Industri Generasi Keempat (*Fourth Industrial Revolution*). Revolusi Industri Generasi Keempat sendiri merupakan transformasi sistemik yang lebih luas cakupannya daripada Industri 4.0, yang mana didalamnya mencakup dampak terhadap masyarakat, struktur pemerintahan dan peranan manusia itu sendiri dalam struktur ekonomi dan manufaktur. Jadi, bisa disimpulkan Industri 4.0 adalah subset dari Revolusi Industri Generasi Keempat.

Dirangkum dari *World Economic Forum* (WE), nanti pada tahun 2020 dimana era Revolusi Industri Generasi Keempat dimulai ada sepuluh *soft skill* yang harus dimiliki untuk menjawab tantangan dunia industri. *Soft skill* tersebut adalah menyelesaikan permasalahan yang kompleks/sulit (*Complex Problem Solving*), berpikir kritis (*Critical Thinking*), kreatifitas (*Creativity*), manajemen SDM (*Human Resources Management*), koordinasi (*Coordinating*), kecerdasan emosional (*Emotional Intelligence*), pengambilan keputusan (*Judgment and*

Decision Making), orientasi pada layanan (*Service Orientation*), negosiasi (*Negotiation*) dan kelenturan berpikir (*Cognitive Flexibility*).

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025)

Review terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bertujuan untuk menjaga keselarasan antara arah dan sasaran pembangunan Kabupaten Natuna dengan rencana pembangunan nasional pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan. Evaluasi dan monitoring harus tetap dilaksanakan demi menjaga stabilitas perencanaan daerah dan nasional agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan program kegiatan. Adapun tahapan dan skala prioritas pada RPJPN 2005-2025 ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Tahapan dan Skala Prioritas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

RPJMN I (2005-2009)	Menata kembali & membangun Indonesia di segala bidang a. Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN II (2010-2014)	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang b. Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJMN III	Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang



(2015-2019)	c. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJMN IV (2020-2024)	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur d. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Sumber: RPJPN 2005-2025

Berikut **isu-isu strategis nasional** yang menjadi perhatian oleh pemerintah pusat sekaligus Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mewujudkan pembangunan nasional dan regional:

1) Pendidikan

- ✓ Isu-isu yang belum terselesaikan:
 - a. Kesenjangan akses terhadap pendidikan masih belum sepenuhnya terselesaikan untuk semua jenjang pendidikan;
 - b. Upaya peningkatan kualitas pendidikan belum memberikan hasil sesuai harapan;
 - c. Desentralisasi pendidikan dan otonomi pendidikan yang belum berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan; dan
 - d. Isu inefisiensi pembiayaan pendidikan.
- ✓ Isu-isu strategis baru:
 - a. Perluasan akses pendidikan anak usia dini yang lebih berkualitas untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak;
 - b. Perluasan pendidikan menengah (Pendidikan Menengah Universal) dan tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan *supply* tenaga kerja (*skill formation*) yang lebih terdidik dan mencetak pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menangkap peluang mendapatkan bonus demografi;
 - c. Percepatan peningkatan mutu pendidikan untuk berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi;
 - d. Adaptasi pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan; dan



- e. Pembenahan sistem pembiayaan pendidikan yang semakin berat terutama sebagai dampak pelaksanaan Undang-Undang Guru dan Dosen (*fiscal sustainability*).

2) Kesehatan

- ✓ Isu-isu yang belum terselesaikan:
 - a. Penurunan kematian ibu dan kematian bayi;
 - b. Penurunan kekurangan gizi;
 - c. Penurunan TFR (fertilitas);
 - d. Penanggulangan penyakit TB, Malaria, HIV/AIDS; dan
 - e. Pembiayaan kesehatan.
- ✓ Isu-isu strategis baru:
 - a. Kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (2014) dan upaya menuju *universal health coverage* (2019), meliputi kesiapan suplai, kesinambungan fiskal dan pengaturan peran kesehatan publik;
 - b. Transisi epidemiologi, yaitu meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (stroke, cardiovascular, dll);
 - c. Kekurangan gizi, terutama *stunting* pada anak; dan
 - d. Jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, terutama menghadapi JKN, transisi epidemiologi dan perubahan demografi.

3) Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS

Penanggulangan kemiskinan merupakan isu strategis yang sangat global karena dialami oleh seluruh negara di dunia. Khusus di Indonesia, target kemiskinan yang ditetapkan dalam RPJPN atau MP3KI masih jauh dari harapan sehingga perlu adanya kerja keras pemerintah nasional dan daerah agar dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

4) Ketahanan Pangan

Isu-isu strategis ketahanan pangan yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan pembangunan nasional ke depannya nanti adalah sebagai berikut:

- ✓ Menjaga basis/kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas
 - a. Wujudkan lahan pertanian (pangan) abadi terutama untuk padi;



- b. Revitalisasi sistem perbenihan dan perbibitan;
 - c. Pengawasan produksi, penyuluhan dan penerapan teknologi tepat dan ramah lingkungan;
 - d. Putihkan KUT agar akses kredit meningkat; dan
 - e. Mensinergikan subsidi agar tepat sasaran dan efektif mencapai target.
- ✓ Mensinergikan produksi dan pengolahan
 - a. Pengembangan *supply chain*-hulu hilir (produsen-pengumpul-pengolah); dan
 - b. Pengembangan *entrepreneurship* pedagang pengumpul untuk menjembatani permintaan pasar yang semakin heterogen.
 - ✓ Transparansi dan koordinasi kebijakan pangan
 - a. Sinkronisasi dan transparansi pengambilan keputusan untuk mempertahankan stabilitas harga dan menjaga kepentingan produsen-pengolah-konsumen (stok, impor, harga dll); dan
 - b. Pengambilan keputusan lintas instansi yang dirumuskan secara komprehensif dan konsisten oleh tim dengan didukung data dan kemampuan analisa yang mencukupi.
 - ✓ Peningkatan nilai tambah
 - a. Penyediaan bahan baku dari dalam negeri; dan
 - b. Komoditas ekspor unggulan yang lebih baik.

5) Ketahanan Energi

Tantangan produksi minyak dan gas bumi secara nasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Produksi minyak bumi tersendat, di bawah satu juta barel per hari, karena sebagian besar berasal dari lapangan yang sudah tua (*mature fields*) – 62 persen dari total jumlah lapangan migas yang ada saat ini;
- b. Peningkatan produksi dari sumur yang sudah tua (*mature*) terkendala oleh kemampuan pemanfaatan Teknologi *Enhanced Oil Recovery* untuk meningkatkan produksi dari *secondary/tertiary recovery* membutuhkan biaya yang mahal (*cost recovery*);
- c. BUMN (Pertamina EP) menyumbang sekitar 14-15 persen dari produksi minyak bumi nasional;



- d. Terdapat 35-40 persen (350-400 ribu barel/hari) produksi minyak berasal dari lapangan minyak yang dikelola oleh *Chevron Pacific Indonesia* (CPI) di Sumatra, yakni lapangan Duri dan Minas (SLC -*Sumatran Light Crude*), yang sudah mulai menurun. Sejak tahun 1985, lapangan Duri sudah menggunakan teknologi EOR injeksi uap untuk meningkatkan produksi minyak (*secondary/tertiary recovery*); dan
- e. Eksplorasi lapangan/sumur baru masih terbatas.

6) Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas

Tantangan pembangunan infrastruktur dan konektivitas secara nasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Pemenuhan infrastuktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;
- c. Peningkatan pemerataan pembangunan antarwilayah dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas nasional;
- d. Peningkatan koordinasi investasi pusat, daerah, BUMN, dan swasta;
- e. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur serta pengembangan mekanisme pendanaan alternatif (*creative financing scheme*);
- f. Aturan perundang-undangan: masih terdapat kelemahan dan disharmoni dalam aturan perundang-undangan antar bidang infrastruktur maupun dengan bidang non-infrastruktur (contoh: kehutanan, otonomi daerah, pertanahan, keuangan);
- g. Kapasitas kelembagaan: belum optimalnya tata kelola (*governance*), hubungan antarlembaga
- h. Pembebasan tanah: kesulitan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur secara tepat waktu dan tepat biaya;
- i. Pendanaan: efektivitas alokasi dan keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur; dan
- j. Prioritisasi: belum sinkronnya prioritas pembangunan infrastruktur lintas sektor, lintas wilayah maupun antartingkatan (nasional, provinsi maupun kabupaten/kota).



b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur



Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;



- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
- a. Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Moderasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:
- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital



6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

3.2.3. Isu Strategis Regional

3.2.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025

Isu strategis regional yang akan digunakan sebagai salah satu acuan rumusan perencanaan pembangunan jangka panjang adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025. Review terhadap RPJPD Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk mengetahui kebijakan Provinsi Kepulauan Riau. Pemahaman terhadap kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi ini akan memandu RPJPD Kabupaten Natuna agar selaras dan sinergis dengan tujuan dan kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan sejarah, potensi, kondisi dan permasalahan yang dialami pada masa lalu serta tantangan dan peluang dihadapi Provinsi Kepulauan Riau selama pembangunan jangka panjang mendatang yang dilandasi oleh kehendak dan cita-cita luhur pembentukan Daerah,



maka Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 adalah **KEPULAUAN RIAU BERBUDAYA, MAJU DAN SEJAHTERA**. Diharapkan visi pembangunan jangka panjang tersebut mampu memberikan sumbangsih pada perwujudan visi pembangunan jangka panjang nasional serta dapat memberikan pandangan yang sama dalam pelaksanaan pembangunan antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Kabupaten/Kota yang berada di bawahnya.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang, maka dirumuskan kebijakan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

- a. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau Yang Memiliki Kepribadian dan Berakhlak Mulia

Menciptakan kondisi dimana masyarakat Kepulauan Riau yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia sangat penting sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan yang lain. Sikap mental dan moral mencerminkan budaya suatu masyarakat akan menjadi ukuran bagi pihak luar dalam memandang Kepulauan Riau. Pencitraan dan penilaian pihak luar terhadap Kepulauan Riau. Pencitraan dan penilaian pihak luar terhadap kepulauan Riau merupakan kondisi riil yang menjadi sebuah penilaian tersebut. Untuk mendukung perwujudan tersebut dilakukan dengan langkah kebijakan yang cepat dan selaras antara satu dengan lainnya.

- b. Menciptakan Sumber Daya Kepulauan Riau yang Berkualitas Pendidikan, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas Yang Tinggi

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dalam meningkatkan daya saing daerah baik skala nasional dan global. Pendidikan akan memengaruhi etos kerja dan akhirnya meningkatkan daya saing. Daya saing akan memberikan kelenturan berpikir dan bertindak dalam mengelola peluang dan meningkatkan tantangan menjadi peluang.

- c. Meningkatkan Daya Saing daerah Agar mampu Melaksanakan pembangunan Dalam Perekonomian Nasional dan Global Khususnya Dalam Bidang Industri pengelolaan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata

Kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kuatnya pemerintahan namun juga oleh kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia antar



satu daerah dengan daerah lain memiliki relativitas kemampuan. Untuk mengukur kemampuan daerah dalam pergaulan secara nasional dan global agar tetap eksis dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing. Daya saing daerah meliputi seluruh potensi baik sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya sosial (SDS) secara bersama-sama dan terintegrasi mencerminkan kondisi daerah.

- d. Mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau yang Dapat memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara layak

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang seluruh kebutuhannya terpenuhi dengan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan pelayanan dasar yang terjangkau. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya secara layak yang dilakukan mencakup aspek sosial, ekonomi, infrastuktur dan lainnya.

- e. Mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta pariwisata

Secara kodrati Kepulauan Riau berdekatan dengan negara yang sudah maju seperti Singapura dan Malaysia serta dukungan oleh kebijakan pemerintah yang menetapkan Kepulauan Riau sebagai salah satu kawasan strategis nasional. Potensi dan peluang tersebut hanya akan memberi manfaat jika dilakukan perencanaan yang komperhensif dalam menatap masa depan Kepulauan Riau yang lebih maju. Dengan potensi yang ada, keinginan untuk menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa ditunda lagi.

3.2.3.2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2017-2037

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 sebagai bagian dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penataan Ruang Wilayah Kepulauan Riau bertujuan untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang maju



dan sejahtera melalui penataan ruang yang optimal dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan. Adapun kebijakan penataan ruang Kepulauan Riau dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pengembangan keterpaduan pusat-pusat kegiatan;
2. Mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
3. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
4. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
5. Mengembangkan zona dan kawasan industri berdaya saing global;
6. Pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, bintan, karimun; (pengembangan kawasan khusus);
7. Memelihara kelestarian wilayah kepulauan; dan
8. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Dalam pelaksanaan pembangunannya Kepulauan Riau, dari sisi penataan ruang memiliki cukup banyak rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Natuna dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelabuhan penyeberangan Penagi – Kabupaten Natuna sebagai prasarana pendukung dari jaringan angkutan penyeberangan;
- b. Pelabuhan penyeberangan Selat Lampah – Kabupaten Natuna sebagai prasarana pendukung dari jaringan angkutan penyeberangan;
- c. Pembangunan jaringan pipa minyak dan gas bumi yang meliputi Natuna-Singapura (WNTS), *West Natuna Transport System* (WNTS) Tie in ke Pulau Pemping – Jaringan Tanjung Uncang Batam, Natuna Blok D-Alfa (East Natuna) – Kabupaten Natuna – Kabupaten Kepulauan Anambas – Kota Batam – Kota Tanjungpinang – Kabupaten Bintan – Kabupaten Karimun - Duri (Riau);
- d. Rencana *Liquefied Natural Gas* (LNG) Receiving Terminal di Kota Batam, Kabupaten Bintan yang dapat diangkut dengan kapal tanker, pipa dan truk untuk kebutuhan Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan provinsi-provinsi lainnya;
- e. Sistem jaringan ketenagalistrikan di Kabupaten Natuna dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pembangkit, transmisi dan distribusi meliputi



- PLTD Ranai, PLTD Kelarik, PLTD Sedanau, PLTD Midai, PLTD Serasan, PLTD di Pulau Subi, PLTD Pulau Laut, PLTD Pulau Tiga, PLTS Komunal Pulau Subi, PLTS Komunal Pulau Tiga;
- f. Pengembangan Gardu Induk/Hubung di Natuna terdiri atas gardu induk di Kelarik dan Ranai;
 - g. Pemenuhan kebutuhan gas bagi pembangkit dari pipa cabang *West Natuna Transportation System (WNTS)*-Pulau Pemping- Tanjung Uncang;
 - h. Pengelolaan instalasi pengolahan air (IPA);
 - i. Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Natuna meliputi HL Gunung Ranai, HL Gunung Sekunyam dan HL Gunung Bedung;
 - j. Kawasan suaka alam laut, Kawasan perikanan budidaya air laut, Kawasan perikanan budidaya air tawar, Kawasan perikanan budidaya air payau;
 - k. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); dan
 - l. Pengembangan Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata, dan wisata minat khusus.

Sebagai wilayah perbatasan antar Negara, Kabupaten Natuna tentu saja menjadi bagian dari Kawasan Strategis Nasional pada perencanaan tata ruang Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, Kabupaten Natuna juga menjadi kawasan strategis provinsi yang merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang difokuskan sebagai simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanankepelabuhanan dan perindustrian global. Dengan indikasi arahan peraturan zonasi pada Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna, meliputi:

- a. Pengembangan kawasan sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR)/masterplan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna;
- b. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna diarahkan dalam sarana prasarana dan pengembangan serta pengelolaan kawasan sebagai simpul transportasi laut internasional, pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan perindustrian terpadu;



- c. Zona Kawasan Perikanan Tangkap terdapat diseluruh perairan Kabupaten Natuna; dan
- d. Zona simpul transportasi laut internasional, pelabuhan internasional, perikanan tangkap dan perindustrian terpadu terdapat di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur.

3.2.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sekitar

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam

Kota Batam merupakan barometer pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dimana pembangunan perekonomian cukup berpengaruh dalam setiap sendi pembangunan di provinsi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan jangka panjangnya, Kota Batam memiliki visi pembangunan jangka panjang, **“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Yang Madani”**. Dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang yang dijabarkan sebagai berikut:

Misi I : Mengembangkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional, dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang:

1. Meningkatnya daya saing Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan menuju Bandar Berstandar Internasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya jaminan kualitas dan kesinambungan operasionalisasi serta promosi Bandar Internasional
3. Terlaksananya pembangunan dengan berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam dan Rencana Tata Ruang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
4. Meningkatnya dukungan ekosistem untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup

Misi II : Mengembangkan Batam sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang:

1. Meningkatnya peranan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam menjalankan peran dan fungsi Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
2. Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi untuk menghindari terjadinya ketimpangan antar wilayah dan golongan pendapatan



3. Meningkatnya pengembangan kegiatan sektor ekonomi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional
4. Meningkatnya kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan kegiatan ekonomi di wilayah pulau-pulau termasuk pulau terluar
5. Meningkatnya dukungan atas gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta revitalisasi peran koperasi sebagai pondasi dasar ekonomi kerakyatan Kota Batam
6. Terciptanya iklim investasi dan usaha melalui pelayanan handal, jaminan hukum, keamanan dan insentif yang menarik serta promosi daerah
7. Menciptakan pasar tenaga kerja dan pengembangan SDM untuk mendukung kebutuhan sektor ekonomi
8. Menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan sarana transportasi, energi, air bersih, teknologi komunikasi dan informasi, persampahan dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas serta prasarana lainnya

Misi III : Menciptakan Masyarakat Sejahtera, dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang:

1. Meningkatnya keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah *mainland* dengan kegiatan ekonomi di wilayah *hinterland*
2. Meningkatnya daya jangkau/pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan dan meningkatkan nilai strategis bidang pendidikan yang relevan dengan pembangunan Kota Batam melalui penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat
3. Meningkatnya daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan serta penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam bidang kesehatan
4. Tersedianya kebutuhan dasar masyarakat seperti perumahan, listrik, air bersih, angkutan, pengelolaan sampah perkotaan, dan sanitasi lingkungan serta kebutuhan bahan pokok (sembako) dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha dan kualitas kehidupan masyarakat



5. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, pendapatan penduduk, distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran
6. Meningkatnya tingkat kehidupan agama, sosial dan budaya umum penduduk
7. Meningkatnya kegiatan sosial dan pemberdayaan bagi kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial
8. Terwujudnya kelestarian sumber daya hayati dan lingkungan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan penduduk
9. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi penduduk baik dari sisi keamanan, keselamatan, dan ancaman serta bencana alam

Misi IV : Menciptakan Kelembagaan Pemerintahan, Masyarakat dan Swasta yang Madani, dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional termasuk meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel yang mampu mendukung pembangunan Kota Batam
2. Meningkatnya Kerjasama dan Koordinasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Badan Pengusahaan Kawasan Batam dan Instansi Vertikal dalam rangka pembangunan Kota Batam
3. Meningkatkan penguatan dunia usaha di Kota Batam dalam penerapan prinsip *good corporate governance*
4. Terwujudnya masyarakat Kota Batam yang "MADANI"

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Bintan diarahkan kepada pembangunan di bidang kelautan, pariwisata dan kebudayaan dimana visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bintan adalah **"BINTAN GEMILANG 2025" (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata dan Kebudayaan)**. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang dengan penjabaran sebagai berikut:



Misi I : Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi kelautan dan pariwisata secara berkelanjutan sebagai daya dukung dan daya ungkit pembangunan daerah, dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang:

1. Terwujudnya produktifitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi kelautan;
2. Terwujudnya produktifitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi pariwisata;
3. Terwujudnya sarana prasarana pengembangan potensi kelautan dan wilayah pesisir;
4. Terwujudnya sarana dan prasarana pengembangan potensi pariwisata;
5. Terwujudnya fasilitas pemasaran dan perlindungan usaha hasil potensi kelautan yang berbasis kerakyatan;
6. Terwujudnya fasilitas pemasaran dan perlindungan usaha hasil potensi pariwisata yang berbasis kerakyatan;
7. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan bertumpu pada sektor kelautan dan pariwisata;
8. Semakin terjalannya model-model kemitraan dalam pengembangan pemasaran dan destinasi obyek wisata; dan
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas obyek wisata daerah.

Misi II : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang:

1. Meningkatnya angka partisipasi sekolah dan tingkat kelulusan sekolah sampai pada jenjang sarjana;
2. Meningkatnya mutu pendidikan dan kompetensi sumber daya manusia berbasis potensi daerah;
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dalam skala regional dan nasional;
4. Terwujudnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
5. Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan;



6. Terpenuhi sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
7. Tercukupinya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan;
8. Terbentuknya model lembaga pendidikan murah yang mampu menyediakan tenaga kerja produktif siap pakai;
9. Meningkatnya kualitas sarana pendukung untuk pendidikan luar sekolah;
10. Terwujudnya fasilitas dan iklim yang kondusif bagi generasi muda di dalam pengembangan potensi dan prestasi di bidang pendidikan dan olah raga;
11. Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitas olah raga yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat;
12. Semakin optimalnya upaya penumbuhan jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup di kalangan generasi muda; dan
13. Terwujudnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berstandar nasional dan internasional.

Misi III : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah guna menunjang peningkatan perekonomian daerah, dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang:

1. Terpenuhi infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas;
2. Terwujudnya infrastruktur untuk memenuhi air minum yang bersih dan sehat;
3. Terwujudnya peningkatan infrastruktur yang mendukung sistem transportasi terpadu baik darat, laut maupun udara yang berbasis angkutan publik dan menjangkau wilayah kepulauan;
4. Terwujudnya peningkatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau dilengkapi prasarana dan sarana permukiman yang memadai; dan
5. Tersedianya sarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektifitas dunia usaha.

Misi IV : Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang peduli terhadap kualitas pelayanan masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip penatausahaan pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang:



1. Meningkatnya kualitas proses, produk, data base dan aparatur perencanaan pembangunan;
2. Tersedianya berbagai media untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka mengembangkan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan, akuntabel dan partisipatif;
4. Meningkatnya kualitas pengendalian dan hasil pengawasan terhadap kegiatan pembangunan;
5. Terwujudnya kelembagaan penelitian yang kredibel dan aplikabel bagi masyarakat luas;
6. Terciptanya sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan sistem kelembagaan Daerah;
7. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja SKPD dan, berkembangnya teknologi informasi;
8. Semakin optimalnya pemanfaatan kelembagaan perwakilan rakyat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah;
9. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat;
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur;
11. Semakin meningkatnya model-model pengelolaan keuangan daerah, yang berbasiskan pada kinerja atau prestasi kerja dari waktu ke waktu;
12. Semakin berkurangnya tingkat kebocoran dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD untuk program-program investasi masyarakat;
13. Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan dan penataan arsip daerah;
14. Semakin tersedianya berbagai macam media dan sarana yang berhubungan dengan teknologi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di daerah;
15. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan perijinan kepada masyarakat;
16. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
17. Meningkatnya intensitas kerjasama pembangunan antar daerah.



Misi V : Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu yang agung dengan hubungan kekerabatan yang harmonis sehingga mampu menciptakan iklim kondusif bagi peningkatan kesejahteraan, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang:

1. Meningkatnya pola-pola pembinaan yang dilakukan terhadap sanggar-sanggar seni dan paguyuban kebudayaan tradisional;
2. Semakin optimalnya program-program pengelolaan kekayaan budaya daerah;
3. Semakin meningkatnya fasilitasi terhadap keragaman budaya daerah;
4. Semakin meningkatnya jalinan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah; dan
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas nilai-nilai budaya daerah.

Misi VI : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan secara komprehensif, dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang:

1. Semakin meningkatnya ruang-ruang publik yang dipergunakan sesuai dengan fungsinya atau peruntukannya
2. Terwujudnya peningkatan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu
3. Semakin terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Semakin meningkatnya pola pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan, khususnya wilayah laut dan pantai
5. Meningkatnya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Meningkatnya kualitas penataan lingkungan yang dapat memberikan kenyamanan dan menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
7. Semakin optimalnya program pengembangan sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah,
8. Semakin menurunnya kasus-kasus sengketa atau konflik-konflik masalah pertanahan dan perairan
9. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

Misi VII : Meningkatkan daya saing daerah dalam skala nasional dan internasional, dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang:



1. Terwujudnya kondusifitas daerah sebagai dasar penyelenggaraan demokrasi dan pembangunan yang berdaya saing;
2. terselesaikannya permasalahan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya pelabuhan dan bandara udara berskala internasional;
4. Terwujudnya kemitraan daerah berskala regional, nasional dan internasional dalam rangka optimalisasi potensi daerah;
5. Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur dan sumber daya manusia dengan standar internasional;
6. Terwujudnya kualitas pelayanan publik dasar berstandar internasional;
7. Meningkatnya iklim investasi dan pelayanan perijinan berstandar internasional;
8. Terwujudnya standar pelayanan minimal dan standar operasional dan prosedur dalam menghadapi era global dengan standar internasional; dan
9. Terwujudnya fasilitasi pengembangan potensi daerah berskala internasional.

3.2.3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Sekitar

Perencanaan pembangunan tata ruang yang sinergis akan memberikan sumbangsih positif dalam perwujudan pembangunan secara keseluruhan. Tak terkecuali Kabupaten Bintan yang telah menetapkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bintan ingin mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Berbasis Industri, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan melalui Optimalisasi Pemanfaatan Ruang yang Terintegrasi serta Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan. Sedangkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Bintan meliputi:

1. Perwujudan pembangunan wilayah Kabupaten Bintan yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pada kebijakan ini, dilakukan dengan strategi:
 - a. mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Bintan;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pada pusat-pusat pelayanan agar lebih kompetitif dan mampu menciptakan investasi;
 - c. meningkatkan pelayanan pusat-pusat kegiatan (perkotaan dan pedesaan) yang merata dan berhirarki;



- d. meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Bintan dengan pusat-pusat kegiatan di kawasan sekitarnya;
 - e. menjaga berfungsinya pusat-pusat kegiatan yang sudah ada di wilayah Kabupaten Bintan secara optimal;
 - f. mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peran yang dikembangkan;
 - g. mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di wilayah Kabupaten Bintan;
 - h. pengembangan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
 - i. integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di wilayah Kabupaten Bintan;
 - j. pengembangan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bintan dengan pulau-pulau di sekitarnya sesuai dengan intensitas aktivitas;
 - k. pengembangan dan peningkatan kualitas layanan terminal umum meliputi bandara, pelabuhan, pelabuhan penyeberangan, dan terminal angkutan darat sebagai simpul transportasi.
2. Pengembangan fungsi-fungsi perekonomian Kabupaten Bintan untuk mengakomodir kebutuhan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Pada kebijakan ini, dilakukan dengan strategi:
- a. mempersiapkan daerah-daerah yang termasuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Bintan;
 - b. mempersiapkan daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam menunjang kegiatan-kegiatan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Bintan;
 - c. mendorong kegiatan industri pengolahan komoditi unggulan di sentra-sentra produksi;



- d. mengembangkan kawasan ekonomi yang prospektif dan menarik yang mampu membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal didalam dan diluar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - e. mengembangkan kawasan permukiman didalam dan diluar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi;
 - f. pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan-kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - g. membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
3. Pemanfaatan potensi sumber daya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, melalui penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya. Pada kebijakan ini, dilakukan dengan strategi:
- a. pengembangan potensi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
 - b. pengembangan potensi sektor pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian lingkungan;
 - c. mengembangkan kegiatan sektor unggulan pertanian di wilayah sentra produksi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dan kawasan pariwisata berbasis masyarakat dan keunikan budaya dan alam.
4. Optimasi pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah. Pada kebijakan ini, dilakukan dengan strategi:
- a. mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya;
 - b. mewujudkan kawasan lindung dengan luas minimal 30 persen (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kabupaten Natuna sesuai dengan kondisi ekosistemnya;



- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan mangrove;
 - e. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, sungai, danau/waduk, mata air, kawasan perairan laut;
 - f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - g. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - h. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. Pada kebijakan ini, dilakukan dengan strategi:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan
 - c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Dalam hubungannya dengan pembangunan Kabupaten Natuna, terlihat pada beberapa poin perencanaan tata ruang, salah satunya tentang rencana pengembangan jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Peningkatan jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan bertujuan untuk menunjang



pembangunan ekonomi regional di daerah setempat. Peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Bintan dilakukan melalui peningkatan pelayanan transportasi penyeberangan Telaga Punggur (Pulau Batam) – Tanjung Uban (Pulau Bintan) dan lintas penyeberangan Tanjungpinang – Tambelan – Pontianak – Natuna.

1.2.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna

A. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012, telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031. Tujuan dari penataan ruang wilayah ini adalah ingin mewujudkan Natuna sebagai gerbang utara NKRI yang bermartabat dan mandiri ekonomi berbasis migas dan agrominawisata yang berkelanjutan dan lestari. Beberapa kebijakan penataan ruang wilayah yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Natuna ini meliputi:

- a. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- b. Peningkatan fungsi kawasan mengantisipasi peluang pengembangan perdagangan bebas;
- c. Pemerataan pertumbuhan wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. Pengembangan sektor ekonomi basis yang bertumpu pada sektor migas, sumber daya bahari, perkebunan dan pertanian;
- e. Pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah;
- f. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata di seluruh wilayah sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya;
- g. Pengendalian dan penyebaran penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- h. Percepatan pengembangan wilayah kabupaten; dan
- i. Pengembangan sistem sarana dan prasarana permukiman memadai sesuai dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat.



Dalam RTRW Kabupaten Natuna ini, telah ditetapkan kawasan strategis yang meliputi kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis Nasional di wilayah Kabupaten merupakan pulau - pulau terluar meliputi Pulau Subi Kecil, Pulau Sekatung, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, Pulau Tokong Boro, Pulau Senua, dan Pulau Kepala. Sedangkan Kawasan strategis Provinsi di wilayah Kabupaten ditetapkan di Pelabuhan Internasional Teluk Buton sebagai simpul transportasi laut internasional untuk mendukung pelayanan dan akses ke pasar global.

Pada kawasan strategis kabupaten, meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yakni:

- a. kawasan perkotaan Ranai berada di Kecamatan Bunguran Timur;
- b. kawasan pariwisata alam berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- c. kawasan minapolitan Serantas berada di Kecamatan Pulau Tiga;
- d. kawasan agropolitan Kelarik berada di Kecamatan Bunguran Utara; dan
- e. kawasan agropolitan Batubi berada di Kecamatan Bunguran Barat.

Sedangkan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi:

- a. kawasan hutan lindung Gunung Ranai;
- b. kawasan hutan lindung Gunung Bedung;
- c. kawasan hutan lindung Gunung Sekunyam; dan
- d. kawasan cagar alam dan suaka alam laut binaan Kawasan Konservasi Laut Daerah.

B. Perencanaan Perubahan Tata Ruang Wilayah (RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2020-2040)

Upaya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 merupakan bentuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan pasca evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperbaharui berbagai kebijakan sesuai dengan dinamika pembangunan yang terjadi saat ini dan



perkiraan pada masa mendatang. Salah satu poin penting perubahan adalah tujuan penataan ruang wilayah dengan adanya penambahan sektor pembangunan dalam upaya perwujudan ruang Natuna sehingga menjadi “Mewujudkan ruang Kabupaten Natuna sebagai gerbang utara NKRI yang mandiri, berdaya saing dalam keseimbangan lingkungan hidup berbasis agrominawisata, migas, industri, serta pertahanan dan keamanan”.

Beberapa kebijakan penataan ruang wilayah yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Natuna ini meliputi:

- a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata di seluruh wilayah dengan hierarki dan skala pelayanannya;
- b. Pengembangan sistem jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan lingkungan permukiman, yang terintegrasi;
- c. Pemanfaatan kawasan lindung yang efisien, serasi, dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah kepulauan;
- d. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya daerah;
- e. Pengembangan sektor ekonomi bertumbuh pada sektor migas, sumber daya bahari, pertanian, dan pariwisata;
- f. Pengembangan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- g. Percepatan perwujudan kawasan strategis sudut pandang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup.

Salah satu poin penting dalam melihat penataan ruang di Kabupaten Natuna adalah poin tentang sistem perkotaan yang dirumuskan dalam RTRW. Struktur sistem perkotaan di Kabupaten Natuna mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Hierarki Sistem perkotaan di Kabupaten Natuna terdiri atas:



- a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di daerah Ranai. Sebagai PKSN, Ranai memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pertahanan dan keamanan, simpul transportasi, serta perdagangan dan jasa. Dalam implementasinya, diharapkan kawasan perkotaan Ranai mampu mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara.
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kabupaten Natuna yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL Kabupaten Natuna ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 yang meliputi:
 - i. PKL Serasan di Kecamatan Serasan sebagai pusat distribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, perdagangan skala lokal, dan simpul transportasi regional;
 - ii. PKL Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat sebagai pusat distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, perdagangan skala lokal, dan simpul transportasi regional;
 - iii. PKL Pulau Tiga di Kecamatan Pulau Tiga sebagai pusat pengembangan sentra perikanan, pendukung pengembangan wisata bahari, dan simpul pelayanan transportasi laut regional; dan
 - iv. PKL Midai di Kecamatan Midai sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan (cengkeh), simpul pelayanan transportasi laut regional, dan pendukung pengembangan wisata bahar.
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kabupaten Natuna yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK Kabupaten Natuna meliputi:
 - i. PPK Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara;
 - ii. PPK Kellarik di Kecamatan Bunguran Utara;
 - iii. PPK Batubi Jaya di Kecamatan Bunguran Batubi;
 - iv. PPK Cemaga di Kecamatan Bunguran Selatan;
 - v. PPK Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut;
 - vi. PPK Terayak di Kecamatan Subi;
 - vii. PPK Tanjung di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - viii. PPK Harapan Jaya di Kecamatan Bunguran Tengah;



- ix. PPK Air Nusa di Kecamatan Serasan Timur; dan
- x. PPK Tanjung Kumbik Utara di Kecamatan Pulau Tiga Barat
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kabupaten Natuna yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. PPL Kabupaten Natuna meliputi:
 - i. PPL Binjai di Kecamatan Bunguran Barat;
 - ii. PPL Setengar di Kecamatan Bunguran Selatan;
 - iii. PPL Selaut di Kecamatan Bunguran Barat;
 - iv. PPL Seluan Barat di Kecamatan Bunguran Utara;
 - v. PPL Pulau Panjang di Kecamatan Subi;
 - vi. PPL Batu Berian di Kecamatan Serasan; dan
 - vii. PPL Pulau Kerdau di Kecamatan Subi.

Dalam RTRW Kabupaten Natuna ini, telah ditetapkan kawasan strategis yang meliputi kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis Nasional di wilayah Kabupaten Natuna meliputi Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau meliputi Pulau Senua dan Pulau Subi yang merupakan Pulau-pulau Kecil Terluar di wilayah Indonesia. Sedangkan Kawasan strategis Provinsi di wilayah Kabupaten Natuna meliputi pulau-pulau kecil antara lain Pulau Semiu, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, dan Pulau Tokong Boro. Selain itu, kawasan strategis Provinsi juga terlihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi kawasan perkotaan Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Bunguran Timur Laut.

Pada kawasan strategis kabupaten, meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yakni:

- a. Kawasan perkotaan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur. Diharapkan kawasan perkotaan Ranai mampu memberi pengaruh dalam percepatan perwujudan pembangunan Natuna;
- b. Kawasan strategis agropolitan Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara, agropolitan Batubi di Kecamatan Bunguran Batubi, dan agropolitan Payak di Kecamatan



- Serasan. Kawasan ini diharapkan mampu mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten; dan
- c. Kawasan strategis minapolitan Natuna berada di Kecamatan Pulau Tiga. Pada kawasan strategis ini, terdapat Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) yakni di daerah Selat Lampa. Terdapat tiga zona dalam pengembangan kawasan strategi minapolitan yakni zona sentra perikanan I di Pulau Sabang Mawang, zona sentra perikanan II di Pulau Sededap, dan zona sentra perikanan III di Pulau Tanjung Kumbik.

Sedangkan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi perkampungan tua Segeram di Kecamatan Bunguran Barat, Perkampungan Midai, di Kecamatan Midai, Perkampungan Penagi, di Kecamatan Bunguran Timur, dan Perkampungan Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat.

Diharapkan dalam setiap rumusan rencana tata ruang wilayah ini dapat diimplementasikan secara optimal ketika melaksanakan pembangunan Natuna. Oleh karena itu, dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan khususnya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) harus dilakukan telaah terhadap dokumen RTRW Kabupaten Natuna agar rumusan kebijakan tata ruang wilayah ini dapat terintegrasikan dengan kebijakan yang diambil dalam pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

3.2.5. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Natuna

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki berbagai ekosistem lingkungan hidup, maka Kabupaten Natuna harus merumuskan KLHS secara terstruktur dan memiliki integrasi dengan berbagai perencanaan pembangunan Natuna.

Seperti disebutkan dalam Pasal 16 UU 32/2009, dokumen KLHS ditujukan untuk memuat kajian antara lain:



1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Sehubungan dengan poin tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna telah membentuk tim kelompok kerja serta pemangku kepentingan KLHS untuk dokumen Perubahan Revisi RPJPD Tahun 2005-2025. Tim kelompok kerja telah melaksanakan *Forum Group Discussion* pada bulan Oktober 2019 dengan beberapa hasil salah satunya adalah identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan (TPB) berdasarkan permasalahan pembangunan jangka panjang yang terlihat sebagai berikut.

Tabel 3.6
Hubungan Antara Permasalahan dan Isu Pembangunan Jangka Panjang
Serta Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Permasalahan/Isu Pembangunan Jangka Panjang	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Belum optimal perwujudan kehidupan masyarakat yang berkualitas, berbudaya, dan berakhlak mulia	
SDM	04_Pendidikan Berkualitas
Angka putus sekolah	04_Pendidikan Berkualitas
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	03_Kesehatan dan Kesejahteraan
Penyakit menular dan tidak menular	03_Kesehatan dan Kesejahteraan
Pernikahan usia dini	03_Kesehatan dan Kesejahteraan
Kesetaraan gender	05_Kesetaraan gender
Perlindungan anak	10_Penurunan kesenjangan
Keseimbangan Gizi	02_Kelaparan
Permukiman kumuh	03_Kesehatan dan Kesejahteraan
Belum optimalnya kemandirian perekonomian daerah	
Keterbatasan lapangan kerja	08_Pertumbuhan ekonomi dan Pekerjaan layak
Ketahanan pangan	02_Kelaparan
Kemiskinan	01_Kemiskinan
Pertumbuhan investasi	08_Pertumbuhan ekonomi dan Pekerjaan layak
Distribusi BBM	08_Pertumbuhan ekonomi dan Pekerjaan layak



Permasalahan/Isu Pembangunan Jangka Panjang	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Produksi dan Pemasaran komoditi dan produk daerah	08_Pertumbuhan ekonomi dan Pekerjaan layak
Degradasi lingkungan hidup	
Kebencanaan (Karhutla, Banjir)	15_Pelestarian Ekosistem Darat
Sampah dan sanitasi	15_Pelestarian Ekosistem Darat
Ketersediaan air bersih	06_Air bersih dan sanitasi
Indeks Kerentanan Pantai	14_Pelestarian Ekosistem Laut
Alih fungsi lahan	15_Pelestarian Ekosistem Darat
Kawasan konservasi darat dan laut	14_Pelestarian Ekosistem Laut dan 15_Pelestarian Ekosistem Darat
<i>Illegal Fishing (IUU)</i>	14_Pelestarian Ekosistem Laut
<i>Illegal Logging</i>	15_Pelestarian Ekosistem Darat
<i>Illegal Mining</i>	15_Pelestarian Ekosistem Darat
Belum meratanya infrastruktur pembangunan yang berkualitas	
Drainase	09_Infrastruktur tangguh
Transportasi	09_Infrastruktur tangguh
Sarana kesehatan belum merata	03_Kesehatan dan Kesejahteraan
Indeks Gini	09_Infrastruktur tangguh
Sarpras wisata	09_Infrastruktur tangguh
Sarpras penanggulangan bencana	09_Infrastruktur tangguh
Sarpras pelayanan dasar	09_Infrastruktur tangguh
Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	
Kualitas aparatur pemerintah	16_Kelembagaan yg kokoh
Sarpras Pemerintahan	16_Kelembagaan yg kokoh

Salah satu poin penting dalam analisis KLHS Kabupaten Natuna adalah adanya scenario dan rekomendasi yang diajukan untuk merumuskan perubahan perencanaan jangka panjang daerah. Skenario dan rekomendasi dirincikan berdasarkan DDDTLH (Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup), dengan penjabaran sebagai berikut:

1.1 Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB yang Terkait DDDTLH

Uraian rekomendasi untuk setiap indikator TPB yang terkait DDDTLH dapat dirincikan sebagai berikut:

1.1.1 Indikator Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan



Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, mencapai akses *universal* dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Tercapainya pemerataan pemenuhan kebutuhan air minum yang layak bagi semua masyarakat
- Identifikasi sumber daya air
- Pemetaan daya dukung sumber daya air
- Pemenuhan kebutuhan air minum layak bagi semua masyarakat
- Pengelolaan Sumber daya air
- Peningkatan pengelolaan mutu lingkungan hidup
- Mempertahankan kearifan lokal untuk melindungi air baku (hulu)
- Penanaman kembali di area lahan kritis

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Dinas Kesehatan
- BP3D
- Dinas PUPR
- DLH
- BUMD PDAM

1.1.2 Indikator Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.



1.1.3 Indikator Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Pembangunan sarana dan prasarana air limbah bagi masyarakat
- Peningkatan pengelolaan mutu lingkungan hidup

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Kesehatan

1.1.4 Indikator Jumlah yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

**Rekomendasi:**

a. Sasaran:

- Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Tinja

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Identifikasi Pengelolaan lumpur tinja
- Pemetaan pemukiman
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
- Peningkatan pengelolaan mutu lingkungan hidup

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Kesehatan

1.1.5 Indikator proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja

Tujuan: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Tinja

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Identifikasi Pengelolaan lumpur tinja
- Pemetaan pemukiman
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.
- Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
- Peningkatan pengelolaan mutu lingkungan hidup

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Kesehatan

1.1.6 Indikator Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani

Tujuan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Koordinasi antar dinas/instansi terkait dan non pemerintah dalam hal penanganan sampah perkotaan.
- Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
- Peningkatan pengelolaan mutu lingkungan hidup
- Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya
- Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah
- Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sampah
- Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan terkait pengelolaan sampah
- Pengembangan alternatif sumber pembiayaan pengelolaan sampah
- Pengurangan sampah yang sulit terurai seperti sampah plastik, sterefoam, dan sebagainya

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Dinas PUPR
- Dinas Kesehatan



1.2 Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB yang Tidak Terkait DDDTLH

Rincian rekomendasi untuk setiap indikator TPB yang tidak terkait DDDTLH dijabarkan dalam poin-poin di bawah ini:

1.2.1 Indikator Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatkan Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Natuna untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan
- Pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan potensi unggulan sumber daya alam
- Perwujudan masyarakat yang produktif dan kesetaraan gender
- Peningkatan Pendapatan Masyarakat khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Sosial
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Kesehatan
- BPJS ketenagakerjaan

1.2.2 Indikator Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

**Rekomendasi:**

a. Sasaran:

- Meningkatnya Persentase terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas yang miskin dan rentan

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas bagi penyandang disabilitas yang miskin dan rentan
- Perwujudan masyarakat yang produktif
- Melengkapi sarana prasarana dipabel di tempat umum

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Sosial
- Bagian Ekonomi Setda
- Dinas Pendidikan
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Kesehatan

1.2.3 Indikator Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menurunnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan program pengentasan kemiskinan
- Koordinasi dan sinkronisasi data bagi rumah tangga miskin yang akan mendapatkan bantuan tunai bersyarat
- Meningkatkan kualitas pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT)



c. Instansi pelaksana:

- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.2.4 Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
- Peningkatan Pendapatan Masyarakat khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani
- Peningkatan infrastruktur pendidikan

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Pendidikan
- Kemenag

1.2.5 Indikator Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatkan Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
- Meningkatkan pencegahan korban bencana

**b. Strategi dan arah kebijakan:**

- Antisipasi terjadinya korban bencana
- Koordinasi & kerjasama dengan instansi terkait pemberian bantuan korban bencana
- Upaya mitigasi bencana

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Sosial
- Dinas Pemadam Kebakaran
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas PUPR
- Dinas Kesehatan
- Dinas Pendidikan
- Dinas Perhubungan

1.2.6 Indikator Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana

Tujuan: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Rekomendasi:**a. Sasaran:**

- Meningkatkan Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
- Meningkatkan pencegahan korban bencana

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Antisipasi terjadinya korban bencana
- Koordinasi & kerjasama dengan instansi terkait pemberian bantuan korban bencana
- Upaya mitigasi bencana
- Upaya pemberdayaan ekonomi korban bencana

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Sosial
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas PUPR



- Dinas Kesehatan
- Dinas Perhubungan
- Bagian Ekonomi Setda
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.2.7 Indikator Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.

Tujuan: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menurunnya Prevalensi Kekurangan Gizi (*underweight*) pada Anak Balita

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Terpenuhinya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik dan berkualitas
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pola makan anak yang berkualitas
- Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pola asuh yang baik

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Kesehatan
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Sosial
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Dinas Ketahanan Pangan

1.2.8 Indikator Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe



Tujuan: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menurunnya Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Terpenuhinya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik dan berkualitas
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pola makan anak yang berkualitas

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Kesehatan,
- Dinas Sosial
- Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Pendidikan

1.2.9 Indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan

Tujuan: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

**Rekomendasi:**

a. Sasaran:

- Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pola makan anak yang berkualitas

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Kesehatan
- Dinas Sosial
- Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Pendidikan
- Dinas Perikanan
- Dinas Pertanian

1.2.10 Indikator Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi.

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target: Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Tercapainya imunisasi dasar lengkap pada bayi.
- Meningkatkan usia harapan hidup

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memberikan imunisasi dasar lengkap khususnya untuk pasangan baru menikah



- Meningkatkan sarana prasarana kesehatan
- Keberadaan Sertifikat halal untuk vaksin

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Kesehatan
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.2.11 Indikator Prevalensi penyalahgunaan narkoba

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target: Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menurunnya penyalahgunaan NAPZA
- Mencegah peredaran NAPZA

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya NAPZA
- Membentuk lembaga untuk penanganan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA
- Membangun infrastruktur dan SDM untuk penanganan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA

c. Instansi pelaksana:

- Kepolisian
- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
- Dinas Sosial
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Kesehatan,
- Kemenag
- Bakesbangpol

1.2.12 Indikator Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern



Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target: Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan kampanye Program Keluarga Berencana
- Meningkatkan akses pelayanan KB

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Kesehatan,

1.2.13 Indikator *Unmet need* pelayanan kesehatan

Tujuan: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target: Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar
- Meningkatkan kesadaran hidup sehat

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan secara bertahap bagi masyarakat Kabupaten Natuna
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- Meningkatkan infrastruktur pelayanan kesehatan



c. Instansi pelaksana:

- Dinas Kesehatan
- Dinas Sosial
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- BPKAD

1.2.14 Indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Terpenuhinya tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik dan berkualitas
- Meningkatkan akses dan mutu layanan Sekolah Dasar
- Meningkatkan sarana prasarana layanan pendidikan
- Meningkatkan SDM tenaga kependidikan

c. Pelaksana Kegiatan:

- Dinas Pendidikan
- Kemenag

1.2.15 Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

**Rekomendasi:**

a. Sasaran:

- Meningkatkan Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun
- Meningkatkan akses dan mutu layanan Sekolah Menengah
- Meningkatkan sarana prasarana layanan pendidikan
- Meningkatkan SDM tenaga kependidikan

c. Pelaksana Kegiatan:

- Dinas Pendidikan
- Kemenag

1.2.16 Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun
- Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan tingkat menengah
- Meningkatkan sarana prasarana layanan pendidikan
- Meningkatkan SDM tenaga kependidikan

c. Pelaksana Kegiatan:

- Dinas Pendidikan
- Kemenag

1.2.17 Indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua



Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu/miskin.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, keagamaan dan kebudayaan
- Membuka Keterisoliran Daerah/Desa melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Pembukaan Jalan
- Meningkatkan sarana prasarana layanan pendidikan
- Meningkatkan SDM tenaga kependidikan

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Pendidikan
- Kemenag

1.2.18 Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tujuan: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
- Meningkatkan sarana prasarana layanan pendidikan
- Meningkatkan SDM tenaga kependidikan



c. Instansi pelaksana:

- Dinas Pendidikan

1.2.19 Indikator Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan

Tujuan: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target: Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Kesetaraan Gender
- Perlindungan perempuan

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Kesetaraan gender dalam partisipasi dan Peluang Ekonomi, Pencapaian Pendidikan, Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, dan Pemberdayaan Politik.
- Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
- Membentuk ruang pelayanan khusus terhadap pendampingan

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Sosial,
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
- Dinas Kesehatan,

1.2.20 Indikator *Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)

Tujuan: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target: Menjamin akses *universal* terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.

**Rekomendasi:**

a. Sasaran:

- Menurunnya *Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan akses pelayanan KB dan penyuluhan kesehatan reproduksi

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Sosial,
- Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Kesehatan,

1.2.21 Indikator Laju pertumbuhan PDRB per kapita

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Laju pertumbuhan PDB per kapita

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Peningkatan investasi dan pendapatan per kapita
- Peningkatan Pendapatan Masyarakat khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani
- Peningkatan infrastruktur
- Perluasan lapangan pekerjaan
- Pengentasan kemiskinan
- Akses mendapatkan modal usaha

c. Instansi pelaksana:

- BP3D
- Bagian Ekonomi Setda



- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.2.22 Indikator Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM.
- Mengurangi angka pengangguran

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses permodalan dari pemerintah atau bank
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam mendapatkan informasi peluang kerja
- Perluasan pasar
- Peningkatan industrialisasi
- Peningkatan lapangan kerja

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Komunikasi dan Informasi

1.2.23 Indikator Persentase tenaga kerja formal

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses



terhadap jasa keuangan.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Persentase tenaga kerja formal.
- Mengurangi angka pengangguran

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses permodalan dari pemerintah atau bank
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam mendapatkan informasi peluang kerja
- Perluasan pasar
- Peningkatan industrialisasi
- Peningkatan lapangan kerja

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Komunikasi dan Informasi

1.2.24 Indikator Tingkat setengah pengangguran

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menurunnya tingkat setengah pengangguran.
- Mengurangi angka pengangguran

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses permodalan dari pemerintah atau bank
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam mendapatkan informasi peluang kerja



- Perluasan pasar
- Peningkatan industrialisasi
- Peningkatan lapangan kerja

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Komunikasi dan Informasi

1.2.25 Indikator Jumlah wisatawan mancanegara

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Pengembangan obyek dan daya tarik wisata
- Percepatan pengembangan Geopark Natuna
- Membuka aksesibilitas dari dan ke Kabupaten Natuna, serta antar wilayah di Kabupaten Natuna
- Pengembangan amenities (sarana prasarana pendukung) pariwisata
- Peningkatan promosi pemasaran pariwisata
- Meningkatkan jejaring/Kemitraan masyarakat, swasta dan media massa.
- Peningkatan SDM bidang kepariwisataan
- Peningkatan sinergitas OPD dalam membangun kepariwisataan

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Dinas Perhubungan
- Dinas PUPR



- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
- Dinas Pendidikan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM

1.2.26 Indikator Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target: Pada tahun 2030 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Jumlah wisatawan mancanegara.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Pengembangan obyek dan daya tarik wisata
- Membuka aksesibilitas dari dan ke Kabupaten Natuna, serta antar wilayah di Kabupaten Natuna
- Pengembangan amenities (sarana prasarana pendukung) pariwisata
- Peningkatan promosi pemasaran pariwisata (Dalam dan luar negeri)

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Dinas Perhubungan
- Dinas PUPR
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
- Dinas Pendidikan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM

1.2.27 Indikator Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

Tujuan: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi



Target: Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Peningkatan investasi dan pendapatan per kapita
- Peningkatan Pendapatan Masyarakat khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani
- Peningkatan infrastruktur
- Perluasan lapangan pekerjaan
- Pengentasan kemiskinan
- Akses mendapatkan modal usaha

c. Instansi pelaksana:

- BP3D
- Bagian Ekonomi Setda
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.2.28 Indikator Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan

Tujuan: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar negara

Target: Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menurunnya jumlah desa tertinggal

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kelembagaan desa
- Peningkatan jaringan transportasi inter dan antar moda yang terpadu



- Peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan transportasi
- Peningkatan inovasi desa dan teknologi tepat guna
- Peningkatan SDM di desa
- Alokasi dana desa diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi produktif

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Dinas PUPR
- Dinas Perhubungan

1.2.29 Indikator Jumlah desa tertinggal

Tujuan: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar negara

Target: Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menurunnya jumlah desa tertinggal

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kelembagaan desa
- Peningkatan jaringan transportasi inter dan antar moda yang terpadu
- Peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan transportasi
- Peningkatan inovasi desa dan teknologi tepat guna
- Peningkatan SDM di desa
- Alokasi dana desa diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi produktif

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Dinas PUPR
- Dinas Perhubungan

1.2.30 Indikator Jumlah Desa Mandiri

Tujuan: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar negara

Target: Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang



lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kelembagaan desa
- Peningkatan jaringan transportasi inter dan antar moda yang terpadu
- Peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan transportasi
- Peningkatan inovasi desa dan teknologi tepat guna
- Peningkatan SDM di desa
- Alokasi dana desa diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi produktif

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Dinas PUPR
- Dinas Perhubungan

1.2.31 Indikator Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan

Tujuan: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target: Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Terpenuhinya perlindungan anak yang lebih baik dan tingkat ketahanan keluarga yang semakin berkualitas
- Menurunnya angka kekerasan terhadap anak

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak
- Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam melindungi anak-anak dari tindak kekerasan



c. Instansi pelaksana:

- Dinas Sosial,
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
- Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah

1.2.32 Indikator Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana

Tujuan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Target: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menurunnya jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
- Meningkatkan pencegahan korban bencana

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Bekerjasama dengan pusat terkait program RTLH
- Antisipasi terjadinya korban bencana
- Koordinasi & kerjasama dengan instansi terkait pemberian bantuan korban bencana
- Upaya mitigasi bencana

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Sosial
- Dinas Pemadam Kebakaran
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas PUPR
- Dinas Kesehatan
- Dinas Pendidikan
- Dinas Perhubungan

1.2.33 Indikator Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Tujuan: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan



Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Target: Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatkan persentase keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan wawasan kaum perempuan dan rasa percaya diri untuk ikutberperan dalam pembangunan.
- Perwujudan masyarakat yang produktif dan kesetaraan gender
- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik

c. Instansi pelaksana:

- Dinas Pendidikan
- Dinas Sosial,
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
- Bakesbangpol

1.2.34 Indikator Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya

Tujuan: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Target: Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatkan Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Peningkatan kebijakan/regulasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah



- Mengelola dan memanfaatkan SDA dan SDM secara berkelanjutan yang ditunjang dengan Perda retribusi
- Peningkatan profesionalisme dan integritas pemerintah

c. Instansi pelaksana:

- Semua Perangkat Daerah

1.2.35 Indikator Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Tujuan: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Target: Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Menjadikan data BPS sebagai database untuk penyusunan kebijakan
- Meningkatkan konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Meningkatkan peranan OPD sebagai produsen data
- Meningkatkan analisis data sesuai keperluan pemangku kepentingan
- Meningkatkan Kualitas dan validitas data

c. Instansi pelaksana:

- BPS
- Semua OPD

3.2.6. Isu Strategis Kabupaten Natuna

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW Kabupaten Natuna, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna sebagai berikut.



1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia

Derajat dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut penting menjadi perhatian bagi *stakeholder* mengingat tersedianya SDM yang potensial, memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang diharapkan akan mampu memiliki daya saing dalam persaingan di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, pendidikan digunakan untuk memperbaiki derajat kehidupan masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu sehingga akan tercipta generasi-generasi yang berkualitas dan tangguh.

Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja dengan kompetensi yang minim, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan masyarakat, komitmen pemerintah daerah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan, diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan serta memiliki nilai tambah dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

Selain dari segi pendidikan, bidang kesehatan juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. SDM yang sehat akan memiliki kemampuan optimal dalam melaksanakan kehidupan kesehariannya termasuk dalam menjalankan pekerjaan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh sebab itu, derajat kesehatan masyarakat menjadi salah satu syarat utama dalam perwujudan kualitas dan daya saing masyarakat Kabupaten Natuna. Beberapa poin penting dalam isu strategi peningkatan kualitas SDM melalui perwujudan kualitas kesehatan seperti angka kematian ibu dan bayi, transisi epidemiologi, yaitu meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (*stroke, cardiovascular, dll*), *stunting* pada anak, serta jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, terutama menghadapi JKN, transisi epidemiologi dan perubahan demografi.

2. Kesenjangan pembangunan antar wilayah

Sebagai wilayah kepulauan, Natuna memiliki kondisi geografis yang menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam pembangunan wilayah. Terlebih lagi terdapat beberapa wilayah yang berada jauh dan memiliki perbatasan dengan Negara lain seperti Vietnam,



Kamboja, Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan wilayah Natuna bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah.

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah infrastruktur perhubungan dimana keberhasilan pada sektor perhubungan dapat dilihat dari tingginya akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antarwilayah atau antarkota atau antardesa juga semakin tinggi.

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Natuna merujuk pada penyediaan transportasi, kelistrikan, air bersih, perumahan layak huni, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

3. Pengembangan ekonomi kerakyatan (khususnya pariwisata dan perikanan)

Perkembangan jumlah angka kemiskinan di Natuna tiap tahunnya menunjukkan angka yang cenderung meningkat. Salah satu sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dan kemauan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan, terutama pada masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat Natuna yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang.

Beberapa sektor unggulan pada perekonomian kerakyatan yang mampu mendongkrak kualitas struktur ekonomi daerah adalah sektor pariwisata dan subsektor perikanan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu memberi manfaat positif bagi masyarakat di sekitarnya, dan terkhusus lagi bagi pembangunan daerah. Dengan adanya berbagai potensi obyek wisata yang bagus dan menarik, Natuna diharapkan



mampu meningkatkan kualitas geliat sektor pariwisata dengan berbagai program prioritas sektoral. Salah satu upaya dalam meningkatkan capaian sektor pariwisata adalah menjadikan kawasan Natuna sebagai Geopark Nasional dimana hal ini sudah disetujui oleh Komite Nasional Geopark Indonesia.

Geopark sendiri merupakan sebuah konsep manajemen pengembangan suatu kawasan (dengan luas tertentu) secara berkelanjutan yang memadukan-serasikan tiga keanekaragaman alam, yaitu geologi (*geodiversity*), hayati (*biodiversity*) dan budaya (*culturaldiversity*). Dalam pengembangannya, konsep ini berpilar pada aspek Konservasi, Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penumbuhan Nilai Ekonomi Lokal melalui geowisata. Di Kawasan Natuna, setidaknya terdapat Sembilan geoside yang masuk ke dalam Geopark Natuna seperti Pulau Akar, Batu Kasah, Gunung Ranai, Pantai Gua dan Bamak, Pulau Senua, Pulau Setanau, Senubing, Tanjung Datuk serta Taman Batu Alif. Dengan diangkatnya sebagai Geopark, maka diharapkan perkembangan kepariwisataan Natuna dapat berkembang pesat dan menjadi salah satu tujuan utama wisata internasional.

Pada subsektor penunjang perekonomian yang cukup berpotensi adalah subsektor perikanan. subsektor perikanan memiliki dominasi yang cukup tinggi pada struktur ekonomi daerah. Hal ini tentu saja dikarenakan Natuna merupakan wilayah kepulauan dengan potensi perikanan tangkap yang tinggi. Dengan adanya pengelolaan subsektor perikanan yang baik, maka diharapkan subsektor ini mampu memberi support pada sektor lain (seperti industri pengolahan) sehingga menghasilkan nilai tambah bagi produk unggulan Natuna.

4. Perwujudan ekonomi hijau (*green economy*)

Pada dasarnya ekonomi hijau adalah peningkatan kapasitas perekonomian daerah yang tidak merugikan lingkungan hidup. Program Lingkungan PBB (UNEP; *United Nations Environment Programme*) dalam laporannya berjudul *Towards Green Economy* menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Dari definisi yang diberikan UNEP, pengertian ekonomi hijau dalam kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Konsep ekonomi hijau



melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan.

UNEP/ *United Nation Environment Programme* (2008) mencetuskan gagasan mengenai “*Green Economy*” dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Gagasan “*Green Economy*” tersebut bertujuan memberikan peluang yang besar bagaimana upaya memanfaatkan konsepsi “*Green Economy*” dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem. Terkait dengan gagasan konsepsi tersebut, terdapat dua hal yang ingin dicapai. Pertama, ekonomi hijau mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang bukan hanya sekedar mempertimbangkan masalah makro ekonomi, khususnya investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun produksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan (“*green investment/investasi hijau*”), namun juga difokuskan pada bagaimana kontribusi investasi hijau tersebut terhadap produksi barang dan jasa serta dan pertumbuhan lapangan pekerjaan di bidang yang terkait dengan ramah lingkungan (*green job*). Kedua, *green economy* mencoba untuk menyiapkan panduan *pro-poor green investment*, atau investasi hijau yang mampu mendorong pengentasan masalah kemiskinan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong agar para pembuat kebijakan mampu membuat semua jajaran pemerintahan dan sektor swasta ikut serta untuk mendukung peningkatan investasi hijau. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ekonomi hijau secara singkat dicirikan sebagai: (i) peningkatan investasi hijau; (ii) peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau; (iii) peningkatan pangsa sektor hijau; (iv) penurunan energi/sumber daya yang digunakan dalam setiap unit produksi; (v) penurunan CO₂ dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan; serta (vi) penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah (*decrease in wasteful consumption*). Konsep ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar. Menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam. Tentunya konsep ekonomi hijau baru akan membuahkan hasil jika semua elemen masyarakat mau mengubah perilaku.

Sebagai wilayah yang dominasi perekonomian berada pada sektor pertambangan dan penggalian, Kabupaten Natuna memiliki ancaman dalam degradasi lingkungan hidup.



Permasalahan lingkungan hidup inilah yang harus diperhatikan dalam menyeimbangkan antara stabilitas ekonomi daerah dengan kondisi lingkungan di masa mendatang. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus memiliki komitmen khusus untuk keberlangsungan kualitas lingkungan hidup. Setiap perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta program kegiatan pembangunan daerah harus menjamin dan memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup sehingga generasi mendatang dapat merasakan kenyamanan dalam menjalankan aktivitasnya.

5. Implementasi *Good Governance*

Prioritas utama Kabupaten Natuna dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Natuna dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data. Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna melalui peningkatan pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perbaikan manajemen (struktur) pemerintah daerah secara efektif dan efisien menjadi dukungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu yang menjadi perhatian dalam pembangunan ketatanegaraan dan administrasi publik Kabupaten Natuna adalah masih belum optimalnya berbagai infrastruktur pemerintahan daerah yang representatif. Hal ini tentu saja berdampak kepada pelayanan publik sehingga mempengaruhi nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap perangkat daerah yang memiliki unit layanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Anggaran yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur pemerintahan memang cukup tinggi, namun hal itu akan menjadi salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Natuna.



6. Pembangunan Kawasan Ekonomi Berbasis Kepulauan

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Natuna memiliki berbagai potensi sumber daya yang jika diolah secara arif akan memberikan kontribusi optimal dalam peningkatan kualitas pembangunan daerah. Berbagai sumber daya yang potensial tersebut dapat terlihat dari tingginya kontribusi sektor primer khususnya pertambangan dan penggalian serta subsektor perikanan. Selain itu, kekayaan bahari Natuna juga menjadikan Kabupaten Natuna menjadi pusat perhatian pada pelancong baik domestik maupun mancanegara. Untuk ke depannya, perlu adanya perhatian khusus antara pemerintah dan swasta dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan mengintegrasikan antara sektor pariwisata dengan berbagai sektor penunjang lainnya seperti perhubungan, kuliner, keamanan, hingga akomodasi.

7. Penyediaan Bandar Udara dan Pelabuhan Berskala Internasional

Kabupaten Natuna merupakan salah satu wilayah administrasi terluar Republik Indonesia yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Natuna adalah Negara Vietnam (Utara) dan Malaysia Timur (Timur). Kedekatan kewilayahan dengan Negara tetangga menjadikan Natuna memiliki potensi dalam pengembangan sektor perhubungan khususnya aksesibilitas dan konektivitas antar Negara. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur perhubungan yang sesuai dengan kontur kewilayahan Natuna menjadi salah satu poin penting dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Sesuai dengan kewilayahan Natuna yang merupakan kabupaten kepulauan, maka 2 (dua) infrastruktur perhubungan yang mungkin untuk diwujudkan adalah pembangunan Bandar Udara maupun Pelabuhan berskala internasional. Keseriusan pemerintah daerah dalam mengupayakan penyediaan Bandar Udara dan Pelabuhan berskala internasional menjadi acuan bagi investor untuk dapat masuk dalam pencapaian realisasi program tersebut. Dampak perwujudan sarana prasarana perhubungan ini secara otomatis akan menggenjot berbagai sektor perekonomian Natuna baik sektor formal maupun informal.

8. Natuna Sebagai Wilayah Perbatasan

Natuna merupakan wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dengan Negara tetangga Vietnam, Kamboja, Singapura dan Malaysia. Selain itu, Natuna juga berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Sebagai wilayah perbatasan dan terbuka, maka Natuna memiliki berbagai permasalahan-



permasalahan menyangkut sumber daya di perbatasan seperti minimnya akses listrik, aksesibilitas wilayah dan komunikasi di wilayah terluar Natuna, tingginya potensi *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di wilayah teritori Indonesia, hingga rendahnya kesejahteraan masyarakat perbatasan Natuna.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Natuna berkoordinasi dalam menguraikan dan menanggulangi permasalahan tersebut, khususnya dalam menjaga kedaulatan NKRI. Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah nasional, direncanakan akan ada pembangunan pangkalan militer baru di Natuna untuk memperkuat pertahanan dan keamanan NKRI. Selain itu, akan dibangun pula pangkalan khusus untuk kapal ikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya para nelayan.



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Merujuk pada permasalahan pembangunan yang diuraikan pada bab sebelumnya maka visi dan misi merupakan upaya untuk memecahkan permasalahan daerah dalam jangka panjang. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan misi RPJPD merupakan gambaran mengenai apa yang ingin dicapai oleh Kabupaten Natuna pada akhir tahun 2025. Visi dan misi mencerminkan cita-cita atas apa yang diinginkan dan dengan kebijakan apa keinginan masyarakat tersebut akan diwujudkan dalam pembangunan. Pernyataan visi dan misi yang baik dapat mengarahkan perumusan kebijakan pembangunan lebih fokus dalam mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi dan misi menjadi panduan dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Visi Kabupaten Natuna Tahun 2025 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi cita-cita bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Pencapaian cita-cita ini akan selalu diwarnai berbagai peluang dan tantangan masa depan yang perlu diantisipasi dengan melaksanakan misi pembangunan Tahun 2005- 2025. Misi pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 memperlihatkan upaya yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai visi Kabupaten Natuna Tahun 2025.

4.1. Visi

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna untuk periode Tahun 2005-2025 mempunyai 3 unsur pokok yang menjadi cita-cita dan harapan dalam pembangunan



Kabupaten Natuna, yaitu: (a) makmur, (b) adil dan (c) sejahtera yang merupakan ciri-ciri dari masyarakat yang maju dan bermartabat sebagaimana yang didambakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagai berikut:

Menjadi Natuna MAS (Makmur, Adil dan Sejahtera)

Penjabaran visi Kabupaten Natuna diatas, dijelaskan sebagai berikut:

Makmur

Perwujudan keadaan masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan lahir dan batin merata di seluruh wilayah, lapisan dan golongan masyarakat didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga membentuk daerah yang mampu mengelola segenap potensinya dengan tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergisitas.

Adil

Perwujudan keadaan masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan dan rongrongan yang mengancam keselamatan lahir dan batin karena terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan. Keadilan juga diwujudkan dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dan segenap potensi serta mata pencaharian masyarakat Kabupaten Natuna. Pemerataan sarana dan prasarana pembangunan ke segenap wilayah adalah juga bagian dari aspek keadilan guna mendukung upaya mewujudkan keadilan pembangunan itu sendiri.

Sejahtera

Perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi seluruh kebutuhan hidupnya yang diukur dengan peningkatan kualitas dari berbagai aspek kehidupan. Kesejahteraan dicapai melalui keseimbangan antara jasmani dan ruhani serta lahir dan batin. Dalam konteks pembangunan, sejahtera yang akan diwujudkan adalah terciptanya kondisi ekonomi yang memberikan tingkat kelayakan hidup masyarakat Kabupaten Natuna dan kesejahteraan yang ditunjukkan oleh terpenuhinya layanan dasar masyarakat, sekurang-kurangnya layanan pendidikan dan kesehatan.

4.2. Misi

Misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna merupakan upaya dalam mencapai visi pada kurun waktu tertentu. Dengan kata lain misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dalam kerangka itu, misi juga diwujudkan untuk menjabarkan berbagai komitmen terhadap seluruh *stakeholder* pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Misi beserta penjabarannya pembangunan Kabupaten Natuna untuk periode Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:



Adapun penjelasan masing-masing misi diatas adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat beragama dan berbudaya yang selaras dan harmonis

Misi untuk mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang selaras dan harmonis merupakan upaya pokok yang sangat penting untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, lahir dan batin serta dunia dan akhirat. Di samping itu, misi



ini juga meletakkan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan terarah serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini, tata kehidupan masyarakat yang religius dan menyatu dalam budaya merupakan katalis bagi penyelenggaraan pembangunan yang bersendi ketuhanan di satu sisi dan di sisi lain juga merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna perlu diupayakan perwujudan masyarakat yang berbudaya, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi berbagai penyakit masyarakat yang menjangkiti penduduk pada berbagai usia seperti narkoba, perzinahan, dan tindak kriminalitas lainnya. Oleh karena itu, moralitas yang ditanamkan pada SDM akan berdampak pada kenyamanan, keamanan dan keharmonisan masyarakat dalam menjalani aktivitas kesehariannya.

2. Mewujudkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata serta mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kualitas SDM merupakan salah satu penggerak kemajuan dalam pembangunan daerah, kualitas SDM juga menjadi salah satu indikator berhasil dan tidaknya pembangunan di daerah. Dengan kualitas SDM yang mumpuni yang didukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan akan mampu menggiring masyarakat menuju kemandirian. Dengan kemandirian masyarakat yang sudah siap dengan berbagai tantangan dalam pembangunan, diharapkan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan berbagai aspek di Kabupaten Natuna.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan akuntabel

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya upaya yang perlu dilakukan adalah reformasi, baik reformasi administrasi dan reformasi birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Natuna. Reformasi ini menjadi tujuan utama pemerintah yang diawali dengan adanya reformasi kebijakan publik. Dengan reformasi kebijakan publik maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan. Namun yang terpenting dari semua itu, yakni perlunya integrasi semua elemen birokrasi untuk berani melakukan perubahan secara komprehensif dan mendukung pola kebijakan reformasi dalam pelaksanaannya, dari mulai pimpinan hingga level paling



bawah. Keseluruhan itu bergerak bersama-sama membangun inovasi untuk perubahan yang lebih baik.

4. Mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing

Perekonomian daerah menjadi salah satu tolok ukur pencapaian pembangunan daerah, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mendorong meningkatnya perekonomian masyarakat dan menggiring pada meningkatnya kesejahteraan. Memahami berbagai potensi sumberdaya Kabupaten Natuna, salah satunya potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan meliputi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, pariwisata, kerajinan, makanan, dan sebagainya. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan upaya yang tepat dalam mendorong berbagai sumber potensi ekonomi daerah. Dengan diharapkan mampu menumbuhkan pembangunan ekonomi yang cukup signifikan, sehingga pertumbuhan ekonomi mampu berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna.

5. Menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas ekonomi daerah

Salah satu pendukung penting dalam percepatan pembangunan adalah infrastruktur yang memadai. Dengan infrastruktur yang mumpuni pergerakan distribusi orang dan barang akan semakin cepat, mudah dan terjangkau. Mengingat pentingnya infrastruktur dalam pembangunan, perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mampu memfasilitasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Natuna. Dengan infrastruktur yang memadai maka akan terpenuhinya prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas pembangunan perekonomian daerah, sehingga akan mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi secara merata untuk mewujudkan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Natuna.

6. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

Lingkungan hidup merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan lingkungan hidup menjadi salah satu kewajiban bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat natuna. Ketidakbertanggungjawaban terhadap lingkungan hidup mampu mengakibatkan pencemaran, penggundulan hutan, *overfishing*, terkikisnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*), kepunahan jenis



(*species extinction*), erosi, banjir, dan berbagai bentuk kerusakan lingkungan lainnya terjadi hampir di seluruh penjuru dunia pada tingkat yang telah mengancam kapasitas keberlanjutan (*sustainable capacity*) ekosistem bumi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kehidupan manusia. Menindaklanjuti misi ini maka perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup yang berkualitas sehingga akan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Natuna.



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan bersama seluruh pemangku kepentingan daerah. Visi dan Misi ini menjadi komitmen dan akan dilaksanakan dalam pembangunan 20 tahun ke depan. Target kinerja dalam kurun waktu 20 tahun tersebut dicapai melalui *milestone* 5 (lima) tahunan, sesuai dengan arah kebijakan masing-masing tahap. Arah kebijakan pembangunan menunjukkan agenda/tema yang merupakan fokus utama pembangunan lima tahunan. Arah kebijakan pembangunan selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran pokok pada tiap tahap pembangunan. Dengan demikian, pencapaian sasaran pokok dilakukan secara bertahap dalam empat periode lima tahunan pembangunan sesuai arah kebijakan pembangunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, kurun waktu RPJP Daerah mengikuti atau sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Pelaksanaan RPJP Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam 4 (empat) tahapan RPJM Daerah Tahap I (2005-2010), Tahap II (2011-2015), Tahap III (2016-2021) dan RPJM Daerah Tahap IV (2022-2025).

Arah pembangunan daerah diterjemahkan kedalam sasaran pokok dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna untuk periode tahun 2005-2025 mendatang. Arah pembangunan daerah pada dasarnya arah kebijakan yang secara rasional dapat menjelaskan fokus pembangunan berisikan kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 20 tahun sebagai hasil dari terlaksananya proses pembangunan daerah yang direncanakan dalam RPJPD ini.



5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam mencapai sasaran pembangunan jangka panjang. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah menjabarkan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 tahun, guna mencapai sasaran jangka panjang dan memberikan arahan pada sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dalam 20 tahun ke depan (*desired future*). Visi daerah dituangkan dalam RPJPD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka panjang daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan.

Sasaran 20 tahunan dalam misi pembangunan jangka panjang daerah diterjemahkan prioritasnya masing-masing pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan melalui penetapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan dilakukan berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan. Arah kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan arahan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan kapan suatu indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna 2005–2025 dikelompokkan menjadi 4 (empat) tahapan bagi kabupaten Natuna, sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu tahap I, II, III dan IV. Setiap tahapan pembangunan di dalam pembangunan jangka panjang memiliki prioritas-prioritas dengan target tertentu setiap tahunnya. Prioritas tersebut tertuang dalam sasaran-sasaran pokok disertai dengan target pencapaian yang mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu.

Penekanan fokus atau tema pembangunan dalam setiap tahapan memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka panjang Natuna. Tema tersebut untuk memudahkan pemahaman umum bahwa satu tahapan ke tahapan berikutnya saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang utuh selama masa 20 tahun.

Gambar 5.1
Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna 2005-2025



Sebagaimana terlihat dalam pencapaian visi dan misi pembangunan 20 tahun Kabupaten Natuna ditempuh melalui 4 (empat) tema besar di masing-masing tahapan pembangunan lima tahunan. Peletakan dasar-dasar pembangunan menjadi fokus utama pada tahap pertama untuk menjadi landasan bagi keberhasilan tahap-tahap selanjutnya. Pembangunan 5 (lima) tahunan diharapkan menciptakan masyarakat Natuna yang sejahtera dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain serta tercapainya Visi pembangunan jangka panjang: **“MENJADI NATUNA MAS”**.

Arah kebijakan pembangunan setiap tahapan beserta prioritasnya selama 20 tahun pembangunan di Kabupaten Natuna diuraikan sebagai berikut:



a. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHAP I

Arah kebijakan pada periode I (pertama) lima tahunan jangka panjang Natuna memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema pembangunan tahap-tahap berikutnya. Tahap I merupakan penjabaran dari RPJPN tahap I yang akan menjadi dasar bagi penyelarasan kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD) Tahap I Kabupaten Natuna. Pada periode I ini, tema pembangunan Kabupaten Natuna adalah:

Menuju Natuna MAS (Makmur, Adil dan Sejahtera) Tahun 2020

Sesuai dengan tema pembangunan pada tahap pertama ini, Kabupaten Natuna diharapkan mampu mempersiapkan pembangunan yang mampu berdampak strategis dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Beberapa upaya yang perlu ditempuh untuk menjadi arah kebijakan pada tahap I ini adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan**
- 2. Peningkatan profesionalisme dan integritas pemerintah**
- 3. Pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan potensi unggulan sumber daya alam**
- 4. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar**

b. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHAP II

Pembangunan Tahap II RPJPD Kabupaten Natuna ini merupakan lanjutan pembangunan pada Tahap I, pada Tahap kedua ini pembangunan Kabupaten Natuna mengarah pada pemerataan pembangunan pada seluruh bidang. Dengan pembangunan yang menyeluruh diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi secara makro dan mikro, dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang merata dan seimbang. Merujuk pernyataan sebelumnya maka tema pembangunan tahap kedua adalah:



Menjadi Natuna Sejahtera, Merata dan Seimbang

Sesuai dengan tema pembangunan pada tahap pertama ini, Kabupaten Natuna mengharapkan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan pada seluruh lapisan masyarakat. Beberapa upaya yang perlu ditempuh untuk menjadi arah kebijakan pada tahap II ini adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan**
2. **Perwujudan masyarakat yang produktif dan kesetaraan gender**
3. **Peningkatan profesionalisme dan integritas pemerintah**
4. **Pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan potensi unggulan sumber daya alam**
5. **Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar**

c. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHAP III

Pembangunan pada tahap ketiga RPJPD Kabupaten Natuna merupakan lanjutan dari pembangunan tahap kedua, dimana fokus pembangunan Kabupaten Natuna memiliki keterpaduan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini berarti pembangunan Kabupaten Natuna diarahkan pada pembangunan SDM secara menyeluruh, perekonomian masyarakat terutama pada wilayah pesisir pantai dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan keharmonisan pembangunan ini diharapkan pembangunan mampu saling mendukung dan melengkapi, sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan Kabupaten Natuna. Sesuai pernyataan diatas, tema pembangunan tahap ketiga ini adalah:

Masyarakat Natuna yang Cerdas dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan dan Budaya tempatan

Beberapa arah kebijakan perlu dilakukan pada RPJPD tahap ketiga ini adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan sisi keagamaan dan kebudayaan masyarakat**
2. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan**
3. **Peningkatan profesionalisme dan integritas pemerintah**
4. **Pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan potensi unggulan sumber daya alam**



5. Peningkatan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan petani
6. Meningkatkan kualitas aksesibilitas wilayah melalui penyediaan transportasi laut dan darat pada wilayah terisolir serta penyiapan pembangunan bandar udara dan pelabuhan laut berskala internasional
7. Peningkatan pengelolaan mutu lingkungan hidup

d. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHAP IV

Dengan melanjutkan pembangunan pada tahap ketiga, tahap keempat ini menjadi ujung pembangunan Kabupaten Natuna. Dengan segala capaian pembangunan pada tahap IV ini Kabupaten Natuna harus mampu menyelaraskan, mengharmonisasikan dan melengkapi segala sesuatu yang masih belum terselesaikan pada pelaksanaan ditahap periode sebelumnya. Pembangunan yang akan dilakukan pada tahap ini menitikberatkan pembangunan masyarakat yang berdaya saing yang didukung oleh pembangunan dalam berbagai bidang, sehingga menjadi masyarakat yang madani.

Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat demokratis, serta yang maju dan menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan adanya masyarakat madani, maka akan terwujud kualitas Kabupaten Natuna yang berkualitas, andal, ramah dan unggul dalam berbagai bidang, khususnya sektor-sektor unggulan pembangunan daerah seperti sektor pertanian. Dilain hal, pengembangan yang dilakukan juga akan mengarah pada pembangunan sektor perhubungan yang *massive* yakni penyediaan Bandar Udara dan Pelabuhan berskala internasional. Merujuk pada pernyataan di atas maka tema pembangunan tahap keempat ini adalah:

Mewujudkan Natuna yang Unggul, Berkualitas, Andal dan Ramah

Beberapa arah kebijakan perlu dilakukan pada RPJPD tahap keempat ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan



2. Perwujudan masyarakat yang produktif dan kesetaraan gender
3. Pelaksanaan pelayanan prima oleh aparaturnya Pemerintahan Kabupaten terhadap seluruh kepentingan rakyat
4. Pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan potensi unggulan sumber daya alam
5. Peningkatan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan petani
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
7. Meningkatkan kualitas aksesibilitas wilayah melalui penyediaan transportasi laut dan darat pada wilayah terisolir serta penyiapan pembangunan bandar udara dan pelabuhan laut berskala internasional
8. Peningkatan pengelolaan mutu lingkungan hidup

Untuk lebih memahami secara utuh bagaimana arah kebijakan pembangunan jangka panjang di setiap tahapan pembangunannya, maka disusun matriks tahapan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Rumusan Arah Kebijakan Pada Setiap Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025

Arah Kebijakan	Tahap I (2006-2011)	Tahap II (2011-2016)	Tahap III (2016-2021)	Tahap IV (2022-2025)
Peningkatan sisi keagamaan dan kebudayaan masyarakat				
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan				
Perwujudan masyarakat yang produktif dan kesetaraan gender				
Peningkatan profesionalisme dan integritas pemerintah				
Pelaksanaan pelayanan prima oleh aparaturnya Pemerintahan Kabupaten terhadap seluruh kepentingan rakyat				
Pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan potensi unggulan sumber daya alam				
Peningkatan Pendapatan Masyarakat khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani.				
Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar				



Arah Kebijakan	Tahap I (2006-2011)	Tahap II (2011-2016)	Tahap III (2016-2021)	Tahap IV (2022-2025)
Meningkatkan kualitas aksesibilitas wilayah melalui penyediaan transportasi laut dan darat pada wilayah terisolir serta penyiapan pembangunan bandar udara dan pelabuhan laut berskala internasional				
Peningkatan pengelolaan mutu lingkungan hidup				

5.2. SASARAN POKOK

Sasaran pokok merupakan instrumen pengukuran kinerja untuk memahami dengan baik bagaimana tema atau arah kebijakan pembangunan daerah dapat dipahami target kerjanya. Sasaran pokok dikelompokkan berdasarkan tahapan- tahapan pembangunan jangka panjang dalam empat periode pembangunan Kabupaten Natuna 2005–2025, yang selanjutnya harus menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program calon kepala daerah serta pedoman dalam penyusunan RPJMD pada periode berkenaan.

Mempertimbangkan permasalahan, visi, misi dan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan pada periode berikutnya maka keterkaitan antara visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok beserta targetnya disajikan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5.2.
Keterkaitan Antara Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, Indikator dan Target Pembangunan
RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025

VISI: MENJADI NATUNA MAS (MAKMUR, ADIL, DAN SEJAHTERA)									
MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI		DATA REALISASI	TARGET	
					TAHAP I	TAHAP II		TAHAP III	TAHAP IV
Mewujudkan tata kehidupan masyarakat beragama dan berbudaya yang selaras dan harmonis	Peningkatan sisi keagamaan dan kebudayaan masyarakat	Meningkatnya perilaku masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia	Angka kriminalitas	-			1:13,54	1:16,30	
Mewujudkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata serta Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia	-	67,76		72,10	73,20	75,41
			Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD	-		1:121			
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Tahun	62,46					
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Tahun			8,71	10,00		
	Perwujudan masyarakat yang produktif dan	Terwujudnya angkatan kerja berdaya saing	Angka Pengangguran	%		10,54	3,52		3,00



VISI: MENJADI NATUNA MAS (MAKMUR, ADIL, DAN SEJAHTERA)									
MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI		DATA REALISASI	TARGET	
					TAHAP I	TAHAP II		TAHAP III	TAHAP IV
	kesetaraan gender								
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan akuntabel	Peningkatan profesionalisme dan integritas pemerintah	Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan memiliki kinerja prima	Opini BPK	-	WDP	WDP	WTP	WTP	
	Pelaksanaan pelayanan prima oleh aparatur Pemerintahan Kabupaten terhadap seluruh kepentingan rakyat	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	-			74,00		85,00
Mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing	Pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan potensi unggulan sumber daya alam	Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	Angka Kemiskinan	%	4,83		4,68	3,75	3,50
		Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,58	3,00	2,44	4,50	5,00



VISI: MENJADI NATUNA MAS (MAKMUR, ADIL, DAN SEJAHTERA)										
MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI		DATA REALISASI	TARGET		
					TAHAP I	TAHAP II		TAHAP III	TAHAP IV	
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah (pertanian, perikanan dan pariwisata)	LPE tanpa Migas	%			5,68 (2017)	6,50	7,00	
	Peningkatan Pendapatan Masyarakat khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah			70,92 (2017)	73,58	113,77	
Menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas ekonomi daerah	Pemerataan pembangunan infrastuktur dasar	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Indeks Gini	-			0,330		0,300	
			Rasio elektrifikasi	-	32,05	66,25	80,92 (2017)			
	Meningkatkan kualitas aksesibilitas wilayah melalui penyediaan transportasi laut dan darat pada wilayah terisolir serta penyiapan pembangunan bandar udara dan pelabuhan laut berskala internasional	Meningkatnya aksesibilitas daerah	Jumlah kecamatan sudah terakses jalan	Kecamatan				15	15	
			Jumlah kelurahan/desa sudah terakses pelabuhan	desa				50	60	70



VISI: MENJADI NATUNA MAS (MAKMUR, ADIL, DAN SEJAHTERA)									
MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI		DATA REALISASI	TARGET	
					TAHAP I	TAHAP II		TAHAP III	TAHAP IV
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan mutu lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Status mutu air	-			100,00	50,00	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-			76,37		87,00



BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna 2005-2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025. RPJPD Kabupaten Natuna 2005-2025 selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Natuna dalam menyusun RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan. RPJMD yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam program-program pembangunan lima tahun, harus menerjemahkan arah kebijakan pembangunan setiap periode/tahapan dalam RPJP Kabupaten Natuna.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Natuna 2005-2025 merupakan pedoman pembangunan yang mempunyai jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, RPJP Kabupaten Natuna 2005-2025 merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibawahnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Natuna. Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan RPJP Kabupaten Natuna sebagai berikut:

1. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka calon-calon Bupati di setiap tahapan harus memperhatikan RPJPD Kabupaten Natuna 2005-2025 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun visi dan misi kepala daerah, yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Natuna;
2. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Kabupaten Natuna dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Natuna dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dalam RPJP Kabupaten Natuna 2005-2025;



3. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (BP3D) perlu menyebarluaskan dokumen RPJPD kepada seluruh pemangku kepentingan daerah, terutama kepada calon Bupati dan calon wakil Bupati melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna dan partai-partai politik di wilayah Natuna sehingga sasaran pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat dilaksanakan dan selaras dengan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka menengah;
4. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan program kerjanya pada pelaksanaan RPJPD Kabupaten Natuna 2005-2025 dengan mengerahkan secara optimal semua potensi dan sumber daya sesuai sasaran pokok periode berkenaan;
5. Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Natuna berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Natuna dan sasaran RPJMD. Rencana Strategis PD selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja PD Kabupaten Natuna;
6. Dalam rangka implementasi RPJP Kabupaten Natuna 2005-2025, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) berkewajiban untuk melakukan penjabaran RPJP 2005-2025 ke dalam RPJMD Kabupaten Natuna. Namun dikarenakan kerangka pelaksanaan pada Perubahan RPJP Kabupaten Natuna 2005-2025 untuk meningkatkan kualitas perencanaan pada tahap ketiga dan keempat, maka perumusan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 2016-2021 harus disesuaikan kembali dengan RPJP Kabupaten Natuna. Selain itu, pada penyusunan RPJMD periode 2022-2025 nanti juga harus merujuk pada dokumen perubahan ini.

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL